

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Sejak pemerintahan Orde Baru sampai sekarang, gonjang-ganjing mengenai peningkatan taraf hidup petani di pedesaan selalu mengalami dinamika. Apapun kebijakan pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup petani, seringkali menuai kritikan dan kontroversi dari berbagai pihak. Banyak kalangan yang mengatakan petani sebagai "wong cilik" yang kehidupannya semakin tertindas dan harus menjadi tumbal atas kebijakan perekonomian pemerintah. Seperti pada bagaimana kebijakan penentuan harga dasar gabah, pengurangan subsidi pupuk, mahalnnya harga bahan bakar dan baru-baru ini kebijakan import yang dirasa tidak berpihak pada kepentingan dan kesejahteraan petani.

Disisi lain, pembangunan nasional juga menciptakan kesenjangan antara desa dan kota. Banyak peneliti yang sudah membuktikan bahwa pembangunan semakin memperbesar jurang antara kota dan desa. Sangat disadari, negara berkembang seperti Indonesia mengkonsentrasikan pembangunan ekonomi pada sektor industri yang membutuhkan investasi yang mahal untuk mengejar pertumbuhan. Akibatnya sektor lain seperti sektor pertanian dikorbankan yang akhirnya pembangunan hanya terpusat di kota-kota. Pertumbuhan antara kota dan desa pada tahap awal secara umum diikuti dengan pemerataan yang buruk, namun setelah masuk pada tahap pertumbuhan lanjut, pemerataan semakin membaik. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesenjangan tersebut antara lain karena perbedaan pendidikan, ketersediaan lapangan pekerjaan, infrastruktur investasi, dan kebijakan.

Dewasa ini, telah banyak para ahli pembangunan masyarakat pedesaan yang mengangkat permasalahan ini ke permukaan. Karena sesungguhnya yang terjadi petani tetap miskin, sebab persoalan yang berkaitan dengan produksi seperti kapasitas sumber daya manusia, modal, dan kebijakan tetap sama dari tahun ke tahun walaupun bentuknya berbeda. Banyak proyek/program pemerintah yang sudah dilakukan untuk mendorong pembangunan perekonomian masyarakat pedesaan. Proyek/program tersebut dilakukan masing-masing departemen maupun antar departemen. Pada umumnya proyek-proyek yang digulirkan masih pada

generasi pemberian bantuan fisik kepada masyarakat, baik berupa sarana irigasi, bantuan saprotan, mesin pompa, pembangunan sarana air bersih dan sebagainya. Kenyataannya, ketika proyek berakhir maka keluaran proyek tersebut sudah tidak berfungsi atau bahkan hilang.

Beberapa faktor yang mempengaruhi kegagalan proyek tersebut antara lain, yaitu ketidaktepatan antara kebutuhan masyarakat dan bantuan yang diberikan, paket proyek tidak dilengkapi dengan ketrampilan yang mendukung, tidak ada kegiatan monitoring yang terencana, tidak ada kelembagaan di tingkat masyarakat yang melanjutkan proyek. Belajar dari berbagai kegagalan tersebut, generasi selanjutnya proyek-proyek mulai dilengkapi dengan aspek lain seperti pelatihan untuk ketrampilan, pembentukan kelembagaan di tingkat masyarakat, keberadaan petugas lapang, melibatkan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Atau dengan kata lain beberapa proyek dikelola dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat. Dibandingkan dengan generasi sebelumnya, hasil proyek lebih lama dimanfaatkan oleh masyarakat bahkan berkembang memberikan dampak positif.

Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah dalam mengatasi permasalahan kemiskinan dan ketidakberdayaan masyarakat adalah dengan mengeluarkan Program PIDRA, dengan adanya program PIDRA diharapkan kemiskinan dan ketidakberdayaan masyarakat dapat sedikit demi sedikit terkikis. Program PIDRA yang hakekatnya merupakan salah satu program pembangunan masyarakat sangat erat melibatkan seluruh lapisan anggota penerima program, baik pria maupun wanita. Hal ini sesuai dengan Inpres No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender. Program tersebut bertujuan untuk meningkatkan pendapatan petani dan keluarganya, meningkatkan kegiatan konservasi dan pelestarian sumber daya alam serta lingkungan, terwujudnya sistem pertanian yang berkelanjutan dan usahatani kelompok dan partisipasi wanita untuk mewujudkan ketahanan pangan di pedesaan.

Kegiatan pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk mengaktualisasikan diri mereka. Orientasi dari pemberdayaan masyarakat adalah memberikan daya (kemampuan) kepada masyarakat untuk berusaha merubah diri mereka sendiri menjadi lebih baik melalui berbagai macam aktifitas, misalnya: pembentukan kelompok yang di

dalamnya terdapat kegiatan simpan pinjam dan tabungan. Melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat diharapkan akan muncul interaksi sosial sehingga masyarakat dapat berpartisipasi secara aktif, baik dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi kegiatan yang pada akhirnya akan mampu meningkatkan kesejahteraan hidupnya.

Pemberdayaan masyarakat merupakan metoda yang memungkinkan orang dapat meningkatkan kualitas hidupnya serta mampu memperbesar pengaruhnya terhadap proses yang mempengaruhi kehidupannya. Secara khusus pemberdayaan masyarakat berkenaan dengan upaya pemenuhan kebutuhan orang-orang yang tidak beruntung atau tertindas, baik yang disebabkan oleh kemiskinan maupun oleh deskriminasi berdasarkan kelas sosial, suku, gender, jenis kelamin, usia, dan kecacatan. Pemberdayaan adalah bagian dari paradigma pembangunan yang memfokuskan perhatiannya kepada semua aspek yang prinsipil dari manusia di lingkungannya yakni mulai dari aspek intelektual (Sumber Daya Manusia), aspek material dan fisik, sampai kepada aspek manajerial. Aspek-aspek tersebut bisa jadi dikembangkan menjadi aspek sosial-budaya, ekonomi, politik, keamanan dan lingkungan.

Agenda kebijakan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan perekonomian nasional sebenarnya sudah dilakukan, hanya masih terkesan tempelan dan setengah hati. Karena prosesnya banyak terfokus di tingkat mikro (desa dan sekitarnya), namun ketika berhadapan dalam tataran makro menjadi mentah dan sulit untuk mengakses kebijakan yang ada. Pertama, aspek sumberdaya manusia, keterbatasan sarana komunikasi dan informasi, menimbulkan terjadinya jebakan bagi masyarakat desa karena pemahaman mereka hanya di lingkungan sekitar. Pola pikir seperti itu sulit sekali menerima perubahan dan apabila perubahan dipaksakan akan menimbulkan kontra produktif. Lebih-lebih pada program yang sangat sensitif dengan budaya lokal setempat, inovasi baru yang tidak sesuai menimbulkan daya tolak, contoh pada program yang *sensitive gender*.

Pelatihan di tingkat masyarakat ditekankan pada aspek pengetahuan, ketrampilan dan sikap yang merupakan proses yang aksi refleksi untuk pembelajaran bersama. Sumberdaya manusia kreatif dan terampil akan lebih

mandiri untuk membuka peluang usaha serta tidak tergantung pada pihak lain. Bagi masyarakat pedesaan yang mayoritas petani dan buruh tani, usaha pertanian tidak terlalu menjanjikan karena ketidakseimbangan antara ratio output dan input produksi. Akhirnya kegiatan *off farm* lebih banyak dilakukan. Kadangkala masyarakat desa tidak siap dengan pilihan ini karena implikasinya sangat tergantung dengan input dan kualitas produksi serta pemasaran. Akhirnya banyak pihak yang harus mengambil peran baik masyarakat, pemerintah, swasta maupun LSM.

Kedua, aspek kelembagaan masyarakat. Kelembagaan masyarakat berkaitan dengan wadah yang digunakan untuk proses pemberdayaan masyarakat. Jargon mengenai pendekatan pemberdayaan masyarakat sebenarnya sudah lama didengungkan sejak dikenalnya perencanaan *bottom up* yang menekankan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaannya. Hanya konsepsi ini masih berbeda-beda sesuai dengan kepentingan para pelaku pembangunan. Prinsip pemberdayaan masyarakat adalah menempatkan masyarakat sebagai aktor utama dalam seluruh rangkaian pembangunan.

Pemberdayaan adalah sebagai proses. Keberhasilan proses ini bukan hanya karena faham terhadap pengetahuan dan ketrampilan menyangkut pemberdayaan dan pembangunan, akan tetapi seluruh *stakeholders* (seluruh unsur terkait dalam program) harus komitmen dengan beberapa hal antara lain seperti komitmen pada profesionalisme, komitmen pada keterbukaan, komitmen pada kejujuran, komitmen pada kebersamaan dan kerjasama, komitmen pada kemitraan, dan komitmen pada kepentingan pembelajaran dan mencari keuntungan bersama dalam bentuk pola horisontal.

Tenaga pemberdaya harus melebur dalam kesetaraan dan kemitraan bersama masyarakat. Kegagalan selama ini banyak diasumsikan karena prinsip-prinsip pemberdayaan (kode etik pemberdayaan) yang seharusnya dilakukan bersama (secara partisipatif) telah dilanggar, karena ada kepentingan-kepentingan tertentu dari segelintir orang di luar unsur masyarakat sasaran. Dampaknya menjadi lebih besar terutama untuk kepentingan pemberdayaan dan berkesinambungan. Tantangan proyek yang berorientasi kepada pemberdayaan, bukan hanya dituntut untuk mempertahankan profesionalisme bagi para

pelakunya, tetapi harus menjadi komitmen bersama dari seluruh unsur *stakeholders* yang terlibat dalam proyek.

Ketiga, aspek teknologi dan modal. Kebutuhan masyarakat desa akan teknologi yang sesuai dan modal untuk melakukan usaha sudah disampaikan pada berbagai pihak. Respon positif sudah ada baik dari pemerintah, lembaga keuangan, lembaga donor, swasta, maupun LSM. Kondisi kritisnya adalah bagaimana fasilitas tersebut dapat berkelanjutan di tingkat kelompok sasaran. Akhirnya pemberian fasilitas tersebut outputnya tidak hanya telah tersalurkannya bantuan di tingkat kelompok sasaran, melainkan sampai pada tingkat manfaatnya bagi kelompok sasaran. Sekali lagi, membutuhkan sentuhan pemberdayaan masyarakat yaitu berkaitan dengan siapa yang mengelola, bagaimana proses pengelolaannya, mekanisme, sampai pada perhitungan tingkat pengembalian investasi.

Teknologi tepat guna yang diberikan kepada masyarakat desa dilengkapi dengan proses sosialisasi, penggunaan yang tepat, perawatan apabila rusak agar tidak hilang begitu saja ketika proyek berakhir. Monitoring dan evaluasi juga tetap dilakukan untuk melihat perkembangan baik dari sisi output, manfaat dan dampaknya. *Trade off* dengan masuknya teknologi baru adalah munculnya pengangguran di pihak lain karena pengalihan proses dari orang ke mekanis. Penyiapan lapangan pekerjaan baru akhirnya ikut menjadi paket mengatasi pengangguran yang muncul.

1.2. Rumusan Permasalahan Penelitian

Masyarakat yang aktif dan kuat merupakan kunci menuju sebuah kualitas hidup yang lebih baik bagi setiap orang untuk memegang kontrol di dalam komunitas mereka. Bagi masyarakat, memegang kontrol adalah tentang bagaimana masyarakat mampu membuat keputusan bagi diri mereka sendiri mengenai sesuatu yang penting bagi mereka. Juga tentang orang yang secara bersama melakukan sesuatu yang memenuhi sebuah kebutuhan yang nyata di dalam masyarakat mereka dengan cara yang terbuka, inklusif dan demokratis.

Program *Participatory Integrated Development in Rainfed Areas* (PIDRA), khususnya sub program pengembangan masyarakat dan gender merupakan

program pemberdayaan masyarakat. Program tersebut bertujuan untuk meningkatkan pendapatan petani dan keluarganya, meningkatkan kegiatan konservasi dan pelestarian sumber daya alam serta lingkungan, terwujudnya sistem pertanian yang berkelanjutan dan usahatani kelompok dan partisipasi wanita untuk mewujudkan ketahanan pangan di pedesaan. Program PIDRA dilaksanakan pada tahun 2001-2008 yang terdiri dari 2 tahap yaitu tahap I pada tahun 2001-2004 dan tahap II pada tahun 2005-2008.

Kemandirian kelompok merupakan suatu kondisi dimana kelompok sudah mandiri. Kemandirian ini dapat dilihat pada kelompok dengan yang mempunyai karakteristik seperti memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi peningkatan kesejahteraan anggotanya, menyediakan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua anggota untuk memainkan peranan dan menjadi bagian dalam setiap pengambilan keputusan yang menyangkut kehidupan mereka, dalam setiap proses pembelajaran dan dalam setiap upaya meningkatkan pendapatan serta kesejahteraan hidup mereka, menyediakan kesempatan belajar bagi semua anggota untuk mengembangkan praktek demokrasi yang sehat, mampu membawa seluruh anggotanya keluar dari kemiskinan secara berkelanjutan.

Konsep gender adalah suatu sifat yang melekat baik pada pria maupun wanita yang dikonstruksi atau dibentuk secara sosial maupun kultural dengan akibat terjalannya hubungan sosial yang membedakan fungsi, peran dan tanggung jawab kedua jenis kelamin itu. Permasalahan umum yang diakibatkan karena kesenjangan gender atau ketimpangan gender seperti, terjadinya diskriminasi terhadap wanita dalam hal akses dan kontrol atas sumberdaya, kesempatan, status, hak, peran dan penghargaan. Namun hingga beberapa waktu belakangan ini, gambaran umum tentang kondisi objektif wanita masih dirasa tetap memprihatinkan.

Pertama, di bidang kesehatan, tenaga medis dan paramedis wanita lebih sedikit dibanding pria. Kedua, bidang pendidikan, angka partisipasi pendidikan dasar dan menengah pertama antara wanita dan pria tidak berbeda jauh, tetapi pada pendidikan tingkat menengah keatas dan pendidikan tinggi mulai tampak perbedaan, dimana pria lebih memperoleh kesempatan. Ketiga, dibidang ekonomi dan pekerjaan, partisipasi wanita hanya 43,5 % yang terkonsentrasi pada lapangan

pekerjaan segala sektor, sedangkan sisanya tidak memperoleh kesempatan memiliki pekerjaan. Keempat, struktur hukum yang terdapat dalam masyarakat belum mendukung terciptanya kesetaraan gender. Kelima, di bidang politik, keterlibatan wanita dalam proses pengambilan keputusan kebijakan publik masih rendah.

Tujuan pelaksanaan analisis gender adalah dalam rangka melihat perkembangan akhir pengarusutamaan gender dalam setiap faktor kehidupan, termasuk tingkat partisipasi, akses dan kontrol terhadap sumber daya dan proses pembangunan. Perkembangan analisis gender pasca program PIDRA tidak menunjukkan perubahan yang cukup signifikan, kondisi dilapangan masih sama dengan kondisi per akhir Desember 2008. Untuk mengurangi kesenjangan yang terjadi, strategi pengarusutamaan gender (PUG) diterapkan. Strategi ini bertujuan untuk mengakomodir perbedaan aspirasi, pengalaman, permasalahan dan kebutuhan pria maupun wanita sebagai penerima manfaat program PIDRA.

Pembelajaran penerima manfaat Program PIDRA telah memunculkan kader-kader pemimpin baru ditingkat penerima manfaat. Pembelajaran yang telah diterima oleh penerima manfaat, baik anggota kelompok wanita maupun pria, lewat keaktifan mereka dalam kelembagaan binaan program telah mendorong wanita untuk tampil di forum ditingkat desa. Sumber daya manusia hasil gemblengan PIDRA telah mulai dipercaya masyarakat untuk tampil mewakili RT, dusun, desa, bahkan sampai mencapai kecamatan. Walaupun tetap tidak bisa dipungkiri bahwa partisipasi kaum pria masih tetap lebih besar daripada wanita dalam hal penentuan kebijakan ditingkat desa.

Berdasarkan bahasan permasalahan yang telah dijabarkan diatas, maka tercipta beberapa pertanyaan penting yang mendasari penelitian, yaitu:

1. Bagaimana kondisi kemandirian kelompok dalam melakukan aktifitasnya dari masa awal program PIDRA berlangsung hingga selepas masa program?
2. Apakah kemandirian kelompok yang terbentuk telah sesuai dengan tujuan pelaksanaan program pembangunan masyarakat pedesaan berbasis gender?
3. Bagaimana kondisi kesetaraan gender antara pria dan wanita di kelompok dalam melaksanakan aktivitas-aktivitas kelompok pada program PIDRA?

4. Apakah program pemberdayaan ini telah berhasil dalam membangun masyarakat pedesaan berbasis gender?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Mengidentifikasi aktifitas pembentuk kemandirian Kelompok Mandiri Pria dan Wanita dalam program PIDRA.
2. Mendeskripsikan kemandirian Kelompok Mandiri Pria dan Wanita yang terbentuk dalam Program PIDRA.
3. Menganalisis kesesuaian kemandirian Kelompok Mandiri Pria dan Wanita yang terbentuk dengan tujuan pelaksanaan program pembangunan masyarakat pedesaan miskin berbasis gender.
4. Menganalisis kondisi kesetaraan aspek gender antara Kelompok Mandiri Pria dan Wanita pada Program PIDRA.
5. Menganalisis keberhasilan Program PIDRA terhadap pembangunan masyarakat pedesaan berbasis gender.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Diharapkan dapat digunakan sebagai masukan bagi pemerintah selaku pembuat kebijakan bidang pemberdayaan masyarakat, khususnya tentang kesetaraan gender dan keberdayaan pada kelompok afinitas Program PIDRA.
2. Diharapkan dapat digunakan sebagai bahan informasi dan pertimbangan bagi semua pihak yang berkepentingan sehubungan dengan kesetaraan gender dan keberdayaan pada kelompok afinitas Program PIDRA.
3. Diharapkan dapat digunakan sebagai bahan informasi bagi peneliti dan mahasiswa untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang pemberdayaan, kesetaraan gender dan keberdayaan kelompok afinitas Program PIDRA.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pemberdayaan Masyarakat Desa

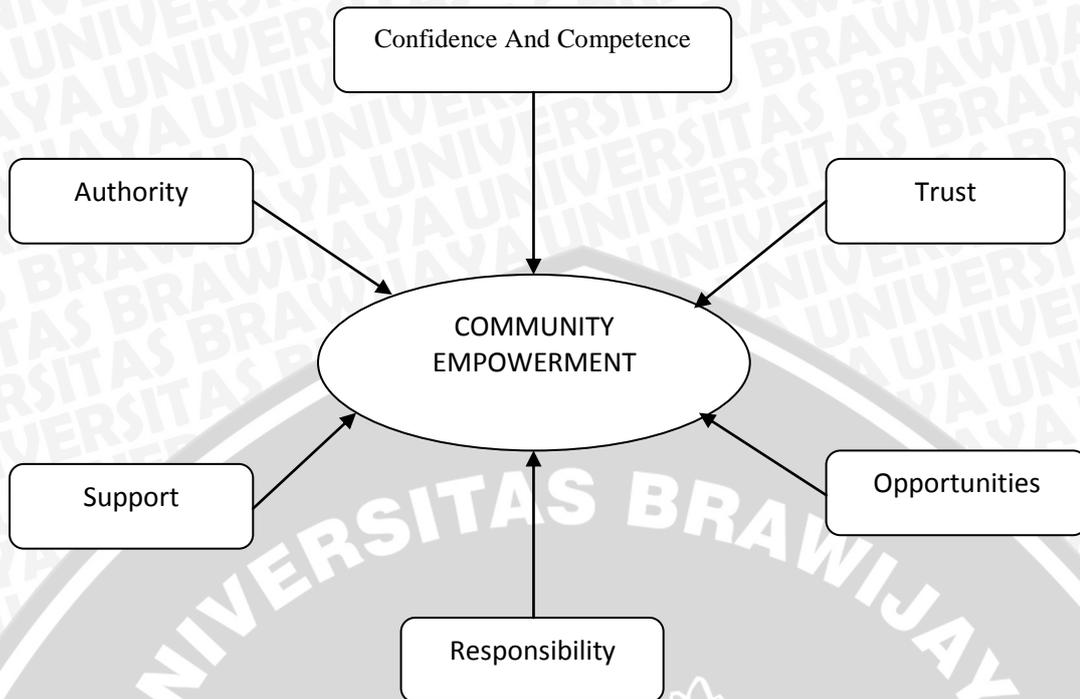
Pemberdayaan adalah terjemahan dari kata *empowerment*, yang berasal dari kata *empower* yang mengandung dua pengertian yakni *to give power to* (memberi kekuasaan, mengalihkan kekuatan atau mendelegasikan otoritas pada pihak lain), dan *to give ability to enable* (usaha untuk memberi kemampuan) (*Oxford English Dictionary*, 2003). Secara tersirat, makna tersebut menyatakan bahwa konsep pemberdayaan lahir sebagai antitesis terhadap model pembangunan dan model industri yang kurang memihak pada rakyat mayoritas.

Beberapa hal penting tentang pemberdayaan dijelaskan sebagai berikut : Pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan kekuasaan orang-orang yang lemah atau tidak beruntung (Ife, 1995). Pemberdayaan menunjuk pada usaha pengalokasian kembali kekuasaan melalui perubahan struktur sosial (Swift and Levin, 1987). Pemberdayaan adalah suatu cara dengan mana rakyat, organisasi, dan komunitas diarahkan agar mampu menguasai (atau berkuasa atas) kehidupannya (Rappaport, 1984). Pemberdayaan adalah sebuah proses dengan mana orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam, berbagi pengontrolan atas, dan mempengaruhi terhadap, kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupannya. Pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya (Parsons, *et al.*, 1994). Pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah, untuk memiliki akses terhadap sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan dan berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka.

Pemberdayaan masyarakat (*Community Empowerment*) merupakan perwujudan *capacity building* masyarakat yang bernuansa pada pemberdayaan sumberdaya manusia melalui pengembangan kelembagaan pembangunan mulai dari tingkat pusat sampai tingkat pedesaan seiring dengan pembangunan sistem

sosial ekonomi rakyat, prasarana dan sarana, serta pengembangan Tiga-P (Pendampingan yang dapat menggerakkan partisipasi total masyarakat, Penyuluhan dapat merespon dan memantau perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat, dan Pelayanan yang berfungsi sebagai unsur pengendali ketepatan distribusi aset sumberdaya fisik dan non fisik yang diperlukan masyarakat). Berdasarkan kaidah ekonomi, pemberdayaan masyarakat adalah proses perolehan pelaku ekonomi untuk mendapatkan surplus value sebagai hak manusia yang terlibat dalam kegiatan produksi. Upaya ini dilakukan melalui distribusi penguasaan faktor-faktor produksi melalui kebijakan politik ekonomi yang tepat dengan kondisi dan tingkatan sosial budaya (Hubeis, 2000).

Pemberdayaan masyarakat memiliki fokus terhadap upaya menolong anggota masyarakat yang memiliki kesamaan minat untuk bekerja sama, mengidentifikasi kebutuhan bersama dan kemudian melakukan kegiatan bersama untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Pemberdayaan masyarakat seringkali diimplementasikan dalam bentuk proyek-proyek pembangunan yang memungkinkan anggota masyarakat memperoleh dukungan dalam memenuhi kebutuhannya atau melalui kampanye yang memungkinkan kebutuhan-kebutuhan tersebut dapat dipenuhi oleh pihak-pihak lain yang bertanggungjawab. Cook dan Macaulay (1997) (dalam Sustiyonadi, 2002) lebih memandang masyarakat sebagai subyek yang dapat melakukan perubahan dengan cara membebaskan seseorang dari kendali kaku dan memberi orang tersebut kebebasan untuk bertanggungjawab terhadap ide-ide, keputusan-keputusan dan tindakan-tindakan. Pemberdayaan yang dimaksud oleh Cook dan Macaulay lebih mengarah pada pendelegasian secara sosial dan etika moral. Kerangka dasar pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dalam akronim “**ACTORS**” (Gambar 1) yang terdiri atas *Authority* (wewenang, dengan memberikan kepercayaan, *Confidence and competence* (memberi rasa percaya diri dan kompetensi), *Trust* (membangkitkan keyakinan), *Opportunities* (memberi peluang), *Responsibilities* (memberi tanggung jawab), serta *Support* (memberi dukungan).



Gambar 1. Kerangka dasar pemberdayaan masyarakat

Dengan demikian, pemberdayaan masyarakat merupakan metoda yang memungkinkan orang dapat meningkatkan kualitas hidupnya serta mampu memperbesar pengaruhnya terhadap proses yang mempengaruhi kehidupannya. Secara khusus pemberdayaan masyarakat berkenaan dengan upaya pemenuhan kebutuhan orang-orang yang tidak beruntung atau tertindas, baik yang disebabkan oleh kemiskinan maupun oleh deskriminasi berdasarkan kelas sosial, suku, gender, jenis kelamin, usia, dan kecacatan.

Beragam definisi pemberdayaan menjelaskan bahwa pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sebagai tujuan, maka pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial, yaitu masyarakat miskin yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya. Pengertian pemberdayaan

sebagai tujuan seringkali digunakan sebagai indikator keberhasilan pemberdayaan sebagai sebuah proses.

2.2. Pemberdayaan dalam Perspektif Kesetaraan Gender

Kesetaraan gender berarti kesamaan kondisi bagi pria dan wanita untuk memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam berbagai kegiatan seperti politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pendidikan dan keamanan nasional serta menikmati hasil pembangunan tersebut. Al-Qur'an sendiri sebagai pegangan umat Islam, di samping al-Hadits, menegaskan bahwa pria dan wanita memiliki kapasitas yang sama, baik kapasitas moral, spiritual, maupun intelektual. Dalam menyampaikan pesannya, Al-Qur'an seringkali menggunakan ungkapan "pria dan wanita beriman" sebagai bukti pengakuannya terhadap kesetaraan hak dan kewajiban mereka. Dalam hal kewajiban agama, pun Al-Qur'an tidak menunjukkan beban yang berbeda kepada keduanya. Prinsip kesetaraan tersebut dimaksudkan untuk membentuk hubungan yang harmonis antara keduanya (Ali Munhanif, 2002: xxvi).

Dalam peraturan perundang-undangan 1945, GBHN 1988 dan 1993 azas persamaan pria dan wanita tersirat dan tersurat bahwa wanita mempunyai hak dan kewajiban, serta kesempatan yang sama dengan pria dalam pembangunan di segala bidang. Disamping itu, pemerintah Indonesia telah menandatangani Konvensi Penghapusan segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) pada tahun 1980 di Kopenhagen. Sebagai tindak lanjut, pemerintah telah meratifikasi Konvensi ini dengan menetapkan Undang-undang No.7 tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Soeseno dan Sarwono, 1994). Pada tahun 1995, dalam Jakarta *Declaration for the Advancement of women in Asia and the Pacific* terdapat *Mission Statement Plan of Action* dimana dinyatakan tujuan untuk mencapai kedudukan setara (*equal status*) wanita sebagai peserta, pengambil keputusan, dan penikmat dalam kehidupan politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Selain itu, juga dinyatakan untuk memberdayakan (*empower*) wanita dan pria, perlu kerjasama sebagai mitra setara,

dan memberi inspirasi kepada suatu generasi baru kaum wanita dan pria untuk bekerjasama demi kesetaraan, pembangunan berkelanjutan dan perdamaian.

Pendekatan kebijakan yang berkaitan dengan kedudukan wanita dalam pembangunan (*Women in development/ WID*) antara lain dikaji oleh Moser (1993) yang mengemukakan lima pendekatan sebagai berikut: 1). Pendekatan kesejahteraan (*the welfare approach*), 2). Pendekatan keadilan (*the equity approach*), 3). Pendekatan pengentasan kemiskinan (*the anti-poverty approach*), 4). Pendekatan efisiensi (*the efficiency approach*), 5). Pendekatan pemberdayaan (*the empowerment approach*). Tiap pendekatan dievaluasi dalam konteks pemenuhan praktis gender (*practical gender needs*) dan kebutuhan strategi gender (*strategic gender needs*). Pendekatan kelima, yaitu pendekatan pemberdayaan menekankan pada fakta bahwa wanita mengalami penekanan (*oppression*) yang membedakan menurut bangsa, kelas sosial, sejarah penjajahan kolonial, dan kedudukannya dalam orde ekonomi internasional pada masa kini. Dengan demikian wanita tetap harus menantang struktur dan situasi yang menekannya secara bersamaan pada tingkatan yang berbeda. Pendekatan ini juga menekankan pentingnya bagi wanita untuk meningkatkan keberdayaannya dan mengartikan pemberdayaan bukan dalam konteks mendominasi orang lain dengan makna apa yang diperoleh wanita akan merupakan kehilangan bagi lelaki, melainkan menempatkan pemberdayaan dalam arti kecakapan atau kemampuan wanita untuk meningkatkan kemandirian (*self-reliance*) dan kekuatan dalam dirinya (*internal strength*), yang dikenal sebagai “*the right to determine choices in life and to influence the direction of change, through the ability to gain control over crucial material and non-material resources.*” (Seitz, 1995).

Konsep gender berkembang sejak tahun 1970-an karena dalam kalangan yang berkecimpung dengan masalah kaum wanita, terdapat ketidakpuasan dengan konsep Wanita dalam Pembangunan (*Women in Development* atau WID), yang pada dasarnya melihat kaum wanita terpisah dari kaum pria. Pendekatan Wanita dalam Pembangunan (WID) menekankan persamaan hak dan akses untuk wanita dan pria, tetapi ternyata pendekatan ini tidak berhasil mencapai keadilan gender dan dunia advokasi. Pendekatan WID kurang memperhatikan hakikat hubungan sosial yang mendasari sub-ordinasi kaum wanita. Dengan demikian, perlu untuk

membuat perbedaan antara jenis kelamin yang bersifat biologi, dan jender yang bersifat sosial (Tan, 1995).

Konsep jenis kelamin atau seks, melihat perbedaan antara wanita dan pria semata-mata dari segi biologis. Pria rata-rata tinggi, berotot, dan berambut di tubuh dan mukanya (kumis, jenggot). Sedangkan wanita memiliki pinggul yang lebih lebar daripada pria, tidak berbahu lebar, mempunyai buah dada, dan tubuhnya lebih berlemak (Levin, 1994). Jenis kelamin secara permanen tidak berubah dan merupakan ketentuan biologis atau sebagai ketentuan kodrat. Berdasarkan hasil penelitian pengetahuan tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Soeseno dan Sarwono, 1995), sebagian besar responden berpendapat kondisi biologis, kodrat dan jenis kelamin wanita, disamping martabat dan harkat wanita sebagai sumber penyebab terjadinya perlakuan dan praktek-praktek yang bersifat diskriminatif.

Sedangkan konsep gender muncul dan berkembang karena adanya ketidakpuasan dengan konsep jenis kelamin atau seks yang hanya menggambarkan pria dan wanita semata-mata dari segi biologis. Dengan meningkatnya kesadaran bahwa peran wanita perlu dilihat dalam konteks masyarakat, dan dalam hubungan dengan kaum pria, para perencana dan praktisi mengemukakan pendekatan gender dan pembangunan (*Gender and Development* atau GAD) sebagai konsep, strategi, dan perencana yang lebih tepat. Konsep gender merupakan konsep sosial budaya yang digunakan untuk menggambarkan peran, fungsi, dan perilaku pria dan wanita dalam suatu masyarakat. Konsep ini merujuk kepada pemahaman bahwa identitas, peran, fungsi, pola perilaku, kegiatan dan persepsi baik tentang wanita maupun pria ditentukan oleh masyarakat dan kebudayaan dimana mereka dilahirkan dan dibesarkan. Dengan demikian, penggambaran wanita dan pria berakar dalam kebudayaan, dan bukan berdasarkan aspek biologis saja (tan, 1995^a). Melalui proses sosialisasi, yang dimulai dari keluarga, konsep-konsep tentang apa yang patut dilakukan seorang wanita (feminitas) dan seorang pria (maskulinitas) diserap sejak masa kecil (Van Bemmelen, 1993). Konsep gender menggambarkan sifat-sifat yang melekat pada wanita dan pria yang dikonstruksi secara sosial dan kultural. Pertukaran antara sifat wanita dan lelaki dapat berubah dan berbeda menurut waktu, tempat dan

kelas sosial. Dengan menggunakan pedoman bahwa setiap sifat yang melekat pada jenis kelamin tertentu dan sepanjang sifat-sifat tersebut bisa ditukarkan, maka sifat tersebut adalah hasil konstruksi masyarakat, dan bukan merupakan kodrat (Fakih, 1995).

Perbedaan gender sebenarnya tidak menjadi masalah sejauh tidak menyebabkan ketidak-adilan bagi wanita dan pria. Akan tetapi, dalam kenyataan perbedaan gender telah menciptakan ketidak-adilan bagi pria dan terutama wanita. Ketidak-adilan gender merupakan sistem dan struktur dimana baik kaum wanita maupun pria menjadi korban dari sistem tersebut. Ketidak-adilan gender termanifestasi dalam berbagai bentuk ketidak-adilan, seperti marginalisasi, proses pemiskinan ekonomi, sub-ordinasi atau anggapan tidak perlu berpartisipasi dalam pembuatan atau pengambilan keputusan politik, stereotipe, diskriminasi, dan kekerasan.

2.3. Tinjauan Tentang Proyek Pengembangan Partisipasi Lahan Kering Terpadu (PIDRA)

Program PIDRA (*Participatory Integrated Development in Rainfed Areas*) atau program pembangunan terpadu secara partisipatif di lahan kering merupakan program pemerintah Indonesia yang sebagian dibiayai oleh dana pinjaman dari IFAD sebesar SDR 17.5 juta (setara dengan sekitar USD 23.5 juta), berdasarkan *loan agreement* antara Pemerintah Indonesia dengan IFAD melalui LA No. 539-ID (20 Juni 2000). Pinjaman IFAD tersebut, untuk pelaksanaan program PIDRA mulai efektif per tanggal 31 Januari 2001. Program PIDRA dirancang dengan mekanisme pinjaman lunak yang fleksibel (*flexible lending mechanism*) dan dilaksanakan selama delapan tahun yang dibagi dalam dua fase, yaitu Fase I Tahun 2001 hingga 2004 dan Fase II Tahun 2005 hingga 2008. Program PIDRA selesai pada tanggal 31 Maret 2009 dan ditutup pada tanggal 30 September 2009. Pada tanggal 26 April 2001, Badan Eksekutif IFAD menyetujui program PIDRA sebagai salah satu dari 15 proyek perintis yang disupervisi langsung (*Direct Supervision*) oleh IFAD.

Program PIDRA dilaksanakan di wilayah lahan kering yang secara topografis berbukit-bukit terjal dan curam, kondisi lahan yang marjinal serta memiliki keterbatasan akses transportasi (jalan) dan terhadap air bersih yang

memberikan resiko buruk terhadap kualitas kesehatan masyarakat. Masyarakat dikategorikan sebagai penduduk miskin, terutama karena keterbatasan akan sumber mata pencaharian dan rendahnya tingkat kesejahteraan. Sebagian besar masyarakat bermatapencaharian sebagai petani penggarap dengan pendapatan per capita di bawah US \$ 76 per tahun atau di bawah Rp.800.000 per tahun, dengan asupan kalori di bawah standard atau di bawah 2.000 kilo kalori per harinya, kualitas bangunan rumah dan kondisi kesehatan anggota keluarganya yang amat buruk dan rentan, jauh di bawah standard kehidupan yang layak. Sebagian masyarakat juga mempunyai kepala keluarga wanita (janda).

Lokasi dan masyarakat sasaran program PIDRA ditentukan berdasarkan kriteria seleksi desa dan KK miskin, dengan memperhatikan kondisi sumber daya setempat dan kebijakan pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat miskin. Perubahan-perubahan kegiatan masyarakat dilakukan dengan cara menggali potensi sumber daya manusia dan sumber daya alam berdasarkan kebutuhan untuk peningkatan pendapatan melalui kegiatan usaha mikro, serta peningkatan manfaat sumber daya alam agar lebih produktif dan memberikan nilai tambah bagi masyarakat miskin.

Selama program berlangsung, telah diperoleh perubahan-perubahan yang cukup signifikan dalam proses membangun kelembagaan masyarakat menuju kemandirian, walaupun pencapaian antar provinsi berbeda, karena latar belakang kondisi fisik geografis, sosial, budaya dan ekonomi yang beragam. Dengan pertumbuhan dan perkembangan aktifitas individu dan kelompok dalam mengakses usaha, permodalan dan kemampuan bernegosiasi, pada akhir tahun ke empat mulai berkembang aktifitas masyarakat yang mengarah kepada perbaikan taraf hidup. Aktivitas tersebut membuka jalan bagi pelaku usaha baru dengan memanfaatkan potensi sumberdaya yang ada. Prestasi yang dicapai masyarakat tersebut mengindikasikan kebutuhan dukungan perubahan desain program yang lebih terarah pada peningkatan taraf hidup yang didukung kelembagaan yang kuat. Sehingga pada *Mid Term Review* (MTR) tahun 2004-2005 telah dilakukan redesain Fase II (2005-2008) untuk pemantapan program dengan fokus kegiatan: Komponen I Pengembangan Taraf-Hidup secara Berkelanjutan, termasuk (a) Pemberdayaan Masyarakat dan Kesetaraan Gender, (b) Pengembangan Usaha-Mikro Pedesaan,

dan (c) Pengelolaan Sumberdaya Alam Berbasis Masyarakat; Komponen II Pembangunan Prasarana Desa; dan Komponen III Penguatan Kelembagaan dan Manajemen Program.

Tujuan utama Program PIDRA adalah untuk meningkatkan pendapatan yang berkelanjutan dan perbaikan kesejahteraan penduduk miskin di pedesaan di wilayah lahan kering dan wilayah-wilayah miskin lainnya di Provinsi Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Program PIDRA juga bertujuan untuk menciptakan kondisi yang mendukung peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan sosial serta sumber daya alam yang membuka berbagai pilihan berkembangnya sumber mata pencaharian bagi penduduk miskin yang tinggal di lahan kering. Sasaran program meliputi 14 Kabupaten. Di Provinsi Jawa Timur terdapat enam kabupaten, yaitu Pacitan, Ponorogo, Trenggalek, Tulungagung, Blitar dan Lumajang. Di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) terdapat tiga kabupaten yaitu Sumbawa, Dompu dan Bima. Di NTT terdapat lima kabupaten yaitu Timor Tengah Utara (TTU), Timor Tengah Selatan (TTS) di Pulau Timor, Sumba Barat dan Sumba Timur di Pulau Sumba serta Alor.

Di Jawa Timur, proyek PIDRA dititik beratkan pada peningkatan kesejahteraan dan ketahanan pangan 19.800 keluarga miskin yang tergabung dalam kelompok afinitas mandiri (Sekretariat PIDRA Provinsi Banten, 2004). Peningkatan kesejahteraan dan ketahanan pangan keluarga miskin ini meliputi kenaikan pendapatan, kesehatan, gizi, dan status sosial lainnya. Proyek PIDRA di provinsi Jawa Timur memiliki misi utama yang dituangkan dalam kegiatan-kegiatan seperti: (1) peningkatan kesejahteraan, kesetaraan gender, pengembangan usaha skala mikro, serta pengelolaan sumberdaya alam berbasis pengetahuan lokal; (2) pembangunan infrastruktur desa; (3) peningkatan kapasitas kelembagaan dan manajemen organisasi (Sekretariat PIDRA Provinsi Banten, 2007).

Seperti disebutkan sebelumnya, target proyek ini adalah anggota kelompok-kelompok terorganisir yang terbentuk selama kurun waktu 3 tahun dan terdiri dari lima Kelompok Afinitas Mandiri Pria (KMP) dan 5 Kelompok Afinitas Mandiri Wanita (KMW). Pemilihan lokasi pelaksanaan program berdasarkan kondisi

topografi dan geografi, infrastruktur fisik desa, tingkat kesuburan lahan, pasokan air bersih dan transportasi, jumlah wanita yang menjadi kepala rumah tangga.

Sementara itu, identifikasi target peserta penerima program dilakukan bersama dengan pemerintah daerah, pengurus desa, dan tim PIDRA. Setiap desa memiliki standar kemiskinan yang berbeda, namun secara umum, target peserta di Jawa Timur harus memenuhi kriteria seperti: (a) rendahnya tingkat pendidikan; (b) suplai air cukup bersih; (c) rendahnya tingkat kesehatan dan kelayakan rumah; (d) rendahnya tingkat pendidikan anak; (e) kurang/tidak tersedianya listrik; (f) rendahnya tingkat konsumsi per hari; dan (g) rendahnya tingkat pendapatan keluarga. Partisipasi dari target peserta diperoleh secara sukarela tanpa paksaan apapun dari pemerintah atau LSM.

Program PIDRA ini dimulai dengan membentuk kelompok afinitas (kelompok senasib) masyarakat miskin dengan penggolongan gender, dan kegiatan program yang berorientasi kesetaraan partisipasi. Pada tahap pertama proyek ini, telah terbukti berhasil dalam mengembangkan 910 KM dengan 18.206 keluarga miskin anggotanya, mengurangi 7,54% dari 965.500 orang miskin di Jawa Timur. Dengan demikian, dalam tahap kedua, program PIDRA semakin memperkuat KM melalui peningkatan kapasitas masyarakat, khususnya dalam hal mengembangkan alternatif sumber penghasilan selain dari aspek pertanian, seperti usaha mikro dan usaha kecil.

2.3.1. Pengarusutamaan gender

Pengarusutamaan gender adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan. Integrasi gender tersebut dilihat melalui kegiatan analisis gender, sehingga tujuan dari pelaksanaan analisis gender adalah dalam rangka melihat perkembangan akhir pengarusutamaan gender dalam setiap faktor kehidupan, termasuk tingkat partisipasi, akses dan kontrol terhadap sumber daya dan proses pembangunan. Perkembangan analisis gender pasca program PIDRA tidak menunjukkan perubahan yang cukup signifikan, kondisi dilapangan masih sama dengan kondisi per akhir Desember 2008. Untuk mengurangi kesenjangan yang terjadi, strategi pengarusutamaan gender (PUG) diterapkan. Strategi ini

bertujuan untuk mengakomodir perbedaan aspirasi, pengalaman, permasalahan dan kebutuhan pria maupun wanita sebagai penerima manfaat program PIDRA.

Pemberdayaan dengan metode partisipatif terbukti mampu menumbuhkan kepercayaan diri anggota masyarakat untuk mengemukakan pendapat, gagasan yang menjadi kebutuhan mereka sehingga mereka memiliki ikatan kelembagaan yang kuat dengan mempunyai kepentingan bersama, saling pengertian dan saling percaya, rasa memiliki dalam mencapai tujuan bersama. Dengan tumbuhnya ikatan tersebut telah mendorong inisiatif untuk mengoptimalkan potensi sumberdaya manusia dan alam dalam memberikan nilai tambah dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat. Program PIDRA telah membuka akses penerima manfaat baik pria maupun wanita untuk masuk kekelembagaan tingkat desa.

Pembelajaran penerima manfaat Program PIDRA telah memunculkan kader-kader pemimpin baru ditingkat penerima manfaat. Pembelajaran yang telah diterima oleh penerima manfaat wanita lewat keaktifan mereka dalam kelembagaan binaan program telah mendorong wanita untuk tampil di forum ditingkat desa. Sumber daya manusia hasil gemblengan PIDRA telah mulai dipercaya masyarakat untuk tampil mewakili RT, dusun, desa, bahkan sampai mencapai kecamatan. Walaupun tetap tidak bisa dipungkiri bahwa partisipasi kaum pria masih tetap lebih besar daripada wanita dalam hal penentuan kebijakan ditingkat desa.

Kesenjangan akses pria dan wanita dalam kepengurusan di LPD, lebih disebabkan karena stereotype pria yaitu kaum yang lebih kompeten dalam melakukan kegiatan yang berhubungan dengan pembangunan fisik. Walaupun wanita dilibatkan, maka mereka cenderung dilibatkan sebagai penyedia konsumsi. Dominasi pria di LPD berdampak pada kontrol terhadap lembaga LPD. Minimnya peran wanita menyebabkan mereka mengalami kekurangan informasi tentang kegiatan LPD. Dengan kata lain kaum wanita kurang mempunyai suara dalam pengambilan keputusan di rapat-rapat LPD dan bahkan cenderung menyerahkan keputusan kepada pria terutama tokoh masyarakat dan perangkat desa.

2.3.2. Pelaksanaan program yang berspektif gender

1. Pembagian kerja dalam rumah tangga

Pelatihan kesadaran gender yang telah diberikan oleh pengelola program PIDRA pada penerima manfaat telah mampu mengurangi ketimpangan dalam pelaksanaan kegiatan rumah tangga. Saat ini, penerima manfaat Program PIDRA khususnya kaum pria tidak lagi berkeberatan ketika harus membantu istrinya dalam melakukan kegiatan rumah tangga.

2. Peran penerima manfaat dalam kelembagaan ditingkat desa

Program PIDRA di hampir semua daerah binaannya telah mampu memunculkan kader pemimpin di tingkat desa. Masyarakat saat ini memandang bahwa penerima manfaat PIDRA telah memiliki kemampuan untuk berbicara di muka umum dan bahkan mampu memotivasi masyarakat lain untuk dapat melakukan kegiatan lebih positif.

3. Kebijakan Pemerintah yang berperspektif gender

Pelaksanaan Program PIDRA telah mendapat perhatian khusus dari Pemerintah Daerah. Saat ini beberapa Pemerintah Daerah binaan Program PIDRA baik ditingkat propinsi maupun kabupaten mengapresiasi keberhasilan program PIDRA melalui dukungan pada proses pemberdayaan masyarakat dan pengembangan usaha dengan mengalokasikan APBD kabupaten untuk melanjutkan kegiatan pembinaan dan pendampingan masyarakat di wilayah sasaran program PIDRA.

2.4. Gender dan Kodrat

Dalam memahami konsep gender harus dibedakan terlebih dahulu antara kata gender dan kata seks (jenis kelamin). Pengertian jenis kelamin merupakan penafsiran atau pembagian dua jenis kelamin manusia yang ditentukan secara biologis yang melekat pada jenis kelamin tertentu. Misalnya, pria adalah manusia yang memiliki alat reproduksi pria dan memproduksi sperma. Sementara wanita memiliki alat reproduksi wanita untuk memproduksi telur dan mempunyai alat untuk menyusui. Alat-alat ini secara biologis atau sering disebut sebagai

ketentuan Tuhan atau "kodrat". Sedangkan konsep gender yaitu suatu sifat yang melekat pada kaum pria maupun wanita yang direkonstruksi secara sosial maupun kultural. (M. Fakhri, 1996). Dengan kata lain gender adalah konstruksi sosial yang mengatur pembagian peran sosial menurut jenis kelamin (L. Margiyani, 1998).

2.5. Peran Gender

Peran gender didefinisikan sebagai peran yang berkaitan dengan sifat maskulinitas dan feminitas yang melekat pada pria dan wanita serta dikonstruksi secara sosial maupun kultural. Peran gender sangat bervariasi dalam kehidupan bermasyarakat pada tiap negara. Dalam budaya yang patriarkhis sering menimbulkan ketidakadilan gender, yang cenderung merugikan kaum wanita. Ketidakadilan gender dapat terwujud dalam hal-hal berikut (Setiawati, 2002): (a) Marginalisasi (peminggiran kaum wanita); (b) Kaum wanita dianggap sebagai warga masyarakat kelas dua dan kaum wanita sendiri cenderung enggan menjadi nomor satu, karena takut dijauhi kaum pria (*cinderella complex*) sehingga lebih memilih menjadi sub ordinat; (c) Stereotipe, yakni masyarakat mempunyai norma tertentu tentang wanita ideal yaitu feminim, sementara pria adalah maskulin. Dalam kenyataannya setiap orang memiliki dua karakteristik sekaligus (androgini), yaitu feminin sekaligus maskulin. Dalam kehidupan sebagai suatu stereotipe, wanita diharapkan menjadi figur yang feminin seperti lembut, patuh, taat, cantik, cermat dll. Sementara itu, pria diharapkan menjadi figur yang maskulin seperti gagah, perkasa, kuat dan cerdas; (d) Beban ganda. Pembagian kerja dunia domestik untuk wanita dan pria di sektor publik, sehingga ketika wanita memasuki dunia publik ada beban ganda yang disandangnya. Beban ganda sebagian besar dijalani kaum wanita yang mestinya pria harus menyanggah predikat tersebut karena pekerjaan domestik bukanlah kodrat wanita.

2.6. Tinjauan Tentang Penelitian Kualitatif Berspektif Gender

Dalam ilmu sosial umum karena akibat kritik terhadap positivisme, metode kualitatif menjadi lebih populer sebagai cara untuk menganalisis realita sosial secara lebih dalam. Alasannya data kualitatif dapat dianalisis dengan konsep yang diambil dari lapangan, bukan dari penelitian. Pengumpulan data dalam metode kualitatif, seperti wawancara terbuka dan observasi partisipatif mempunyai

kemampuan untuk mempelajari proses, membuka dan mengerti apa yang terjadi di belakang setiap fenomena yang aru sedikit diketahui (strauss & Corbin, 1990). Hal ini sangat penting bagi studi wanita, karena wanita dalam dunia kehidupan, perasaan, dan pikiran mereka sejak lama diabaikan dalam ilmu-ilmu sosial atau pengalaman merekadianggap sama, seperti pengalaman lelaki. Kurangnya dokumentasi mengenai wanita seringkali hanya dapat diganti dengan menggunakan metode sejarah secara lisan (*oral history*).

Pada penelitian kualitatif, peneliti mempunyai lebih banyak keleluasaan dalam menyusun proses penelitian dan menganalisis catatan lapangan. Selama materi penelitian empiris yang diperoleh dari wawancara, observasi, surat, deskripsi foto dan bahan-bahan teks lain dapat mendukung argumentasi peneliti, penelitian ini sah. Penelitian kualitatif memungkinkan adanya kedekatan emosional karena kepribadian peneliti tidak dibuat netral, tetapi kepribadian peneliti diangkat ke permukaan sebagai cara untuk menarik informasi. Menggunakan metode kualitatif bukan berarti menghilangkan metode kuantitatif seutuhnya, hal ini tergantung pada pertanyaan penelitian, apa yang ingin diketahui, untuk memutuskan metode mana yang akan digunakan.

2.6.1. Observasi partisipatif

Observasi partisipatif sebagai suatu metode penelitian berarti berada di tengah orang lain secara terus menerus dan memiliki status nominal sebagai seseorang yang merupakan bagian dari kehidupan mereka sehari-hari (Schwartz & Jacob, 1979).

2.7. Tinjauan Tentang Pembagian Peran Berdasarkan Gender

Di daerah pedesaan, dimana mayoritas penduduknya adalah petani yang tergolong kecil (petani gurem), ekonomi rumah tangga yang ada di dalamnya tidak dapat dilepaskan begitu saja dari peran wanita. Wanita mempunyai peran yang luas, tidak hanya di dalam rumah tangga, namun juga di luar rumah tangga. Sebagai anggota sebuah keluarga, wanita mempunyai peran di dalamnya seperti anggota yang lain, dimana perbedaan peran antar anggota keluarga tersebut didasarkan atas berbagai pertimbangan seperti perbedaan umur, perbedaan jenis kelamin, perbedaan generasi, perbedaan posisi ekonomi, ataupun pembagian kekuasaan (Sajogyo, 1983). Pembagian peran berdasarkan gender pada dasarnya

dibagi menjadi tiga, yaitu peran pada aspek aktivitas (profil kegiatan), peran pada aspek akses terhadap informasi (profil akses), dan peran terhadap aspek kontrol.

1. Aspek aktivitas

Aspek aktivitas memperlihatkan peranan seseorang dalam melakukan suatu aktivitas. Peranan adalah keikutsertaan atau partisipasi seseorang atau kelompok dalam suatu kegiatan atau dalam pengambilan keputusan. Aspek aktivitas ini didasarkan pada konsep pembagian dengan data terpilah jenis kelamin. Untuk memudahkan analisis, maka secara umum profil kegiatan dikelompokkan menjadi kegiatan produktif, kegiatan reproduktif, sosial budaya dan kemasyarakatan. Proses mengidentifikasi gender melalui aspek ini, merupakan suatu teknik untuk melalui secara tepat peranan, kegiatan sekaligus kebutuhan pria dan wanita dalam satu unit keluarga dan masyarakat.

2. Aspek akses

Akses adalah peluang atau kesempatan dalam memperoleh dan menggunakan sumberdaya tertentu. Merinci sumber-sumber apa yang dikuasai oleh pria dan wanita untuk melaksanakan kegiatannya. Akses ini memperlihatkan siapa yang memiliki akses kepada sumberdaya dan memiliki kontrol atas penggunaannya. Selanjutnya diidentifikasi, disusun dalam daftar apakah wanita dan pria mempunyai akses atau tidak kepada sumberdaya atas penggunaannya.

3. Aspek kontrol

Kontrol adalah penguasaan atau wewenang atau kekuasaan untuk mengambil keputusan. Merinci sumber-sumber apa yang dikuasai oleh pria atau wanita untuk melaksanakan kegiatannya dan manfaat apa yang diperoleh setiap orang dari hasil kegiatan tersebut. Aspek ini memperlihatkan siapa yang memiliki akses kepada sumberdaya dan kontrol atas penggunaannya. Selanjutnya diidentifikasi, disusun dalam daftar apakah wanita dan pria mempunyai akses atau tidak kepada sumberdaya atas penggunaannya.

2.8. Tinjauan Tentang Analisis Gender

Analisis gender adalah proses menganalisis data dan informasi secara sistematis tentang pria dan wanita untuk mengidentifikasi dan mengungkapkan kedudukan, fungsi, peran dan tanggungjawab pria dan wanita, serta faktor-faktor yang mempengaruhi. Analisis gender merupakan langkah awal dalam rangka

penyusunan kebijakan program dan kegiatan yang responsif gender. Untuk analisis gender diperlukan data gender, yaitu data kuantitatif maupun kualitatif yang sudah terpilah antara pria dan wanita. Data gender ini kemudian disusun menjadi indikator gender.

Analisis Model Harvard yang dikembangkan oleh Harvard Institute for International Development ini didasarkan pada pendekatan efisiensi *women in developmen* (WID) yang merupakan kerangka analisis gender dan perencanaan gender yang paling awal. Tujuan kerangka Harvard ini antara lain untuk menunjukkan bahwa ada suatu investasi secara ekonomi yang dilakukan kaum wanita maupun pria secara rasional, untuk membantu para perencana merancang proyek yang lebih efisien dan memperbaiki produktivitas kerja secara menyeluruh, mencari informasi yang lebih rinci sebagai dasar untuk mencapai tujuan efisiensi dengan tingkat keadilan gender yang optimal, untuk memetakan pekerjaan pria dan wanita dalam masyarakat dan melihat faktor penyebab perbedaan. Tujuan kerangka Harvard ini antara lain untuk menunjukkan bahwa ada suatu investasi secara ekonomi yang dilakukan kaum wanita maupun pria secara rasional, membantu para perencana merancang proyek yang lebih efisien dan memperbaiki produktivitas kerja secara menyeluruh, mencari informasi yang lebih rinci sebagai dasar untuk mencapai tujuan efisiensi dengan tingkat keadilan gender yang optimal, memetakan pekerjaan pria dan wanita dalam masyarakat dan melihat faktor penyebab perbedaan.

Kerangka Harvard terdiri atas sebuah matriks yang mengumpulkan data pada tingkat mikro (masyarakat dan rumah tangga) meliputi tiga komponen yang berhubungan satu dengan lainnya. Pertama, profil kegiatan, didasarkan pada konsep pembagian dengan data terpilah jenis kelamin. Profil kegiatan ini merinci kegiatan nyata menurut umur (siapa mengerjakan apa), penjadwalan (alokasi waktu) untuk kelompok-kelompok sosial ekonomi. Secara umum, profil kegiatan dikelompokkan menjadi kegiatan produktif, reproduktif, sosial budaya dan kemasyarakatan.

Kedua, profil akses dan kontrol, merinci sumber-sumber apa yang dikuasai pria dan wanita untuk melaksanakan kegiatannya dan manfaat apa yang diperoleh setiap orang dari hasil kegiatan tersebut. Profil ini memperlihatkan siapa yang

memiliki akses kepada sumberdaya dan kontrol atas penggunaannya, selanjutnya diidentifikasi, disusun dalam daftar apakah wanita dan pria mempunyai akses atau tidak kepada sumberdaya dan kontrol atas penggunaannya.

Ketiga, analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan, akses dan kontrol dan berpusat pada faktor-faktor dasar, yang menentukan pembagian kerja berdasarkan gender. Analisis disini dilakukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan antara pria dan wanita. Karena pekerjaan yang dilakukan pria dan wanita berubah dari waktu ke waktu sebagai akibat dari proses pembangunan atau perubahan lingkungan, maka pengertian tentang kecenderungan pertumbuhan ekonomi dan perkembangan sosial budaya harus turut diperhitungkan dalam analisis.



III. KERANGKA PEMIKIRAN

3.1. Kerangka Berpikir

Masyarakat yang aktif dan kuat merupakan kunci menuju sebuah kualitas hidup yang lebih baik bagi setiap orang untuk memegang kontrol di dalam komunitas mereka yang biasa disebut sebagai keberdayaan. Bagi masyarakat, memegang kontrol adalah tentang bagaimana masyarakat mampu membuat keputusan bagi diri mereka sendiri mengenai sesuatu yang penting bagi mereka. Juga tentang orang yang secara bersama melakukan sesuatu yang memenuhi sebuah kebutuhan yang nyata di dalam masyarakat mereka dengan cara yang terbuka, inklusif dan demokratis.

Keberdayaan masyarakat merupakan suatu masalah tersendiri yang berkaitan dengan hakikat dari *power* (daya), serta hubungan antar individu atau lapisan sosial yang lain. Pada dasarnya, setiap individu dilahirkan dengan daya. Hanya saja kadar daya itu akan berbeda antar satu individu dengan individu yang lain. Kondisi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor-faktor yang saling terkait (*interlinking factors*) antara lain seperti: pengetahuan, kemampuan, status, harta, kedudukan dan jenis kelamin. Faktor-faktor yang saling terkait tersebut pada akhirnya membuat hubungan antar individu dengan dikotomi subyek (penguasa) dan obyek (yang dikuasai) yang meliputi kaya miskin, pria-wanita, guru-murid, pemerintah-warganya, antar agen pembangunan dengan si miskin, dan lain sebagainya.

Program *Participatory Integrated Development in Rainfed Areas* (PIDRA), khususnya sub program pengembangan masyarakat dan gender merupakan program pemberdayaan masyarakat. Program tersebut bertujuan untuk meningkatkan peran masyarakat petani pedesaan dalam mengentaskan kemiskina, meningkatkan kegiatan konservasi dan pelestarian sumber daya alam serta lingkungan, mewujudkan sistem pertanian dan usahatani kelompok yang berkelanjutan serta meningkatkan partisipasi wanita dalam mewujudkan ketahanan pangan di pedesaan. Program PIDRA dilaksanakan pada tahun 2001-2009 yang terdiri dari 2 fase yaitu fase pengenalan (2001-2003), fase pelaksanaan (2004-2009). Diawali dengan kegiatan pemberdayaan berbasis gender, maka

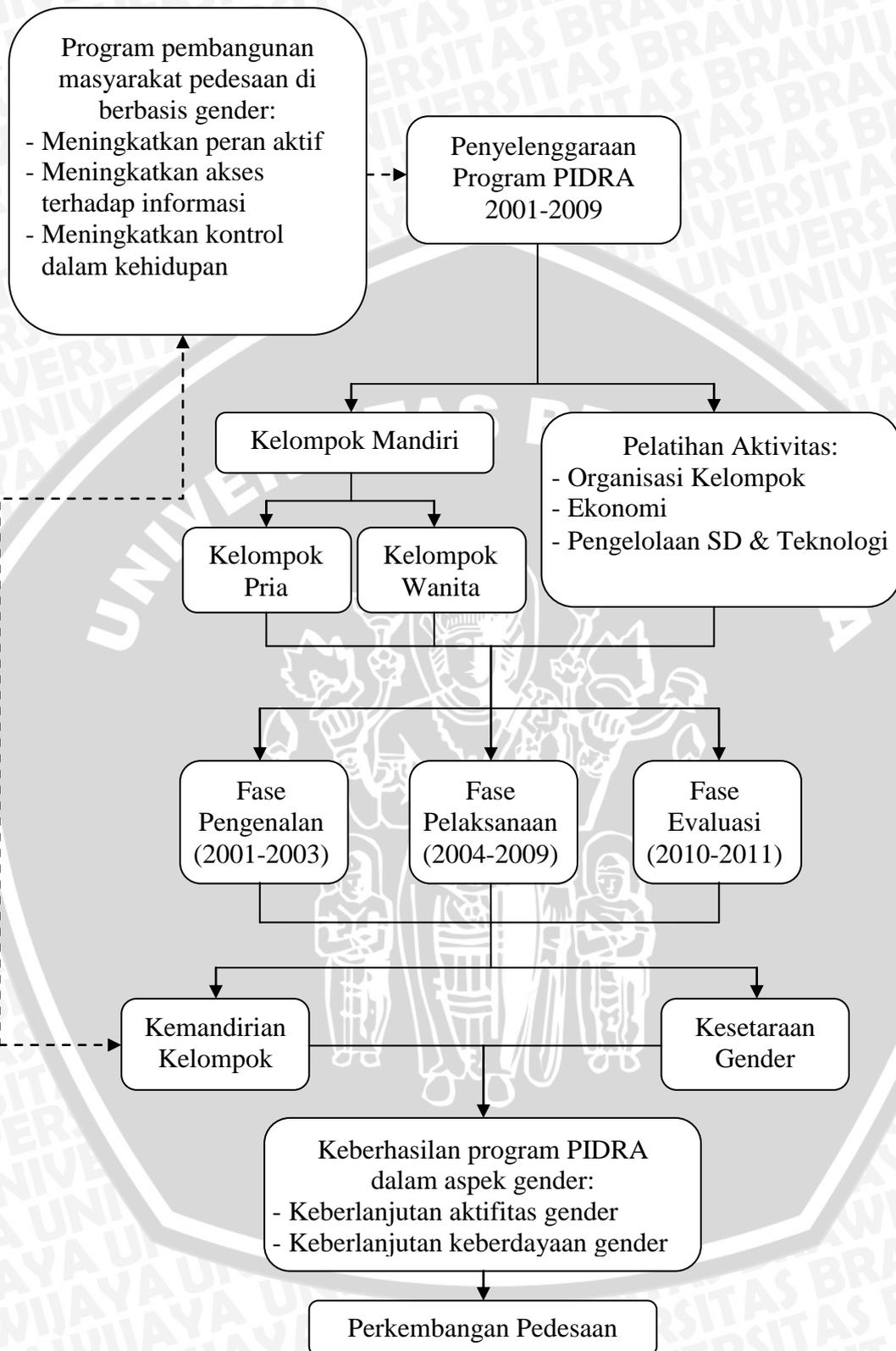
dibentuk dua jenis Kelompok Mandiri, yakni Kelompok Mandiri Pria dan Wanita, dengan perlakuan pemberdayaan yang sama, yakni pelatihan dan pelaksanaan aktivitas rutin dalam 3 aspek kegiatan seperti organisasi kelompok, pengelolaan ekonomi, serta pengelolaan sumberdaya dan teknologi.

Namun demikian, definisi kelompok tidak terlepas dari elemen keberadaan dua pihak atau lebih yang melakukan interaksi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama. Interaksi dalam pelaksanaan program PIDRA ini menyangkut aspek kegiatan pemberdayaan yang dilakukan program, sehingga terdapat pihak subyek pemberdaya dan obyek yang diberdayakan. Dari bentuk interaksi yang terjadi dalam sebuah kelompok akan menentukan kemandirian kelompok sesuai dengan jenis aktivitas kelompoknya. Kemandirian kelompok merupakan suatu kondisi dimana kelompok sudah mandiri. Kemandirian ini dapat dilihat pada kelompok yang mempunyai karakteristik seperti memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi peningkatan kesejahteraan anggotanya, menyediakan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua anggota untuk memainkan peranan dan menjadi bagian dalam setiap pengambilan keputusan yang menyangkut kehidupan mereka, dalam setiap proses pembelajaran dan dalam setiap upaya meningkatkan pendapatan serta kesejahteraan hidup mereka, menyediakan kesempatan belajar bagi semua anggota untuk mengembangkan praktek demokrasi yang sehat, mampu membawa seluruh anggotanya keluar dari kemiskinan secara berkelanjutan.

Konsep gender adalah suatu sifat yang melekat baik pada pria maupun wanita yang dikonstruksi atau dibentuk secara sosial maupun kultural dengan akibat terjalannya hubungan sosial yang membedakan fungsi, peran dan tanggung jawab kedua jenis kelamin itu. Gender merupakan hasil konstruksi sosial serta sosialisasi yang panjang dalam suatu masyarakat. Hal tersebut kemudian melahirkan peran gender yang terdiri dari peran produktif, reproduktif, dan sosial. Konsep gender dalam kelompok mengembangkan tiga fokus pendekatan, yaitu peran, akses dan kontrol masing-masing jenis pembeda gender. Fokus pendekatan gender terutama pada distribusi dan sumber daya (*resources*) dalam kelompok. Pendekatan ini berusaha secara sistematis meneliti kegiatan pria dan wanita agar mengatasi stereotipe dan ideologi yang menjadikan pekerjaan wanita tidak

terlihat, perbedaan status serta argumentasi ekonomi dengan memberikan prasarana kepada kaum wanita. Permasalahan yang mendasar dalam pendekatan ini bukanlah integrasi wanita dalam pembangunan, tetapi perubahan struktur sosial, proses, dan pengaruh peran, akses serta kontrol wanita dalam pengentasan kemiskinan keluarga. Pendekatan ini melihat subordinasi wanita bukan hanya sebagai masalah realokasi sumber-sumber ekonomi, tetapi lebih sebagai masalah redistribusi kekuasaan (*redistributing power*).

Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah dalam mengatasi permasalahan kemiskinan dan kesenjangan gender adalah dengan mengeluarkan Program PIDRA, dengan adanya program PIDRA diharapkan kemiskinan dan kesenjangan gender dapat sedikit demi sedikit terkikis. Program PIDRA yang hakekatnya merupakan salah satu program pembangunan masyarakat seyogyanya melibatkan seluruh lapisan anggota penerima program, baik pria maupun wanita. Hal ini sesuai dengan Inpres No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender. Oleh karena itu, analisis gender menjadi hal yang penting untuk dilakukan. Analisis gender dilakukan dengan melihat pembagian kerja, profil aktivitas dan kontrol atas peranan antar pria dan wanita. Dengan analisis gender dan kemandirian kelompok tersebut maka akan diketahui sejauh mana keberhasilan program PIDRA terhadap perkembangan gender, dan bagaimana kondisi keberlanjutan kemandirian dan keberdayaan yang telah dihasilkan.



Gambar 2. Bagan Kerangka Berpikir

Keterangan:

- > Alur hubungan dalam program
- ←- -> Alur hubungan antar program

3.2. Batasan Masalah

Untuk mempersempit ruang lingkup penelitian, maka pembatasan permasalahan pada penelitian ini adalah:

1. Penelitian ini membahas mengenai perkembangan kemandirian Kelompok Mandiri, baik pria maupun wanita, selama pelaksanaan program PIDRA sampai setelah masa pelaksanaan program (tahun 2001-2011) di Desa Sukorame Kecamatan Binangun Kabupaten Blitar.
2. Analisis dalam penelitian ini menjelaskan mengenai kesesuaian kondisi kemandirian Kelompok Mandiri, baik pria maupun wanita, dengan program pembangunan pedesaan berbasis gender setelah program PIDRA di Desa Sukorame Kecamatan Binangun Kabupaten Blitar berlangsung.
3. Analisis dalam penelitian ini juga menjelaskan mengenai dinamika kesetaraan gender pada Kelompok Mandiri, baik pria maupun wanita, selama fase pengenalan, pelaksanaan, hingga evaluasi dari program PIDRA di Desa Sukorame Kecamatan Binangun Kabupaten Blitar.
4. Penelitian ini juga menganalisis tingkat koresponsifan program terhadap peran, akses dan kontrol gender selama aktivitas Kelompok Mandiri berlangsung (tahun 2001-2011).

3.3. Definisi Konsep dan Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan suatu definisi yang diberikan peneliti sendiri dan menjelaskan bagaimana peneliti itu mengukur variabel-variabel yang terdapat dalam penelitiannya. Menurut Kountur (2007) mengatakan bahwa definisi operasional adalah suatu definisi yang memberikan penjelasan atas suatu variabel dalam bentuk yang dapat diukur. Definisi operasional ini memberikan informasi yang diperlukan untuk mengukur variabel yang akan diteliti. Dengan kata lain definisi operasional adalah definisi yang dibuat oleh peneliti itu sendiri. Definisi operasional diperlukan untuk memudahkan peneliti dalam menganalisis dan mengolah data karena definisi operasional memberikan penjelasan tentang cara mengukur masing-masing variabel penelitian. Definisi operasional dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Pembangunan masyarakat desa adalah pembangunan pedesaan yang komprehensif, dari aspek peningkatan pemberdayaan masyarakat, peningkatan infrastruktur, perekonomian, sosial budaya, dan kelembagaan (institusi) desa..
2. Program PIDRA (*Participatory Integrated Development In Rainfed Areas*) adalah sebuah program pemberdayaan yang difokuskan kepada masyarakat miskin yang bermukim di lahan kering/kritis, tadah hujan, dan jarang memperoleh akses dalam pembangunan wilayah pedesaan melalui pendekatan secara partisipatif. Tujuan dari program ini adalah untuk meningkatkan peran, akses, dan kontrol anggota dalam usahanya melangsungkan kehidupan dan mengentaskan kemiskinan di wilayah pedesaan.
3. Kelompok mandiri adalah sekumpulan masyarakat miskin pedesaan yang sering termarginalkan oleh pembangunan wilayah, baik dari segi fisik (infrastruktur, pangan, dan teknologi) maupun dari segi sosial (status dan kekuasaan), dan mau berusaha untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan wilayahnya.
4. Keberdayaan masyarakat adalah sebuah kondisi dimana masyarakat telah memiliki kontrol penuh atas kehidupannya dan berbagai aspek yang mempengaruhi di lingkungannya untuk meningkatkan kualitas hidupnya baik di lingkungan keluarga, sosial, dan budaya.
5. Keberlanjutan adalah kemampuan untuk bertahan dalam melakukan suatu usaha atau kegiatan, dalam penelitian ini subyek yang digunakan adalah aktivitas pemberdayaan, seperti pengembangan organisasi, ekonomi, pengelolaan sumberdaya dan teknologi, serta aktivitas peningkatan keterampilan.
6. Kondisi Sosial adalah kondisi yang menggambarkan tentang hal-hal yang berkaitan dengan perbuatan dan pemikiran manusia, termasuk di dalamnya seperti pekerjaan, status keluarga, dan strata sosial. Kondisi sosial anggota pada penelitian ini ditilik dari dua masa waktu, sebelum masa program berlangsung dan setelah masa program berlangsung.
7. Kondisi ekonomi atau status ekonomi adalah kedudukan atau posisi seseorang dalam kelompok manusia yang ditentukan oleh jenis aktivitas ekonomi, pendapatan per bulan, jenis rumah tinggal, dan jabatan dalam organisasi.

Kondisi ekonomi anggota pada penelitian ini ditilik dari dua masa waktu, sebelum masa program berlangsung dan setelah masa program berlangsung.

8. Gender adalah peran sosial yang ditentukan berdasarkan jenis kelamin, yakni pria dan wanita. Gender juga disebut sebagai perbedaan status, peran dan tanggung jawab antara wanita dan pria yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan nilai budaya yang berlaku dalam periode waktu tertentu.
9. Kesetaraan gender adalah sebuah eksistensi atau keberdayaan, dimana setiap orang berhak memiliki kuasa dan tanggung jawab yang sama sesuai dengan kemampuan masing-masing individu tanpa dibatasi oleh jenis kelamin dan penilaian subyektif dari sisi budaya, namun tidak menyalahi kodrat manusia berdasarkan sifat maskulinitas dan feminitasnya.
10. Kemandirian kelompok adalah kondisi dimana kelompok dan anggota kelompok memiliki peran penuh tanpa perlu paksaan dan bantuan dari pihak luar dalam segala aktivitas pembangunan diri, keluarga, dan masyarakat desa, serta memiliki andil dalam pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, dan turut serta dalam melaksanakan upaya mengatasi masalah bersama baik ditingkat kelompok, desa, bahkan hingga lingkup kecamatan. Kemandirian ini diperoleh melalui aspek-aspek seperti:
 - a. Organisasi kelompok, yakni kegiatan pengorganisasian dan pengembangan kelompok yang mendukung terbentuknya suatu kemandirian anggota Kelompok Mandiri melalui aktivitas-aktivitas seperti pembiayaan pertemuan rutin, penyiapan materi pertemuan, dan penentuan pengurus.
 - b. Ekonomi, yakni kegiatan pengelolaan perekonomian kelompok, baik berupa siklus keuangan atau aset kelompok, dimana kegiatan ini dapat mendukung terciptanya kemandirian anggota melalui aktivitas-aktivitas seperti simpan pinjam, pengelolaan denda dan bunga, pengelolaan ternak sapi dan kambing, serta usaha kelompok.
 - c. Sumberdaya dan teknologi adalah yakni kegiatan pengelolaan sumberdaya dan teknologi, dimana kegiatan ini dapat mendukung terciptanya kemandirian anggota melalui aktivitas-aktivitas seperti pembangunan

sarana dan prasarana, pemakaian PC, penyediaan saprotan, dan produksi keripik.

11. Program responsif gender adalah suatu kondisi dimana program pemberdayaan telah berhasil menyalurkan segala aktivitas dan kelebihanannya sesuai dengan tujuan dilaksanakannya program kepada sasaran program yang berbasis kelamin, pria dan wanita, secara berimbang dan menghasilkan perubahan positif sesuai dengan harapan program.
12. Program/proyek lanjutan adalah proyek atau program yang melanjutkan kegiatan dari program PIDRA yang telah selesai masa pelaksanaannya dan memiliki tujuan jangka panjang yang sama dengan program PIDRA.

3.4. Variabel dan Indikator Penelitian

Variabel adalah sesuatu yang mempunyai nilai (Singarimbun, 1995). Pengukuran variabel digunakan untuk menentukan penelitian terhadap masalah yang akan diteliti. Variabel yang diukur meliputi kemandirian, kesesuaian kondisi kemandirian, kesetaraan gender, keresponsifan program. Adapun pengukuran pada tiap-tiap variabel dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3-1. Pengukuran Variabel Kemandirian Kelompok Mandiri Pria dan Wanita

No.	Indikator	Satuan
1.	Organisasi Kelompok	
	a. Pembiayaan pertemuan rutin	%
	b. Materi pertemuan	%
	c. Penentuan pengurus	%
2.	Ekonomi	
	a. Simpan pinjam	%
	b. Bunga dan denda	%
	c. Ternak sapi dan kambing	%
	d. Usaha kelompok	%
3.	Pengelolaan sumberdaya dan teknologi	
	a. Pembangunan sarana dan prasarana	%
	b. Pemakaian PC	%
	c. Penyediaan saprotan	%
	d. Produksi keripik	%

Sumber: Data Diolah, 2013

Tabel 3-2. Pengukuran Variabel dan Indikator Kesesuaian Kondisi Kemandirian Kelompok Mandiri Pria dan Wanita

No.	Indikator	Satuan
1.	Kesempatan berorganisasi	%
2.	Kepercayaan diri	%
3.	Peran aktif dalam pembangunan masyarakat desa	%
4.	Semangat berkumpul	%
5.	Bertukar pikiran	%
6.	Keterampilan dan pengetahuan manajerial	%
7.	Pengelolaan usaha	%
8.	Akses modal	%
9.	Pengetahuan pertanian dan peternakan	%
10.	Akses dan kontrol sarana pedesaan	%
11.	Manfaat teknologi	%
12.	Manfaat lingkungan	%

Sumber: Data Diolah, 2013

Tabel 3-3. Pengukuran Variabel dan Indikator Kesetaraan Gender pada Kelompok Mandiri

No.	Indikator	Satuan
1.	Aspek peran a. Peran pria b. Peran wanita	%, Setara/Tidak setara %, Setara/Tidak setara
2.	Aspek akses a. Akses pria b. Akses wanita	%, Setara/Tidak setara %, Setara/Tidak setara
3.	Aspek Kontrol a. Kontrol pria b. Kontrol wanita	%, Setara/Tidak setara %, Setara/Tidak setara

Sumber: Data Diolah, 2013

Tabel 3-4. Pengukuran Variabel dan Indikator Program *Participatory Integrated Development in Rainfeed Areas (PIDRA)*

No.	Indikator	Satuan
1.	Tingkat keberhasilan program a. Keberlanjutan Aktivitas 1) Kemandirian 2) Program/proyek lanjutan b. Keberlanjutan Keberdayaan 1) Kondisi sosial anggota 2) Kondisi ekonomi anggota	Berlanjut/Tidak Berlanjut/Tidak %, Berlanjut/Tidak %, Berlanjut/Tidak

Sumber: Data Diolah, 2013

IV. METODOLOGI PENELITIAN

4.1. Metode Penentuan Lokasi

Penentuan lokasi penelitian dilakukan secara sengaja (*purposive*), yaitu pada kelompok yang telah mengikuti Proyek Pengembangan Partisipasi Lahan Kering Terpadu (PIDRA) di Desa Sukorame Kecamatan Binangun Kabupaten Blitar. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa kelompok tersebut merupakan kelompok yang sejak tahun 2001 sampai tahun 2008 aktif mengikuti Program PIDRA. Waktu yang ditentukan oleh peneliti untuk melakukan penelitian adalah selama dua bulan, pada april 2012 hingga mei 2012. Adapun jadwal kegiatan penelitian serta *log book* harian kegiatan penelitian terlampir pada lampiran 1 dan lampiran 2.

4.2. Metode Penentuan Sampel

Pada penelitian ini, informasi tentang Proyek Pengembangan Partisipasi Lahan Kering Terpadu (PIDRA) di Desa Sukorame Kecamatan Binangun Kabupaten Blitar didapatkan melalui wawancara calon responden dengan *key informan* (dalam hal ini adalah pejabat atau lembaga pemerintah yang mengerti dan memahami prohran PIDRA seutuhnya). Satuan kajian dalam penelitian ini merupakan subyek penelitian yaitu kelompok-kelompok mandiri aktif pada Program PIDRA desa Sukorame, Kecamatan Binangun, Kabupaten Blitar.

Teknik sampling dalam penelitian kualitatif berbeda dengan yang non kualitatif. Maksud sampling dalam hal ini ialah menjangring sebanyak mungkin informasi dari berbagai macam sumber dan bangunannya. Sampling bertujuan untuk menggali informasi yang akan menjadi dasar dari rancangan dan teori yang muncul. Sampel dalam penelitian kualitatif tidak dilakukan secara acak akan tetapi dengan menggunakan sampel bertujuan (*purposive sampel*).

Purposive Sampling disini artinya bahwa penentuan sampel mempertimbangkan kriteria-kriteria tertentu yang telah dibuat terhadap obyek yang sesuai dengan tujuan penelitian dalam hal ini penelitian dilakukan pada kelompok mandiri aktif, baik kelompok pria dan kelompok wanita, yang telah menerima manfaat program PIDRA dari awal dan kegiatan kelompok masih aktif

hingga saat ini setelah masa program habis. Purposive sampling adalah teknik penentuan sampel untuk tujuan tertentu saja, atau juga bisa diartikan sebagai sampling yang menentukan target kelompok tertentu. Ketika populasi yang diinginkan untuk penelitian ini adalah langka atau sangat sulit untuk ditemukan dan diajak untuk menyelesaikan studi, purposive sampling mungkin adalah satu-satunya pilihan.

Pada kegiatan sampling ini, peneliti menggunakan jenis sampel *Judgment Sampling*, yakni sampel dipilih berdasarkan penilaian peneliti bahwa dia adalah pihak yang paling baik untuk dijadikan sampel penelitiannya. Misalnya untuk memperoleh data tentang kegiatan kelompok dalam pengembangan usaha mikro yang direncanakan oleh kelompok, maka pengurus kelompok merupakan orang-orang yang terbaik untuk bisa memberikan informasi. Jadi, *judgment sampling* umumnya memilih sesuatu atau seseorang menjadi sampel karena mereka adalah orang yang kaya akan informasi mengenai topik bahasan penelitian (*information rich*).

4.3. Metode Pengumpulan data

Ada tiga proses kegiatan pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti, yaitu : 1) proses memasuki lokasi penelitian; 2) ketika berada di lokasi penelitian; serta 3) mengumpulkan data lapangan. Masing-masing proses kegiatan dijelaskan sebagai berikut:

1. Proses memasuki lokasi penelitian

Peneliti melakukan orientasi literatur untuk memperoleh berbagai informasi tentang Program PIDRA, khususnya sub program pengembangan masyarakat dan gender. Untuk mendapatkan data yang valid, peneliti melakukan adaptasi dan proses belajar dengan para *key responden* (dalam hal ini ketua kelompok afinitas mandiri wanita “Mawar Putih”, Ibu Misnatun, dan Bpk. M. A. Junaidi selaku dosen pembimbing penelitian). Kegiatan ini dilakukan peneliti dengan cara memperkenalkan diri sebaik-baiknya kepada *key responden* agar tidak menimbulkan kecurigaan serta dalam rangka mendapatkan informasi yang relevan terkait dengan Program PIDRA.

2. Ketika berada di lokasi penelitian

Peneliti melakukan hubungan yang pribadi serta akrab dengan para responden (dalam hal ini masyarakat miskin yang tergabung dalam Kelompok Afinitas Mandiri pada Program PIDRA) dengan cara meminta izin dari aparat desa, tokoh masyarakat, serta anggota kelompok Program PIDRA. Proses peneliti memperoleh informasi dan data penelitian dengan cara melakukan wawancara mendalam kepada responden dengan menggunakan instrumen penelitian terstruktur (*interview guide*) dan kegiatan FGD (*Focus Group Discussion*) Guide. Lembar instrumen penelitian, baik *Interview Guide* dan *FGD Guide* terlampir pada lampiran 3 dan lampiran 4.

3. Proses pengumpulan data

Berdasarkan pada jenis data yang diperlukan, teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi: a) *Studi dokumentasi*, yaitu proses melengkapi, menyempurnakan dan memperkuat data yang telah diperoleh dari hasil survei pendahuluan menggunakan bahan pustaka (referensi) yang berkaitan dengan substansi materi penelitian dengan cara mengumpulkan data yang bersumber dari beberapa dokumen; b) *Wawancara mendalam (indepth interview)*, yaitu suatu cara pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya. Wawancara ini digunakan apabila ingin mengetahui hal-hal dari responden secara lebih mendalam (Subana, 2000); c) *Observasi*, yaitu melakukan pengamatan secara langsung kepada obyek penelitian di lapang untuk melihat lebih dekat kegiatan yang dilakukan. Dalam kegiatan ini akan dibuat daftar catatan mengenai segala sesuatu (peristiwa yang dianggap penting) yang terjadi pada saat pengamatan berlangsung (Riduwan, 2002).

4.2.1. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber-sumber asli. Sumber asli disini diartikan sebagai sumber pertama darimana data tersebut diperoleh. Data primer dalam penelitian ini dapat diperoleh dari kegiatan *semi structure interview* atau forum diskusi, kegiatan observasi, kegiatan dokumentasi. Data primer yang diperlukan tersebut antara lain seperti, keberadaan kelompok mandiri, kemandirian kelompok mandiri (KMP, KMW), aktivitas, partisipasi dan peran anggota dalam kelompok.

4.2.2. Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang sudah tersedia, dan pengumpulan data ini menggunakan metode dokumenter, yaitu data yang diperoleh berasal dari pengumpulan literatur, dokumen dan arsip. Data sekunder yang diperlukan dalam penelitian ini antara lain seperti *overview* pengembangan sosial dan budaya, khususnya yang berspektif gender pada masyarakat desa, *overview* pengembangan fisik desa, dan *overview* pengembangan taraf hidup masyarakat

4.4. Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini, sebagai unit analisis adalah individu, baik pria maupun wanita, yang tergabung dalam kelompok mandiri yang mengikuti Proyek pengembangan partisipasi lahan kering terpadu (PIDRA) di Desa Sukorame Kecamatan Binangun Kabupaten Blitar. Kesetaraan gender dan kemandirian kelompok pada Kelompok Mandiri merupakan kajian utama dalam tingkatan analisis yang berarti bahwa dalam mengkaji permasalahan penelitian berdasarkan fakta, pengalaman, ide-ide dan persepsi anggota kelompok mandiri sebagai unit analisis. Kesetaraan gender pada Kelompok Mandiri dianalisis dengan cara dibandingkan satu sama lain antar individu dengan konteks jenis kelamin (*comparative analysis*). Sedangkan kemandirian kelompok dianalisis dengan cara mengidentifikasi apa saja kegiatan yang dilakukan, siapa saja yang melaksanakan, dan bagaimana peran serta masing-masing individu dalam setiap kegiatan tersebut, dalam hal ini pembandingan nilai juga berdasarkan konteks jenis kelamin (*comparative analysis*).

Proses analisa pada penelitian ini dilakukan melalui 3 alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan antara lain, yang pertama, reduksi data yang diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakkan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Yang kedua, penyajian data, diartikan sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Ketiga, yakni penarikan kesimpulan yang diartikan sebagai suatu kegiatan konfigurasi yang utuh selama penelitian berlangsung. Proses pengolahan dan analisis data meliputi tahap-tahap penyuntingan data *record*,

transkribing data *record*, *coding* data dan analisis data transkribing, setelah itu melakukan pengolahan data yang fokus pada aspek kemandirian anggota kelompok dalam melakukan aktivitas/peran, akses, dan kontrol pria dan wanita dalam melakukan aktivitas di kelompok, dan tingkat kesetaraan gender yang terbentuk akibat program PIDRA.

Penyuntingan data *record* dilakukan dengan cara merekam segala aktivitas pencarian informasi penelitian mulai dari interview responden hingga survei wilayah, baik sosial, budaya, maupun geografis. Segala aktivitas pencarian informasi ini direkam melalui 3 cara, yakni video, rekaman suara, dan catatan tertulis. Sedangkan transkribing data *record* dilakukan dengan cara menuliskan ulang segala percakapan yang terdapat pada hasil rekaman penelitian baik yang berupa video maupun rekaman suara. Hasil transkribing data *record* ini kemudian *dicoding* dan dianalisa dengan cara mengelompokkan setiap kalimat hasil wawancara berdasarkan inti atau poin kalimat. Hasil transkribing dan *coding* data *record* akan ditampilkan pada halaman lampiran.

Tujuan 1 dan 2 penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran kondisi kemandirian Kelompok Mandiri baik pria maupun wanita. Pengolahan data kemandirian kelompok dalam melakukan aktivitasnya ini dikelompokkan menjadi 3 kategori waktu, yakni fase pengenalan yang dilaksanakan antara tahun 2001 hingga 2003, fase pelaksanaan yang dilaksanakan antara tahun 2004-2009, dan fase evaluasi yaitu tahun 2010 hingga 2011 dengan cara memberikan persentasi keaktifan tanpa perlu campur tangan pihak luar dalam partisipasi anggota dalam berperan pada masing-masing aspek kegiatan kelompok seperti organisasi kelompok, ekonomi, dan pengelolaan sumberdaya dan teknologi. Identifikasi kemandirian pada bahasan ini dilakukan dengan cara mendeskripsikan fakta aktivitas yang terjadi di lapang dan memunculkan nilai persentase kemandirian anggota dalam melaksanakan aktivitas tersebut.

Dan pada tujuan 3 penelitian ini dilakukan analisis kesesuaian antara kemandirian yang terbentuk dengan tujuan dilaksanakannya program. Kesesuaian kemandirian kelompok dengan tujuan program ini dapat diperoleh dengan cara membandingkan kondisi rata-rata kesesuaian kemandirian aktivitas yang terjadi hingga fase evaluasi dengan 3 tujuan utama pelaksanaan program, yakni

meningkatkan peran aktif, akses mendapatkan informasi, dan kontrol terhadap kehidupan sosial dan budaya di wilayah pedesaan. Pada masing-masing tujuan selalu tidak terlepas pula dengan membandingkan kondisi antara pria maupun wanita, baik secara kelompok maupun individu. Perbandingan kondisi pria dan wanita merupakan analisis utama disetiap aspek bahasan dalam penelitian ini, dengan ketentuan yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4-1. Ketentuan pembandingan kesetaraan antara pria dan wanita

No.	Rentang Nilai Perbedaan	Kondisi Kesetaraan
1.	0% - 0,99%	Setara / Tidak berbeda
2.	1,00% - 15,00%	Tidak Setara / Berbeda
3.	$\geq 15,01\%$	Sangat Tidak Setara / Sangat berbeda

Sumber: Data Diolah, 2012

Sedangkan pada tujuan 4 bertujuan memperoleh gambaran kondisi kesetaraan gender pada Kelompok Mandiri, dimana pengolahan data kesetaraan gender disesuaikan dengan analisis model Harvard yakni analisis difokuskan pada aspek peran, akses, dan kontrol pria dan wanita dalam melakukan aktivitas di kelompok dari fase pengenalan, pelaksanaan, hingga fase evaluasi. Aspek peran, akses, dan kontrol diperoleh melalui nilai keaktifan anggota kelompok, baik pria maupun wanita, dalam melakukan aktivitas kelembagaan, ekonomi, pengelolaan sumberdaya dan teknologi, serta peningkatan keterampilan sumberdaya manusia di Kelompok Mandiri program PIDRA. Nilai peran, akses, dan kontrol tersebut nantinya akan diberikan kategori setara, cukup setara, dan tidak setara sesuai dengan perbandingan kondisi aktual pria dan wanita dalam beraktifitas.

Pada tujuan 5 penelitian ini juga dilakukan analisis tingkat keberhasilan program terhadap pengembangan masyarakat pedesaan berbasis gender yang menjadi tujuan dasar dibentuknya program pemberdayaan ini. Keberhasilan program terhadap pengembangan masyarakat pedesaan berbasis gender dapat diketahui melalui analisis data keberlanjutan aktivitas kelompok dan tingkat keberdayaan anggota kelompok berbasis gender. Penjabaran dengan cara penulisan deskriptif yang ditunjang dengan data grafik kuantitatif dari analisis keberlanjutan aktivitas dan keberdayaan tersebut dapat menghasilkan kesimpulan mengenai tingkat keberhasilan program dalam usaha pembangunan masyarakat

pedesaan. Kondisi keberlanjutan aktivitas dan keberdayaan anggota kelompok dapat diukur berdasarkan tabel dibawah ini:

Tabel 4-2. Indikator dan Parameter Keberlanjutan Aktivitas dan Keberdayaan

No.	Variabel	Indikator	Parameter
1.	Aktivitas	Kemandirian	<ol style="list-style-type: none"> Memiliki wewenang untuk menjalankan dan membuat keputusan dalam segala aktivitas Kelompok. Memiliki rasa percaya diri dan kompetensi dalam menghadapi kehidupan sosial bermasyarakat disegala aspek dan kegiatan pembangunan desa. Memiliki keyakinan akan potensi dan peran penting mereka dalam setiap kegiatan pembangunan desa. Memiliki peluang partisipasi sekaligus tanggung jawab dalam segala aktivitas yang erat kaitannya dengan pembangunan masyarakat pedesaan termasuk keluarganya.
		Program lanjutan	<ol style="list-style-type: none"> Memperoleh wadah penyalur aktivitas pembukuan dan keorganisasian dari Lembaga Desa atau Pemerintah Daerah Kab. Blitar. Memperoleh peluang menerima pelatihan-pelatihan pemberdayaan masyarakat petani dan pedagang dalam program selain PIDRA.
2.	Keberdayaan	Kondisi sosial anggota	<ol style="list-style-type: none"> Memperoleh pengakuan keorganisasian dari Lembaga Desa dan hak menerima bantuan pembangunan pedesaan. Memiliki peran dalam kepengengurusan Lembaga Desa. Memperoleh pengakuan dari masyarakat desa sebagai petani kecil berkembang. Memiliki kontrol atas segala aktivitas yang erat kaitannya dengan keberlanjutan hidup keluarga, masyarakat sekitar, dan desa.
		Kondisi ekonomi anggota	<ol style="list-style-type: none"> Dalam hal pangan, keluarga anggota kelompok setidaknya memiliki intensitas makan 2 kali sehari. Dalam hal sandang, keluarga anggota kelompok dapat membeli pakaian 3 kali pertahun. Keluarga anggota kelompok memiliki rumah berdinding tembok, berlantai tekel, beratap genteng. Anggota kelompok telah dapat menyekolahkan anak hingga jenjang SMA.

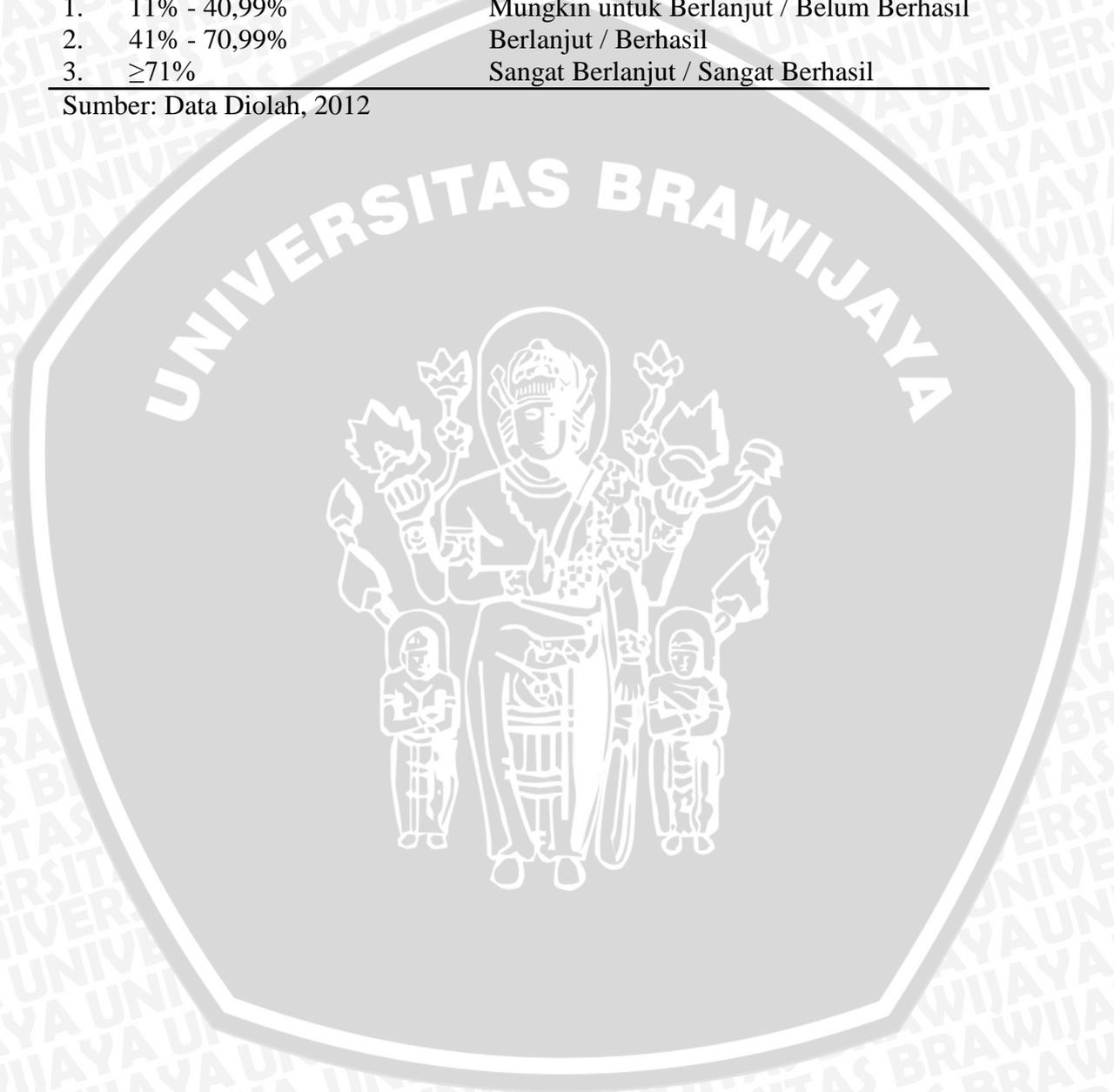
Sumber: Data Primer, 2012

Sebagai ketentuan pengambilan kesimpulan mengenai kondisi keberlanjutan aktivitas dan keberdayaan serta tingkat keberhasilan program dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4-3. Ketentuan keberlanjutan dan keberhasilan program

No.	Persentase Capaian	Kondisi Keberlanjutan/Keberhasilan
1.	11% - 40,99%	Mungkin untuk Berlanjut / Belum Berhasil
2.	41% - 70,99%	Berlanjut / Berhasil
3.	$\geq 71\%$	Sangat Berlanjut / Sangat Berhasil

Sumber: Data Diolah, 2012



V. HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1. Hasil

5.1.1. *Participatory Integrated Development in Rainfed Areas* (PIDRA)

Program *Participatory Integrated Development in Rainfed Areas* (PIDRA) merupakan program Pemerintah Republik Indonesia yang didanai dari IFAD (*International Foundation For Agriculture Development*) untuk mengentaskan masyarakat miskin di pedesaan dan bersperspektif gender. Program PIDRA menekankan bantuan kepada keluarga miskin dengan tidak memanjakan mereka pada perilaku ketergantungan kepada bantuan fisik, tetapi lebih diarahkan pada mewujudkan motivasi atau gairah kerja dalam meningkatkan keterampilan, semangat berinisiatif agar tidak selalu tergantung kepada adanya bantuan. Di Desa Sukorame Kecamatan Binangun Kabupaten Blitar, program PIDRA dimulai pada tahun 2001 yang dilaksanakan di Dusun Sukomulyo dan Dusun Sukodadi yang secara geografis kondisinya lahannya merupakan lahan kering (*rainfed areas*). Sampai sekarang telah terbentuk 9 kelompok afinitas (baik KMP maupun KMW). Program PIDRA akan dilaksanakan selama 8 tahun yang dibagi dalam 2 tahap yaitu tahap I (2001-2004) dan tahap II (2005-2008).

Pada tahun 2004, program PIDRA telah memasuki tahun terakhir dari tahap I dan pihak penyandang dana, dalam hal ini IFAD telah melaksanakan evaluasi kegiatan PIDRA selama tahap I. Dari hasil evaluasi tersebut, IFAD memutuskan untuk meloloskan pelaksanaan Program PIDRA menuju tahap ke II (tahun 2005-2008). Karena melihat keberhasilan Program PIDRA yaitu telah memenuhi syarat untuk dilanjutkan ke tahap II, khususnya pada program pemberdayaan Kelompok Afinitas Mandiri (KAM) serta kinerja pelaksana Program PIDRA.

5.1.2. Pendekatan program

PIDRA merupakan program pemberdayaan masyarakat dengan berlandaskan inisiatif, peran aktif dan kesepakatan kolektif para pemangku kepentingan (terutama masyarakat penerima manfaat program). Program dilaksanakan secara transparan dan akomodatif terhadap aspirasi para pemangku kepentingan, dilaksanakan dengan mengarusutamakan gender pada setiap komponen program untuk mencapai keadilan dan kesetaraan gender. Pembentukan dan peningkatan

kualitas organisasi yang berbasis masyarakat dalam mencapai kemandiriannya dilakukan melalui kerjasama Pemerintah dengan LSM. Seluruh kegiatan program dirancang dan dilaksanakan dengan berorientasi kepada tercapainya peningkatan taraf hidup masyarakat penerima manfaat program secara keberlanjutan. Proses pengenalan dan pelaksanaan program didelegasikan secara penuh ke tingkat kabupaten, dimana tingkat propinsi dan pusat diperan-fungsikan dalam koordinasi dan pengawasan.

5.1.3. Identifikasi Lokasi Program Dalam Penelitian

Lokasi Program PIDRA di Desa Sukorame Kecamatan Binangun Kabupaten Blitar didasarkan pada 6 (enam) kriteria seperti, pertama topografi dan geografi yang memiliki ketinggian 200 mdpl dan luas areal kemiringan lahan diatas 8%. Kedua, kesejahteraan desa yang masih rendah dimana kebanyakan masyarakatnya >90% total Kepala Keluarga belum memiliki pesawat TV. Ketiga, wilayah lahan yang luas areal lahan keringnya lebih dari 50% dari total lahan desa. Keempat, terdapat sedikitnya 5% wanita sebagai kepala keluarga dalam satu desa. Kelima, keterbatasan air bersih dan transportasi tetapi prasarana jalan telah dimiliki. Dan keenam ialah jumlah penduduk yang berstatus Tenaga Kerja Indonesia (TKI) paling sedikit dibandingkan dengan desa-desa lainnya.

Secara geografis desa Sukorame terletak pada perbatasan sebelah timur kabupaten Blitar dengan kabupaten Malang, dengan luas wilayah 387,586 Ha. Topografi ketinggian desa ini adalah berupa dataran sedang yaitu 250 MAL di atas permukaan air laut. Berdasarkan data BPS kabupaten Blitar tahun 2004, selama tahun 2004 curah hujan di desa Sukorame rata-rata mencapai 2.300 mm. Curah hujan terbanyak terjadi pada bulan Desember hingga mencapai 400,04 mm yang merupakan curah hujan tertinggi selama kurun waktu 2000-2008.

Secara administratif, desa Sukorame terletak di wilayah kecamatan Binangun kabupaten Blitar dengan posisi yang berbatasan langsung dengan kabupaten Malang. Di sebelah selatan berbatasan dengan desa Wates kecamatan Wates, di sebelah barat berbatasan dengan desa Birowo di sebelah Utara berbatasan dengan desa Ngadri, sedangkan di sebelah timur berbatsan dengan desa Kedungwaru (kabupaten Malang). Jarak tempauh desa Sukorame ke ibu kota kecamatan adalah 6,5 km, yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 10 menit. Sedangkan jarak

tempuh ke ibu kota kabupaten adalah 55 km, yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 1 jam.

5.1.4. Sejarah Desa

Sejarah desa Sukorame dari berbagai sumber yang telah ditelusuri bahwa desa Sukorame dahulu merupakan hutan belantara. Pada saat itu masih di zaman penjajahan Belanda. Sukorame merupakan sebuah kampung atau wialayah yang masing jarang penduduknya. Hingga pada suatu hari datang seorang pengembara dari daerah Blitar selatan yang dianggap mampu memimpin kampung tersebut yang yang tak lain adalah orang yang bernama Sukorame, sehingga kampung tersebut menjadi suatu perdukuan yang berada di bawah pemerintah Desa Birowo. Semakin lama dukuh Sukorame ini semakin banyak penduduknya yang bermukim dan tinggal di wilayah tersebut. Sehingga kepala dusun tersebut berinisiatif untuk memekarkan wilayah kampung tersebut menjadi suatu desa yang mendapat dukungan masyarakat di wilayah Sukorame untuk menjadikan dusun Sukorame menjadi sebuah desa yang dipimpin oleh Kepala Desa pertama yang bernama Bapak Mat Taselim.

5.1.5. Sasaran Program dan Responden Penelitian

Setelah identifikasi desa, Program PIDRA melakukan identifikasi keluarga miskin sebagai sasaran penerima manfaat Program PIDRA di Desa Sukorame Kecamatan Binangun Kabupaten Blitar. Penentuan dan penetapan sasaran KK Miskin tersebut pada dasarnya dilakukan sendiri oleh seluruh warga desa secara partisipatif yang memenuhi kriteria sebagai berikut: (1) tingkat pendidikan rendah; (2) kualitas perumahan dan kesehatan kurang; (3) pendidikan anak kurang; (4) penyediaan air bersih rendah; (5) penggunaan energi/listrik kurang atau tidak ada; (6) konsumsi kalori per hari rendah; (7) pemilikan lahan sempit atau tidak punya lahan; serta (8) tingkat pendapatan keluarga rendah. Hasilnya telah ditentukan dan ditetapkan oleh warga desa bersangkutan dengan jumlah total 158 KK Miskin di Desa Sukorame Kecamatan Binangun Kabupaten Blitar. Adapun rinciannya adalah untuk tahun 2001 sebanyak 67 KK Miskin, untuk tahun 2002 sebanyak 73 KK Miskin, serta untuk tahun 2003 sebanyak 18 KK Miskin.

Berdasarkan kondisi nyata saat penellitian, pembentukan kelompok dalam suatu desa adalah 7 kelompok program PIDRA. Hal ini dilakukan secara bertahap,

yaitu pada tahun pertama dibentuk 3 kelompok program PIDRA, pada tahun kedua dibentuk 3 kelompok program PIDRA dan pada tahun ketiga dibentuk 1 kelompok program PIDRA. Adapun daftar kelompok Program PIDRA di Desa Sukorame Kecamatan Binangun Kabupaten Blitar terbagi menjadi dua, yakni 2 Kelompok Mandiri Pria yang terdiri dari Kelompok Budi Lestari dengan jumlah anggota 15 orang, dan Kelompok Gotong Royong dengan jumlah anggota 19 orang. Selain itu juga terdapat 5 Kelompok Mandiri Wanita yang terdiri dari Kelompok Dewi Sartika (jumlah anggota 25 orang), Kelompok Sari Murni (jumlah anggota 16 orang), Kelompok Lestari (jumlah anggota 15 orang), Kelompok Kelinci (jumlah anggota 17 orang), dan Kelompok Sumber Makmur (jumlah anggota 18 orang).

5.2. Pembahasan

5.2.1. Identifikasi Aktivitas Pembentuk Kemandirian Kelompok

Kemandirian Kelompok Mandiri dapat diidentifikasi melalui berbagai aktivitas yang dilakukan kelompok dalam fase pengenalan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan program PIDRA. Berdasarkan hasil peninjauan lapang, diperoleh data aktivitas program yang dikelompokkan menjadi aktivitas organisasi kelompok, ekonomi, serta pengelolaan sumberdaya dan teknologi. Secara keseluruhan, kelompok aktivitas-aktivitas tersebut bertujuan untuk mengembangkan taraf hidup masyarakat desa secara berkelanjutan serta menumbuhkan dan mengembangkan kompetensi Kelompok Mandiri (KM) pada Program *Participatory Integrated Development in Rainfeed Areas* (PIDRA) di Desa Sukorame Kecamatan Binangun Kabupaten Blitar dalam melakukan usaha pemenuhan kebutuhan serta peningkatan keberdayaan individu melalui kegiatan partisipatif yang berperspektif gender.

5.2.1.1. Aktivitas program pada fase pengenalan

Fase pengenalan berlangsung antara tahun 2001 hingga tahun 2003. Fase pengenalan ini adalah fase dimana program baru memasuki tahap awal sosialisasi aktivitas-aktivitas program, termasuk di dalamnya seperti membentuk kelompok dengan sistem 4-4-2, yakni membentuk kelompok pada tahun pertama sebanyak 4 kelompok, tahun kedua sebanyak 4 kelompok, dan tahun ketiga sebanyak 2

kelompok. Selain itu pada fase ini, banyak aktivitas-aktivitas program yang bertumpu pada kemampuan pendamping mensosialisasikannya, seperti dengan aktif mengadakan pertemuan di kelurahan atau bergantian dirumah salah satu anggota. Tujuan inti dari aktivitas-aktivitas yang dilakukan pada fase ini adalah untuk membangun kebiasaan anggota Kelompok Mandiri, baik pria maupun wanita, agar dapat menerima dan mengaplikasikan segala manfaat program dalam setiap aspek kehidupan yang erat kaitannya dengan pengembangan masyarakat pedesaan dan pengentasan kemiskinan.

Tabel 5-1. Kemandirian Kelompok Mandiri Pada Fase Pengenalan Program PIDRA (Tahun 2001-2003)

No.	Aspek Kemandirian	Capaian Kemandirian		Perbandingan Kemandirian
		KM Pria (%)	KM Wanita (%)	
1.	Organisasi Kelompok			
	a. Pembiayaan pertemuan rutin	82,35	87,91	**
	b. Materi pertemuan	17,64	12,08	**
	c. Penentuan pengurus	38,24	79,12	**
2.	Ekonomi			
	a. Simpan pinjam	67,64	68,68	**
	b. Bunga dan denda	32,35	54,94	*
	c. Ternak sapi dan kambing	0	0	-
	d. Usaha kelompok	14,7	4,03	**
3.	Pengelolaan Sumberdaya dan Teknologi			
	a. Pembangunan sarana prasarana	73,53	2,19	*
	b. Pemakaian PC	0	0	-
	c. Penyediaan saprotan	20,58	3,3	*
	d. Produksi keripik	0	0	-
	Rata-Rata Kemandirian	31,55	28,39	**

Keterangan: KM : Kelompok Mandiri
 * : Kemandirian KMP dan KMW sangat berbeda, perbedaan >15%
 ** : Kemandirian KMP dan KMW berbeda, perbedaan antara 1%-15%
 *** : Kemandirian KMP dan KMW tidak berbeda, perbedaan <1%

Sumber : Data Primer, 2012

Pada tabel diatas membahas tentang identifikasi aktivitas mandiri pada kegiatan rutin Kelompok Mandiri Pria dan Wanita dalam program PIDRA. Pada setiap fase program, indikator aktivitas yang terbentuk dikelompokkan menjadi 3 sub aktivitas seperti organisasi kelompok, ekonomi, dan pengelolaan sumberdaya

dan teknologi. Pada sub aktivitas organisasi kelompok, kemandirian beraktivitas terlihat dari kegiatan rutin seperti pembiayaan pertemuan rutin, persiapan materi pertemuan, dan penentuan pengurus. Sedangkan pada sub aktivitas ekonomi, kemandirian beraktivitas terlihat dari kegiatan rutin pengelolaan simpan pinjam kelompok, pelaksanaan bunga dan denda pinjaman, penggembalaan ternak kelompok seperti sapi dan kambing, serta pengelolaan usaha kelompok seperti toko serba usaha dan *home industry* keripik (keripik singkong dan keripik pisang). Dan untuk sub aktivitas pengelolaan sumberdaya dan teknologi, kemandirian beraktivitas terlihat dari kegiatan rutin pembangunan dan perawatan sarana prasarana desa, pemakaian PC milik kelompok, penyediaan modal saprotan kelompok, dan proses produksi keripik sebagai salah satu usaha yang dikembangkan oleh Kelompok Mandiri.

Pada sub aktivitas organisasi kelompok, rata-rata Kelompok Mandiri Pria memiliki nilai persentase kemandirian beraktivitas yang lebih rendah dibandingkan dengan Kelompok Mandiri Wanita, kecuali pada kegiatan persiapan materi pertemuan dimana pada kegiatan ini Kelompok Mandiri Pria memang telah memiliki pengalaman kegiatan berkelompok yang lebih banyak dibandingkan dengan Kelompok Mandiri Wanita. Hal ini dikarenakan kaum pria di Desa Sukorame pada tahun-tahun sebelum pelaksanaan program PIDRA telah terlebih dahulu memiliki andil dan kesempatan dalam menerima program-program pembangunan pedesaan, meskipun aktivitas kelembagaan belum sekompleks pada aktivitas program PIDRA. Pada sub aktivitas ekonomi didapat analisis bahwa rata-rata Kelompok Mandiri Wanita memperoleh nilai kemandirian beraktivitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan Kelompok Mandiri Pria, khususnya pada kegiatan pengelolaan simpan pinjam dan pelaksanaan bunga dan denda pinjaman. Kondisi ini dikarenakan pada kegiatan pengelolaan keuangan, kaum wanita cenderung lebih terampil dan sabar dalam melakukan pengelolaan pembukuan, selain itu juga kaum wanita memiliki tingkat kesadaran yang tinggi akan tanggung jawab bersama terhadap bantuan keuangan kelompok yang mereka terima dari program. Namun pada kegiatan pengelolaan usaha kelompok, kemandirian beraktivitas Kelompok Mandiri Pria jauh lebih tinggi dibandingkan dengan Kelompok Mandiri Wanita dikarenakan pada kenyataannya kaum wanita di Desa

Sukorame tumbuh dan berkembang pada pola pikir yang cenderung pasif, dimana kaum wanita dirasa kurang pantas memiliki wewenang dan campur tangan dalam kegiatan usaha, baik dilingkup keluarga maupun kelompok masyarakat, sehingga cukup sulit diciptakan kondisi madani bagi kaum tersebut untuk bisa berdikari dan memiliki kesadaran akan hak dan potensi mereka terhadap kegiatan usaha kelompok ini. Sedangkan pada aktivitas pengembalaan ternak, khusus pada fase pengenalan ini belum dilaksanakan aktivitas tersebut sehingga belum tercapai kondisi kemandirian beraktivitas baik pada Kelompok Mandiri Pria maupun Wanita, yang dikarenakan aktivitas pada fase pengenalan masih cenderung fokus pada aktivitas yang dapat membentuk kebiasaan berpikir yang maju dan dapat menciptakan peningkatan keberdayaan dan kesetaraan hak serta kewajiban gender.

Pada sub aktivitas pengelolaan sumberdaya dan teknologi, rata-rata Kelompok Mandiri Pria memiliki nilai persentase kemandirian beraktivitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan Kelompok Mandiri Wanita dimana pada kegiatan ini Kelompok Mandiri Pria memang telah memiliki pengalaman kegiatan berkelompok yang lebih banyak dibandingkan dengan Kelompok Mandiri Wanita. Hal ini dikarenakan kaum pria di Desa Sukorame pada tahun-tahun sebelum pelaksanaan program PIDRA telah memiliki kesadaran dan kebiasaan andil dalam aktivitas gotong royong masyarakat, seperti kegiatan bersih desa, pembukaan jalan desa, pembangunan saran umum, dan kegiatan fisik lainnya yang memang merupakan kebiasaan kaum pria di Desa Sukorame dalam aktivitas sosial bermasyarakatnya. Namun pada aktivitas pemanfaatan PC dan pembuatan keripik, khusus pada fase pengenalan ini belum dilaksanakan aktivitas tersebut sehingga belum tercapai kondisi kemandirian beraktivitas baik pada Kelompok Mandiri Pria maupun Wanita, yang dikarenakan aktivitas pada fase pengenalan masih cenderung fokus pada aktivitas yang dapat membentuk kebiasaan berpikir yang maju dan dapat menciptakan peningkatan keberdayaan dan kesetaraan hak serta kewajiban gender diaspek hulu pertanian saja sesuai dengan sumber utama pendapatan dari masing-masing keluarga anggota Kelompok Mandiri. Dari beberapa sub aktivitas tersebut dapat terlihat bahwa Kelompok Mandiri Pria cenderung memiliki nilai kemandirian beraktivitas yang lebih tinggi dibandingkan

dengan Kelompok Mandiri Wanita, hal ini menjelaskan bahwa kaum pria di Desa Sukorame memiliki tingkat kesadaran akan keberdayaan mereka yang lebih tinggi dibandingkan kaum wanita. Kondisi ini dikarenakan pola pikir dan kodrat pria di wilayah pedesaan yang lebih unggul dalam hal memimpin dan bermusyawarah, serta karena kebiasaan dari kaum pria yang memiliki hak utama sebagai pencari pendapatan keluarga, sedangkan kaum wanita lebih cenderung menjadi pengikut saja dibanyak aspek kehidupan baik dilingkup keluarga maupun kelompok masyarakat.

5.2.1.2. Aktivitas program pada fase pelaksanaan

Fase pelaksanaan berlangsung antara tahun 2004 hingga tahun 2009 dan merupakan fase utama dari pelaksanaan program PIDRA. Fase pelaksanaan ini adalah fase dimana program telah memulai tahap pematapan aktivitas-aktivitas yang dapat mendukung tercapainya tujuan program, yakni meningkatkan peran, akses, dan kontrol masyarakat pedesaan miskin termarginalkan untuk memperoleh manfaat yang maksimal atas pembangunan pedesaan terpadu yang telah digalakkan beberapa waktu ini dan bisa ikut terus tumbuh selaras dengan bertambahnya program-program pengembangan masyarakat pedesaan. Pada fase ini segala aktivitas program bertumpu pada peran aktif setiap anggota Kelompok Mandiri, baik pria maupun wanita, untuk mengelola segala manfaat yang telah diberikan program baik dari bantuan fisik, finansial, manajerial, dan pelatihan-pelatihan pengembangan keterampilan. Tujuan inti dari aktivitas-aktivitas yang dilakukan pada fase ini adalah untuk membangun kontrol dan akses serta peran setiap anggota Kelompok Mandiri atas segala aspek diri dan kelompok guna meningkatkan taraf atau kualitas hidup diri dan keluarganya.

Tabel 5-2. Kemandirian Kelompok Mandiri Pada Fase Pelaksanaan Program PIDRA (Tahun 2004-2009)

No.	Aspek Kemandirian	Capaian Kemandirian		Perbandingan Kemandirian
		KM Pria (%)	KM Wanita (%)	
1.	Organisasi Kelompok			
	a. Pembiayaan pertemuan rutin	100	100	***
	b. Materi pertemuan	76,47	75,82	***
	c. Penentuan pengurus	91,17	100	**
2.	Ekonomi			
	a. Simpan pinjam	100	100	***
	b. Bunga dan denda	79,42	90,1	**
	c. Ternak sapi dan kambing	82,34	70,33	**
	d. Usaha kelompok	66,67	69,23	**
3.	Pengelolaan Sumberdaya dan Teknologi			
	a. Pembangunan sarana prasarana	100	10,71	*
	b. Pemakaian PC	11,76	21,98	**
	c. Penyediaan saprotan	100	80,77	*
	d. Produksi keripik	91,18	90,11	**
	Rata-Rata Kemandirian	81,73	73,55	**

Keterangan: KM : Kelompok Mandiri
 * : Kemandirian KMP dan KMW sangat berbeda, perbedaan >15%
 ** : Kemandirian KMP dan KMW berbeda, perbedaan antara 1%-15%
 *** : Kemandirian KMP dan KMW tidak berbeda, perbedaan <1%

Sumber : Data Primer, 2012

Pada tabel diatas membahas tentang identifikasi aktivitas mandiri pada kegiatan rutin Kelompok Mandiri Pria dan Wanita dalam program PIDRA. Pada setiap fase program, indikator aktivitas yang terbentuk dikelompokkan menjadi 3 sub aktivitas seperti organisasi kelompok, ekonomi, dan pengelolaan sumberdaya dan teknologi. Pada sub aktivitas organisasi kelompok, kemandirian beraktivitas terlihat dari kegiatan rutin seperti pembiayaan pertemuan rutin, persiapan materi pertemuan, dan penentuan pengurus. Sedangkan pada sub aktivitas ekonomi, kemandirian beraktivitas terlihat dari kegiatan rutin pengelolaan simpan pinjam kelompok, pelaksanaan bunga dan denda pinjaman, penggembalaan ternak kelompok seperti sapi dan kambing, serta pengelolaan usaha kelompok seperti toko serba usaha dan *home industry* keripik (keripik singkong dan keripik pisang). Dan untuk sub aktivitas pengelolaan sumberdaya dan teknologi, kemandirian beraktivitas terlihat dari kegiatan rutin pembangunan dan perawatan sarana

prasarana desa, pemakaian PC milik kelompok, penyediaan modal saprotan kelompok, dan proses produksi keripik sebagai salah satu usaha yang dikembangkan oleh Kelompok Mandiri.

Pada sub aktivitas organisasi kelompok, rata-rata Kelompok Mandiri Pria dan Wanita telah memiliki nilai persentase kemandirian beraktivitas yang cukup setara, kecuali pada kegiatan penentuan pengurus dimana pada kegiatan ini Kelompok Mandiri Wanita lebih memiliki peningkatan kesadaran akan potensi dan tanggung jawab mereka dalam pengelolaan kelompok, khususnya dalam hal pergiliran dan penentuan kepengurusan kelompok, jika dibandingkan dengan Kelompok Mandiri Pria, sehingga tercipta kemandirian beraktivitas dalam penentuan pengurus yang lebih tinggi pada Kelompok Mandiri Wanita. Hal ini dikarenakan kaum pria di Desa Sukorame pada fase pelaksanaan program PIDRA tidak memiliki semangat sebesar yang dimiliki Kelompok Mandiri Wanita untuk dapat memanfaatkan segala bantuan dari program PIDRA, baik berupa pelatihan maupun bantuan pendampingan. Pada sub aktivitas ekonomi didapat analisis bahwa rata-rata Kelompok Mandiri Wanita memperoleh nilai kemandirian beraktivitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan Kelompok Mandiri Pria, khususnya pada kegiatan pengelolaan simpan pinjam dan pelaksanaan bunga dan denda pinjaman serta pengelolaan usaha kelompok. Kondisi ini dikarenakan pada kegiatan pengelolaan keuangan kelompok, kaum wanita cenderung lebih terampil dan sabar dalam melakukan pengelolaan pembukuan, selain itu juga kaum wanita memiliki tingkat kesadaran yang tinggi akan tanggung jawab bersama terhadap bantuan keuangan kelompok yang mereka terima dari program. Namun pada kegiatan penggembalaan ternak kelompok, kemandirian beraktivitas Kelompok Mandiri Pria jauh lebih tinggi dibandingkan dengan Kelompok Mandiri Wanita dikarenakan pada kenyataannya kaum wanita di Desa Sukorame tumbuh dan berkembang pada pola pikir yang cenderung pasif, dimana kaum wanita dirasa kurang pantas memiliki wewenang dan campur tangan yang lebih tinggi dibanding kaum pria dalam kegiatan fisik seperti kesempatan menerima hibah dan tugas penggembalaan ternak kelompok, sehingga cukup sulit diciptakan kondisi madani bagi kaum tersebut untuk bisa berdikari dan memiliki kesadaran akan hak dan potensi mereka terhadap kegiatan kelompok yang disebutkan.

Pada sub aktivitas pengelolaan sumberdaya dan teknologi, rata-rata Kelompok Mandiri Pria memiliki nilai persentase kemandirian beraktivitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan Kelompok Mandiri Wanita dimana pada kegiatan ini Kelompok Mandiri Pria memang telah memiliki pengalaman kegiatan berkelompok yang lebih banyak dibandingkan dengan Kelompok Mandiri Wanita. Hal ini dikarenakan kaum pria di Desa Sukorame pada tahun-tahun sebelum pelaksanaan program PIDRA telah memiliki kesadaran dan kebiasaan andil dalam aktivitas gotong royong masyarakat, seperti kegiatan bersih desa, pembukaan jalan desa, pembangunan saran umum, dan kegiatan fisik lainnya yang memang merupakan kebiasaan kaum pria di Desa Sukorame dalam aktivitas sosial bermasyarakatnya. Namun pada aktivitas pemanfaatan PC, Kelompok Mandiri Wanita memiliki semangat yang lebih tinggi untuk mau belajar dan berkembang mengiringi pertumbuhan teknologi di pedesaan, sehingga telah tercapai kondisi kemandirian beraktivitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan Kelompok Mandiri Pria. Dari beberapa sub aktivitas tersebut dapat terlihat bahwa Kelompok Mandiri Pria masih cenderung memiliki nilai kemandirian beraktivitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan Kelompok Mandiri Wanita, hal ini menjelaskan bahwa kaum pria di Desa Sukorame memiliki tingkat kesadaran akan keberdayaan mereka yang lebih tinggi dibandingkan kaum wanita. Kondisi ini dikarenakan pola pikir dan kodrat pria di wilayah pedesaan yang lebih unggul dalam hal memimpin dan bermusyawarah, serta karena kebiasaan dari kaum pria yang memiliki hak utama sebagai pencari pendapatan keluarga, sedangkan kaum wanita lebih cenderung menjadi pengikut saja dibanyak aspek kehidupan baik dilingkup keluarga maupun kelompok masyarakat, meskipun pada fase ini telah terlihat pergeseran positif terhadap tingkat kesadaran keberdayaan dan potensi kemandirian dari kaum wanita.

5.2.1.3. Aktivitas program pada fase evaluasi

Fase evaluasi berlangsung setelah masa program berakhir yakni dari tahun 2010 hingga sekarang, namun pada jabaran kali ini kondisi kemandirian pada fase evaluasi hanya dibahas hingga tahun 2011, dengan dasar saat penelitian baru dilakukan pada pertengahan tahun 2012 sehingga data primer penuh yang dapat diakses hanya sampai pada tahun 2011. Fase evaluasi ini adalah fase dimana

program telah berakhir dari segala aktivitas-aktivitas yang selama ini telah dirancang program seperti kegiatan kelembagaan, pelatihan dan simpan pinjam modal. Namun Kelompok Mandiri, baik pria maupun wanita, tidak begitu saja berhenti melaksanakan aktivitas kelompok seperti biasanya, karena setiap Kelompok Mandiri telah diberikan banyak persiapan berupa kemampuan bertindak, mengakses dan mengontrol diri dan kelompok untuk terus dapat mengelola aktivitas dan usahanya secara swasembada tanpa bimbingan LSM maupun pemerintah, agar manfaat dari program dapat terus berlanjut.

Tabel 5-3. Kemandirian Kelompok Mandiri Pada Fase Evaluasi Program PIDRA (Tahun 2010-2011)

No.	Aspek Kemandirian	Capaian Kemandirian		Perbandingan Kemandirian
		KM Pria (%)	KM Wanita (%)	
1.	Organisasi Kelompok			
	a. Pembiayaan pertemuan rutin	88,24	100	**
	b. Materi pertemuan	55,88	67,04	**
	c. Penentuan pengurus	82,35	100	*
2.	Ekonomi			
	a. Simpan pinjam	72,06	100	*
	b. Bunga dan denda	70,6	81,32	**
	c. Ternak sapi dan kambing	64,71	70,33	**
	d. Usaha kelompok	63,72	71,43	**
3.	Pengelolaan Sumberdaya dan Teknologi			
	a. Pembangunan sarana prasarana	0	0	-
	b. Pemakaian PC	20,59	34,07	**
	c. Penyediaan saprotan	91,18	90,65	***
	d. Produksi keripik	64,7	25,26	*
	Rata-Rata Kemandirian	61,27	67,28	**

Keterangan: KM : Kelompok Mandiri
 * : Kemandirian KMP dan KMW sangat berbeda, perbedaan >15%
 ** : Kemandirian KMP dan KMW berbeda, perbedaan antara 1%-15%
 *** : Kemandirian KMP dan KMW tidak berbeda, perbedaan <1%

Sumber : Data Primer, 2012

Pada tabel diatas membahas tentang identifikasi aktivitas mandiri pada kegiatan rutin Kelompok Mandiri Pria dan Wanita dalam program PIDRA. Pada setiap fase program, indikator aktivitas yang terbentuk dikelompokkan menjadi 3 sub aktivitas seperti organisasi kelompok, ekonomi, dan pengelolaan sumberdaya

dan teknologi. Pada sub aktivitas organisasi kelompok, kemandirian beraktivitas terlihat dari kegiatan rutin seperti pembiayaan pertemuan rutin, persiapan materi pertemuan, dan penentuan pengurus. Sedangkan pada sub aktivitas ekonomi, kemandirian beraktivitas terlihat dari kegiatan rutin pengelolaan simpan pinjam kelompok, pelaksanaan bunga dan denda pinjaman, penggembalaan ternak kelompok seperti sapi dan kambing, serta pengelolaan usaha kelompok seperti toko serba usaha dan *home industry* keripik (keripik singkong dan keripik pisang). Dan untuk sub aktivitas pengelolaan sumberdaya dan teknologi, kemandirian beraktivitas terlihat dari kegiatan rutin pembangunan dan perawatan sarana prasarana desa, pemakaian PC milik kelompok, penyediaan modal saprotan kelompok, dan proses produksi keripik sebagai salah satu usaha yang dikembangkan oleh Kelompok Mandiri.

Pada sub aktivitas organisasi kelompok, rata-rata Kelompok Mandiri Pria memiliki nilai persentase kemandirian beraktivitas yang lebih rendah dibandingkan dengan Kelompok Mandiri Wanita. Hal ini dikarenakan Kelompok Mandiri Wanita lebih memiliki peningkatan kesadaran akan potensi dan tanggung jawab mereka dalam pengelolaan kelompok, sedangkan Kelompok Mandiri Pria cenderung mengalami penurunan semangat dalam beberapa aktivitas organisasi kelompok. Hal ini dikarenakan kaum pria di Desa Sukorame pada fase evaluasi program PIDRA tidak memiliki semangat sebesar yang dimiliki Kelompok Mandiri Wanita untuk terus dapat melanjutkan manfaat yang telah diberikan oleh program PIDRA selama 8 tahun pelaksanaannya. Pada sub aktivitas ekonomi didapat analisis bahwa rata-rata Kelompok Mandiri Wanita memperoleh nilai kemandirian beraktivitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan Kelompok Mandiri Pria, khususnya pada kegiatan pengelolaan simpan pinjam dan pelaksanaan bunga dan denda pinjaman serta pengelolaan usaha kelompok. Kondisi ini dikarenakan pada kegiatan pengelolaan keuangan kelompok, kaum wanita cenderung lebih terampil dan sabar dalam melakukan pengelolaan pembukuan, selain itu juga kaum wanita memiliki tingkat kesadaran yang tinggi akan tanggung jawab bersama terhadap bantuan keuangan kelompok yang mereka terima dari program. Sedangkan pada separuh anggota Kelompok Mandiri Pria telah mengalami *kemandegan* pada aspek pengelolaan keuangan kelompok yang

disebabkan oleh ketidakmampuan mereka dalam mengelola modal yang telah didapatkan sehingga saat masa program telah habis, tidak ditemukan perkembangan modal yang telah dibantukan, khususnya yang berupa uang dan ternak kelompok.

Pada sub aktivitas pengelolaan sumberdaya dan teknologi, rata-rata Kelompok Mandiri Pria masih memiliki nilai persentase kemandirian beraktivitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan Kelompok Mandiri Wanita dimana pada kegiatan ini Kelompok Mandiri Pria memang telah memiliki pengalaman kegiatan berkelompok yang lebih banyak dibandingkan dengan Kelompok Mandiri Wanita. Hal ini dikarenakan kaum pria di Desa Sukorame pada tahun-tahun sebelum pelaksanaan program PIDRA telah memiliki kesadaran dan kebiasaan andil dalam aktivitas gotong royong masyarakat, seperti kegiatan penyediaan saprotan bagi modal pertanian anggota kelompok, produksi keripik kelompok dan kegiatan fisik lainnya yang memang merupakan kebiasaan kaum pria di Desa Sukorame dalam aktivitas sosial keluarga dan bermasyarakatnya. Namun pada aktivitas pemanfaatan PC, Kelompok Mandiri Wanita masih memiliki semangat yang lebih tinggi untuk mau terus berkembang mengiringi pertumbuhan teknologi di pedesaan, sehingga masih tercapai kondisi kemandirian beraktivitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan Kelompok Mandiri Pria dalam kegiatan ini. Dari beberapa sub aktivitas tersebut dapat terlihat bahwa Kelompok Mandiri Pria masih cenderung memiliki nilai kemandirian beraktivitas yang lebih rendah dibandingkan dengan Kelompok Mandiri Wanita, hal ini menjelaskan bahwa kaum wanita di Desa Sukorame memiliki peningkatan kesadaran yang jauh lebih tinggi akan keberdayaan mereka dibandingkan dengan kaum pria. Kondisi ini menjelaskan bahwa pola pikir dan kodrat wanita di wilayah Desa Sukorame telah mengalami pergeseran positif mengenai kesadaran keberdayaan dan kesetaraan gender, sehingga saat ini kaum wanita di Desa Sukorame tidak lagi cenderung menjadi pengikut kaum pria saja dibanyak aspek kehidupan, baik dilingkup keluarga maupun kelompok masyarakat.

5.2.1.4. Kemandirian kelompok

Kemandirian Kelompok Mandiri dapat diidentifikasi melalui berbagai aktivitas yang dilakukan kelompok dalam fase pengenalan, pelaksanaan, dan

evaluasi kegiatan program PIDRA. Berdasarkan olah data hasil peninjauan lapang, diperoleh kesimpulan bahwa kemandirian tertinggi Kelompok Mandiri dalam melaksanakan aktivitasnya terjadi pada fase pelaksanaan. Dan diantara ketiga aspek aktivitas yang dilaksanakan, baik pada Kelompok Mandiri Pria maupun Kelompok Mandiri Wanita, kemandirian tertinggi rata-rata dalam beraktivitas tercapai pada aspek organisasi kelompok. Rata-rata kemandirian Kelompok Mandiri pada setiap fase program dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

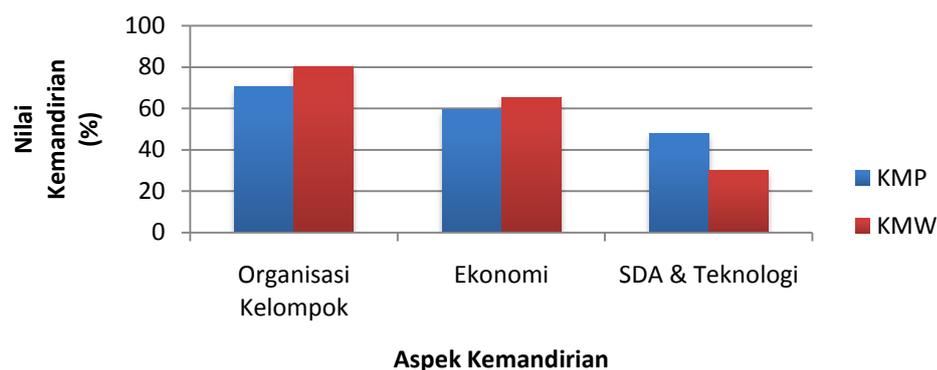
Tabel 5-4. Kemandirian Kelompok Dalam Beraktivitas

No	Fase	Aspek Kemandirian					
		Organisasi Kelompok		Ekonomi		SDA & Teknologi	
		KMP (%)	KMW (%)	KMP (%)	KMW (%)	KMP (%)	KMW (%)
1.	Pengenalan	46,07	59,7	28,67	31,91	23,53	1,37
2.	Pelaksanaan	89,21	91,94	82,11	82,41	75,74	50,89
3.	Evaluasi	75,49	89,01	67,77	80,77	44,12	37,49
Rata-Rata Kemandirian		70,26	80,22	59,51	65,03	47,8	29,92
Perbandingan Kemandirian		**		**		*	

Keterangan: KMP : Kelompok Mandiri Pria
 KMW : Kelompok Mandiri Wanita
 * : Kemandirian KMP dan KMW sangat berbeda, perbedaan >15%
 ** : Kemandirian KMP dan KMW berbeda, perbedaan antara 1%-15%
 *** : Kemandirian KMP dan KMW tidak berbeda, perbedaan <1%

Sumber : Data Primer, 2012

Secara keseluruhan, kelompok aktivitas-aktivitas tersebut bertujuan untuk mengembangkan taraf hidup masyarakat desa secara berkelanjutan serta menumbuhkan dan mengembangkan kompetensi Kelompok Mandiri (KM) pada Program *Participatory Integrated Development in Rainfed Areas* (PIDRA) di Desa Sukorame Kecamatan Binangun Kabupaten Blitar se banyak 7 Kelompok Mandiri (2 KMP dan 5 KMW) dalam melakukan usaha pemenuhan kebutuhan dan peningkatan keberdayaan individu melalui kegiatan partisipatif yang berspektif gender.



Gambar 5-1. Kondisi kemandirian Kelompok Mandiri dalam beraktivitas

Keterangan:

KMP : Kelompok Mandiri Pria

KMW : Kelompok Mandiri Wanita

Sangat Mandiri: KMP (64,8-100%), dan KMW (65,94-100%)

Mandiri : KMP (32,36-64,79%), dan KMW (32,98-65,93%)

Tidak Mandiri : KMP (0-32,35%), dan KMW (0-32,97%)

Pada tabel dan gambar kemandirian rata-rata Kelompok Mandiri dalam beraktivitas di atas diperoleh kesimpulan bahwa pada aspek kegiatan organisasi kelompok, kedua jenis Kelompok Mandiri sama-sama memiliki nilai kemandirian tertinggi dan hal ini menjelaskan bahwa pada kegiatan mengorganisasi kelompok, setiap anggota Kelompok Mandiri memiliki kemampuan berdikari, berperan, mengakses, dan mengontrol potensi diri sendiri yang jauh meningkat dibandingkan dengan keadaan pada masa sebelum program terlaksana, selain itu, diperoleh juga bahwa rata-rata kemandirian Kelompok Mandiri Wanita hampir selalu lebih tinggi dibandingkan dengan Kelompok Mandiri Pria, kecuali pada aspek pengelolaan sumberdaya dan teknologi. Kondisi ini mengakibatkan ketimpangan peran dan pergeseran pandangan mengenai kaum wanita di wilayah desa tersebut. Kaum wanita didikan program PIDRA dipandang sebagai kaum wanita berdikari yang mampu mengangkat keterpurukan keluarga dan wilayah sosial pedesaan tersebut.

5.2.2. Kemandirian Kelompok dan Kesesuaiannya dengan Tujuan Program

Kemandirian Kelompok Mandiri binaan program PIDRA di lokasi penelitian terlihat pada kondisi kedinamisan kelompok dimana kelompok mampu melaksanakan segala aktivitas dan perannya dalam masyarakat desa, kelompok dan keluarganya. Beberapa ciri yang membuktikan kemandirian pada Kelompok

Mandiri baik pria maupun wanita antara lain: 1) kelompok telah mampu memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi peningkatan kesejahteraan anggotanya di bidang sosial maupun ekonomi melalui segala aktivitasnya pada aspek kelembagaan, ekonomi, pengelolaan sumberdaya dan teknologi, serta pelatihan-pelatihan bagi anggotanya. Segala aktivitas tersebut telah menciptakan peningkatan kontrol dan akses bagi anggota kelompok untuk meningkatkan keterampilan dan taraf hidup anggota kelompok dan keluarganya, terbukti dengan semakin meningkatnya peran serta dan kontrol anggota kelompok dalam kegiatan pembangunan desa baik fisik maupun sosial, serta meningkatnya pendapatan harian keluarga anggota melalui segala usaha perdagangan dan pengelolaan ternak yang telah dirintis oleh Kelompok Mandiri; 2) kelompok telah mampu menyediakan kesempatan belajar bagi semua anggota untuk mengembangkan keterampilan dan praktek demokrasi yang sehat melalui rutinitas kelembagaan dan pelatihan-pelatihan, baik dari di tingkat dusun, desa, hingga kabupaten; 3) kelompok telah mampu membawa seluruh anggotanya keluar dari kemiskinan secara berkelanjutan, dibuktikan dengan perubahan rata-rata penghasilan harian yang pada awal fase program berlangsung (tahun 2001-2003) pendapatan harian masing-masing anggota kelompok adalah <Rp.8.000.00 dan ketika menginjak akhir fase program (tahun 2008-2009) pendapatan harian masing-masing anggota kelompok berkisar antara Rp.23.000.00 – Rp.25.500.00, hingga pada fase evaluasi program (tahun 2010-2011) pendapatan harian masing-masing anggota kelompok berkisar antara Rp.24.000.00 – Rp. 31.000.00. Masing-masing hasil manfaat kemandirian yang diperoleh oleh anggota Kelompok Mandiri terbentuk melalui hasil keaktifan dan pelatihan keterampilan Kelompok Mandiri dalam tiga aspek utama yang mendasari kegiatan aktif Kelompok Mandiri binaan PIDRA, yakni aspek organisasi kelompok, aspek ekonomi, serta aspek pengelolaan sumberdaya dan teknologi.

Melalui hasil analisis kemandirian kelompok yang telah terlihat pada saat penelitian dapat diperoleh kesimpulan bahwa secara umum pelaksanaan program PIDRA rata-rata cukup berhasil membentuk kemandirian Kelompok Mandiri dalam meningkatkan kualitas hidup anggotanya, khususnya selama program PIDRA berlangsung. Dimana program telah memberikan kesempatan kepada

anggota Kelompok Mandiri untuk berperan langsung dan memiliki kontrol dalam usaha pemberdayaan mereka secara dinamis dan demokratis, serta berkelanjutan pada beberapa aspek kegiatan hingga pasca masa program berlangsung. Hal ini diperjelas dengan analisis nilai kesesuaian bentuk kemandirian pada tabel 5-5 dibawah ini.



Tabel 5-5. Kesesuaian Kondisi Kemandirian Kelompok Dengan Tujuan Pelaksanaan Program PIDRA

No	Uraian Kemandirian	Tujuan Program						Rata-Rata Kemandirian		Perbandingan Kesesuaian
		Meningkatkan Peran		Meningkatkan Akses		Meningkatkan Kontrol		KMP	KMW	
		KMP	KMW	KMP	KMW	KMP	KMW			
		Persentase (%)								
1.	Mampu dan memiliki kesempatan berorganisasi	89,22	97,87	89,22	98,83	72,54	98,83	83,66	98,51	**
2.	Memiliki kepercayaan diri untuk tampil dimuka umum dan memimpin	85,86	48,35	52,95	78,78	85,86	72,87	74,89	66,67	**
3.	Mampu berperan aktif dalam pembangunan ditingkat desa	85,99	98,99	72,83	98,99	44,12	98,99	67,65	98,99	*
4.	Memiliki semangat untuk berkumpul	97,43	99,49	61,39	99,49	61,39	99,41	73,4	99,46	*
5.	Mampu bertukar pikiran	45,3	93,17	77,82	95,84	77,82	95,84	66,98	94,95	*
6.	Memiliki keterampilan dan pengetahuan tambahan baik teknis maupun manajerial	81,93	84,93	87,6	84,93	81,93	84,93	83,32	84,93	**
7.	Memiliki keterampilan dalam mengelola usaha dan membangun jaringan pemasaran	45,89	77,3	86,46	78,98	45,89	78,98	59,41	78,42	*
8.	Memiliki akses pada modal dengan bunga ringan	38,68	87,03	72,76	77,69	38,68	87,03	50,04	83,92	*
9.	Memiliki pengetahuan dalam bidang pertanian dan peternakan	94,47	79,91	94,47	80,99	94,47	80,99	94,47	80,63	**
10.	Memiliki kesadaran akan pentingnya prasarana lahan dan desa	98,93	21,11	98,93	89,59	97,77	21,11	98,54	43,94	*
11.	Memiliki kesadaran akan besarnya manfaat teknologi, seperti kendaraan bermotor, komputer, radio, <i>handphone</i> , dsb.	46,93	93,85	77,17	93,85	75,9	93,85	66,67	93,85	*
12.	Memiliki kesadaran akan pentingnya ekosistem hutan dan ladang untuk dikelola secara berlanjut	88,67	93,14	93,68	93,14	93,68	93,14	92,01	93,14	**
Rata-Rata Kesesuaian		74,95	81,28	80,2	89,26	72,26	83,83	75,8	84,78	**

Keterangan: KMP : Kelompok Mandiri Pria

KMW : Kelompok Mandiri Wanita

* : sangat jauh berbeda, perbedaan >15%

** : berbeda , perbedaan antara 1%-

15% *** : tidak berbeda, perbedaan <1%

Sumber: Data Primer, 2012

5.2.2.1. Aspek organisasi kelompok

Berdasarkan tabel 5-5 diatas, kemandirian pada aspek kelembagaan terbentuk melalui kegiatan pelatihan rutin yang selalu didampingi oleh petugas dari LSM terkait selama kurun waktu kurang lebih 8 tahun masa program. Kemandirian ini mencakup indikator aktivitas kondisi kemandirian Kelompok Mandiri Pria dan Wanita pada program PIDRA, seperti kemampuan dan kesempatan dalam berorganisasi, kepercayaan diri untuk tampil dimuka umum dan memimpin, berperan aktif dalam pembangunan masyarakat desa, semangat untuk berkumpul dan bermusyawarah dan peran aktif dalam bertukar pikiran. Tujuan utama dari aktivitas rutin dan pelatihan kelembagaan ini adalah untuk menciptakan kontrol dan daya saing atas diri anggota dalam menghadapi perkembangan masyarakat pedesaan kearah yang lebih moderat sehingga dapat bersatu dengan program-program pengembangan pedesaan yang terus menerus disosialisasikan beberapa waktu kedepan.

Pada indikator kemampuan dan kesempatan dalam berorganisasi nilai kondisi rata-rata kemandirian Kelompok Mandiri Pria hanya mencapai 83,36% dan lebih rendah bila dibandingkan dengan Kelompok Mandiri Wanita yang mencapai 98,51%. Nilai pada indikator keaktifan dalam berorganisasi tersebut dapat terjadi karena budaya dari suatu Kelompok Mandiri Wanita yang biasanya cenderung lebih suka berkumpul dibandingkan dengan Kelompok Mandiri Pria. Dan dalam indikator aktivitas kepercayaan diri untuk tampil dimuka umum serta memimpin, nilai kondisi kemandirian Kelompok Mandiri Pria lebih tinggi dari Kelompok Mandiri Wanita yakni 74,89% untuk Kelompok Mandiri Pria dan 66,67% untuk Kelompok Mandiri Wanita. Nilai pada indikator ini terjadi karena kodrat dan kebiasaan kaum wanita yang lebih pemalu dan pasif jika dibandingkan dengan kaum pria.

Pada indikator yang membahas tentang peran aktif dalam membangun masyarakat desa nilai kondisi kemandirian Kelompok Mandiri Pria mencapai nilai 67,65% dan pada nilai kondisi kemandirian Kelompok Mandiri Wanita mencapai 98,99%. Nilai tersebut dapat terjadi karena pengetahuan lokal dari Kelompok Mandiri Wanita untuk aktif dalam setiap gerakan pengembangan sosial pedesaan telah lebih dulu berkembang di masyarakat dibandingkan dengan

Kelompok Mandiri Mandiri Pria yang masih mementingkan kebutuhan ekonomi intern keluarga saja. Sedangkan pada indikator aktivitas yang menjelaskan tentang semangat dalam berkumpul, kondisi kemandirian Kelompok Mandiri Wanita lebih tinggi yang mencapai nilai 99,46% dan Kelompok Mandiri Pria hanya mencapai nilai 73,4%. Nilai pada indikator ini dapat terjadi karena budaya dari kaum wanita yang biasanya cenderung lebih suka berkumpul dibandingkan dengan kaum pria.

Pada indikator aktivitas peran aktif dalam bertukar pikiran, kondisi kemandirian Kelompok Mandiri Wanita mencapai nilai 94,95% dan masih lebih baik daripada kondisi kemandirian Kelompok Mandiri Pria pada nilai 66,98%. Nilai pada indikator keaktifan dalam bertukar pikiran tersebut dapat terjadi karena budaya kehidupan sosial Kelompok Mandiri Wanita yang biasanya cenderung lebih terbuka dibandingkan dengan kelompok pria. Sehingga dari 5 aspek kemandirian yang dijelaskan sebelumnya maka diperoleh rata-rata kondisi kemandirian Kelompok Mandiri Wanita memiliki nilai lebih tinggi mencapai 91,71% dibandingkan dengan nilai Kelompok Mandiri Pria yang hanya mencapai 73,31%.

5.2.2.2. Aspek ekonomi

Berdasarkan tabel 5-5 diatas, kemandirian pada aspek ekonomi terbentuk melalui kegiatan pelatihan rutin yang selalu didampingi oleh petugas dari LSM terkait serta kegiatan usaha bersama yang telah dicetuskan dan dikembangkan oleh Kelompok Mandiri selama kurun waktu kurang lebih 8 tahun masa program. Kemandirian ini mencakup aktivitas peningkatan keterampilan dan pengetahuan baik teknis maupun manajerial, pengelolaan usaha dan membangun jaringan pemasaran dan peningkatan akses terhadap modal usaha dengan bunga ringan, serta peningkatan pengetahuan dalam bidang pertanian dan peternakan. Tujuan utama dari aktivitas rutin, pelatihan dan pengelolaan usaha ini adalah untuk menciptakan kontrol dan akses terhadap peningkatan finansial keluarga anggota dalam menghadapi perkembangan masyarakat pedesaan kearah yang lebih moderat sehingga dapat bersatu dengan program-program pengembangan pedesaan yang terus menerus diaplikasikan beberapa waktu kedepan.

Dalam kegiatan peningkatan keterampilan dan pengetahuan baik teknis maupun manajerial kondisi kemandirian Kelompok Mandiri Wanita menunjukkan nilai yang lebih tinggi meskipun tidak terpaut terlalu jauh dengan Kelompok Mandiri Pria, yakni 84,93% untuk Kelompok Mandiri Wanita dan 83,32% untuk Kelompok Mandiri Pria. Nilai pada indikator peningkatan keterampilan dan pengetahuan teknis maupun manajerial tersebut dapat terjadi karena semangat juang dan kesadaran dari Kelompok Mandiri Wanita untuk berkembang sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan Kelompok Mandiri Pria. Pada kegiatan pengelolaan usaha dan membangun jaringan pemasaran kondisi kemandirian Kelompok Mandiri Pria hanya mencapai nilai 59,41% sedangkan Kelompok Mandiri Wanita mencapai nilai 78,42%. Nilai pada indikator ini dapat terjadi karena daya juang dari Kelompok Mandiri Wanita dalam hal perdagangan lebih besar dan selalu mengangkat pemikiran *guyub rukun* yang berarti keberhasilan usaha akan menjaga ikatan sesama anggota kelompok.

Dalam aktivitas peningkatan akses terhadap modal usaha dengan bunga ringan nilai kondisi kemandirian Kelompok Mandiri Wanita jauh lebih tinggi dibandingkan dengan Kelompok Mandiri Pria, yakni 50,04% untuk Kelompok Mandiri Pria dan 83,92% untuk Kelompok Mandiri Wanita. Nilai pada indikator tersebut dapat terjadi karena kaum wanita lebih memiliki kesadaran untuk mengakses bantuan program PIDRA dalam hal pinjaman berbunga ringan pada lembaga-lembaga keuangan yang direkomendasikan oleh program. Dalam aktivitas peningkatan pengetahuan dalam bidang pertanian dan peternakan kondisi kemandirian Kelompok Mandiri Pria memiliki nilai lebih tinggi daripada Kelompok Mandiri Wanita, yakni 94,47% untuk Kelompok Mandiri Pria dan 80,63% untuk Kelompok Mandiri Wanita. Perbedaan nilai ini dapat terjadi karena semangat juang dan kesadaran dari Kelompok Mandiri Pria untuk berkembang dibidang olah lahan pertanian dan peternakan lebih tinggi dibandingkan dengan Kelompok Mandiri Wanita. Hal ini sangat wajar jika dilihat dari sudut pandang wawasan lokal, dimana bagi kaum pria pertanian dan peternakan merupakan mata pencaharian utama bagi keluarganya. Dari 4 aktivitas yang diamati pada tabel diatas diperoleh bahwa nilai rata-rata kondisi kemandirian Kelompok Mandiri Pria dalam aspek ekonomi mencapai 71,81% yang masih lebih rendah bila

dibandingkan dengan kondisi kemandirian Kelompok Mandiri Wanita yang mencapai 81,97%.

5.2.2.3. Aspek pengelolaan sumberdaya dan teknologi

Berdasarkan tabel 5-5 diatas, kemandirian pada aspek pengelolaan sumberdaya dan teknologi terbentuk melalui kegiatan pelatihan rutin yang selalu didampingi oleh petugas dari LSM terkait serta kegiatan usaha bersama yang telah dicetuskan dan dikembangkan oleh Kelompok Mandiri selama kurun waktu kurang lebih 8 tahun masa program. Kemandirian ini mencakup aktivitas pembangunan serta pengelolaan prasarana lahan dan desa, pemanfaatan teknologi dan pengelolaan ekosistem hutan dan ladang. Tujuan utama dari aktivitas rutin, pelatihan dan pengelolaan ini adalah untuk menciptakan peran, kontrol dan akses terhadap manfaat ekosistem dan teknologi yang dapat diaplikasikan secara berlanjut oleh anggota dalam menghadapi perkembangan masyarakat pedesaan kearah yang lebih moderat sehingga dapat mengentaskan kemiskinan dan membantu perkembangan pedesaan untuk dapat memiliki nilai kehidupan yang bersaing dengan wilayah perkotaan.

Dalam aktivitas pembangunan serta pengelolaan prasarana lahan dan desa Kelompok Mandiri Pria hampir mencapai nilai persentase sempurna yakni 98,54% dibandingkan dengan Kelompok Mandiri Wanita yang hanya sampai pada nilai 43,94%. Nilai persentase ini didapat karena Kelompok Mandiri Pria cenderung lebih semangat berkumpul dalam kegiatan yang erat kaitannya dengan kegiatan fisik gotong royong. Hal ini juga dikarenakan kodrat kaum pria yang memang lebih menyukai pekerjaan yang berhubungan dengan fisik sedangkan bagi kaum wanita cenderung lebih halus dan lembut. Sedangkan dalam aktivitas pemanfaatan teknologi Kelompok Mandiri Wanita lebih tinggi persentasenya dibandingkan Kelompok Mandiri Pria, yakni 93,85% untuk Kelompok Mandiri Wanita dan 66,67% untuk Kelompok Mandiri Pria. Tingginya nilai pada Kelompok Mandiri Wanita dikarenakan semangat juang dan kesadaran dari Kelompok Mandiri Wanita untuk berkembang dan bersaing dalam kehidupan pedesaan maju lebih tinggi dibandingkan dengan Kelompok Mandiri Pria. Kondisi ini juga dilandasi akan pola pikir kaum wanita umumnya yang cenderung

menyukai perubahan, kemudahan dan kepribadian mereka yang jauh lebih terbuka jika dibandingkan dengan kaum pria yang lebih kaku.

Pada aktivitas pengelolaan ekosistem hutan dan ladang secara berlanjut, kondisi kemandirian Kelompok Mandiri Pria bernilai 92,01% dan tidak berbeda jauh dengan Kelompok Mandiri Wanita yang persentasenya mencapai 93,14%. Nilai pada aktivitas pengelolaan ekosistem hutan dan ladang secara berlanjut ini didapat karena pada Kelompok Mandiri Wanita dan Pria sama-sama memiliki wawasan lokal yang sangat menjunjung tinggi kehidupan yang selaras dengan alam, sehingga tertanam pada pola pandang mereka bahwa kemajuan kehidupan sosial, ekonomi dan akhlak mereka berawal dari keberlanjutan kesuburan ekosistem lahan dan hutan diwilayah mereka. Dari 3 aktivitas yang diamati pada tabel diatas diperoleh bahwa nilai rata-rata kondisi kemandirian Kelompok Mandiri Pria lebih banyak berkontribusi pada aspek sumber daya dan teknologi dibandingkan dengan Kelompok Mandiri mandiri Wanita.

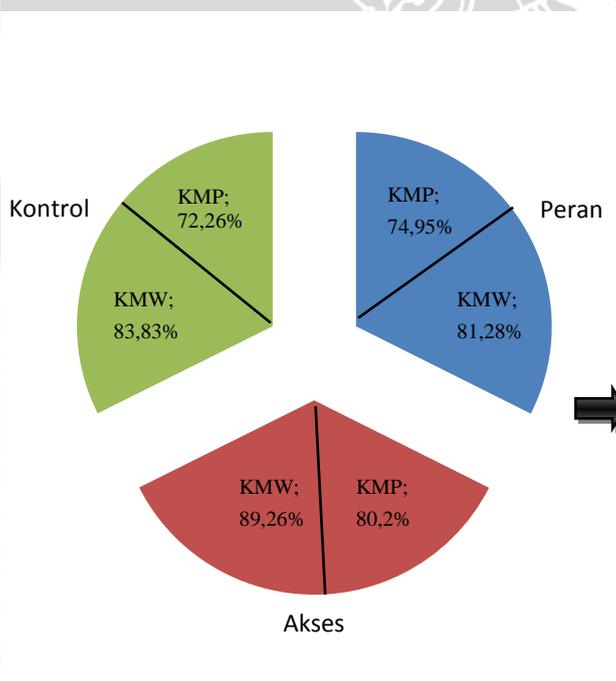
5.2.2.4. Kesesuaian pada tiga tujuan utama program

Berdasarkan analisis tabel 5-5 diatas, diperoleh nilai rata-rata kesesuaian bentuk kemandirian pada Kelompok Mandiri Pria dengan tujuan pertama program PIDRA, yakni meningkatkan peran anggota dalam kegiatan pengembangan diri, kelompok dan desa, sebesar 74,95%. Sedangkan nilai rata-rata kesesuaian bentuk kemandirian pada Kelompok Mandiri Wanita dengan tujuan pertama program PIDRA, yakni meningkatkan peran anggota dalam kegiatan pengembangan diri, kelompok dan desa, sebesar 81,28%. Hal ini menjelaskan bahwa kesesuaian kemandirian yang terbentuk dengan tujuan pertama program pada Kelompok Mandiri Wanita lebih tinggi dibandingkan pada Kelompok Mandiri Pria.

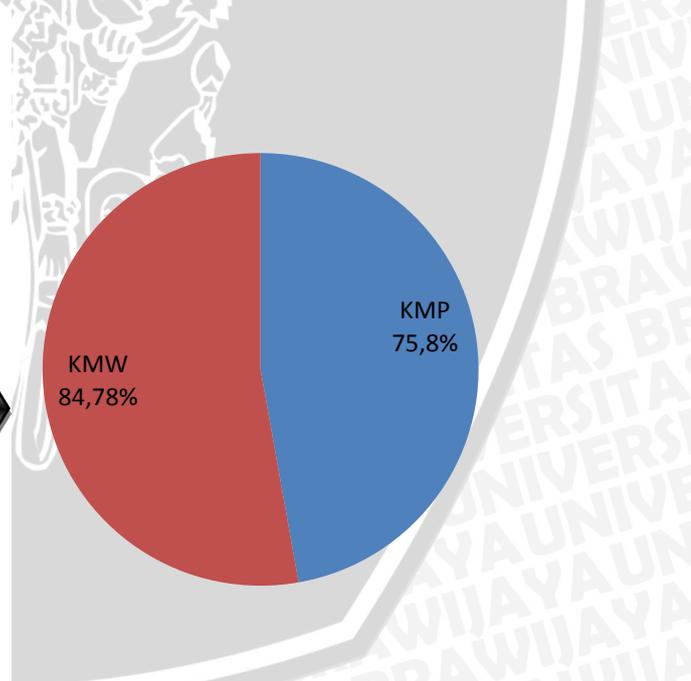
Nilai rata-rata kesesuaian bentuk kemandirian pada Kelompok Mandiri Pria dengan tujuan kedua program PIDRA, yakni meningkatkan akses anggota akan segala manfaat dan informasi yang berkaitan dengan pengembangan diri, kelompok dan desa, sebesar 80,2%. Sedangkan nilai rata-rata kesesuaian bentuk kemandirian pada Kelompok Mandiri Wanita dengan tujuan kedua program PIDRA, yakni meningkatkan akses anggota akan segala manfaat dan informasi yang berkaitan dengan pengembangan diri, kelompok dan desa, sebesar 89,26%. Hal ini menjelaskan bahwa kesesuaian kemandirian yang terbentuk dengan tujuan

kedua program pada Kelompok Mandiri Wanita juga lebih tinggi dibandingkan pada Kelompok Mandiri Pria.

Nilai rata-rata kesesuaian bentuk kemandirian pada Kelompok Mandiri Pria dengan tujuan ketiga program PIDRA, yakni meningkatkan kontrol anggota akan segala pelaksanaan kegiatan maupun keputusan yang berkaitan dengan pengembangan diri, keluarga, kelompok dan desa, sebesar 72,26%. Sedangkan nilai rata-rata kesesuaian bentuk kemandirian pada Kelompok Mandiri Wanita dengan tujuan ketiga program PIDRA, yakni meningkatkan kontrol anggota akan segala pelaksanaan kegiatan maupun keputusan yang berkaitan dengan pengembangan diri, keluarga, kelompok dan desa, sebesar 84,78%. Kondisi ini juga menjelaskan bahwa kesesuaian kemandirian yang terbentuk dengan tujuan ketiga program pada Kelompok Mandiri Wanita lebih tinggi dibandingkan pada Kelompok Mandiri Pria. Secara ringkas, kondisi kesesuaian kemandirian pada Kelompok Mandiri Pria dan Kelompok Mandiri Wanita terhadap tujuan program PIDRA dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



Gambar 5-2. Kemandirian Kelompok Mandiri dalam berperan, mengakses dan mengontrol aktivitas pengembangan diri mereka



Gambar 5-3. Kesesuaian kemandirian yang terbentuk dengan tujuan program

Melalui hasil dari bagan analisis bentuk kemandirian kelompok diatas dapat diperoleh kesimpulan bahwa secara umum pelaksanaan program PIDRA rata-rata cukup berhasil membentuk kemandirian Kelompok Mandiri baik Pria maupun Wanita dalam meningkatkan kualitas hidup anggotanya, khususnya selama program PIDRA berlangsung. Dimana program telah memberikan kesempatan kepada anggota Kelompok Mandiri untuk berperan langsung dan memiliki kontrol dalam usaha pemberdayaan mereka secara dinamis dan demokratis, serta berkelanjutan pada beberapa aspek kegiatan hingga pasca masa program berlangsung. Dari 12 kemandirian yang terbentuk akibat aktivitas rutin pada program PIDRA diperoleh bahwa nilai rata-rata kesesuaian Kelompok Mandiri Wanita terhadap ketiga tujuan utama program mencapai 84,78% sedangkan nilai rata-rata kesesuaian Kelompok Mandiri Pria terhadap ketiga tujuan utama program adalah 75,8%. Hal ini menjelaskan bahwa rata-rata tertinggi kesesuaian kemandirian dengan tujuan program diperoleh oleh Kelompok Mandiri Wanita. Begitu pula pada rata-rata tertinggi kesesuaian kemandirian dimasing-masing tujuan program, secara keseluruhan diperoleh oleh Kelompok Mandiri Wanita. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hasil kemandirian saat ini pada Kelompok Mandiri Wanita lebih sesuai dengan tujuan program dibandingkan dengan kemandirian Kelompok Mandiri Pria.

5.2.3. Analisis Gender

Sosialisasi konstruksi sosial tentang gender secara evolusi dapat mempengaruhi perkembangan masing-masing jenis kelamin. Jika konstruksi gender dianggap sebagai kodrat, akibatnya gender mempengaruhi keyakinan manusia serta budaya masyarakat tentang bagaimana pria dan wanita berpikir dan bertindak sesuai dengan ketentuan sosial tersebut. Masyarakat sebagai kelompoklah yang menciptakan perilaku pembagian gender untuk menentukan berdasarkan apa yang mereka anggap sebagai keharusan, untuk membedakan antara pria dan wanita.

Berkembangnya budaya patriarkhi yang menempatkan peran pria sebagai makhluk yang berkuasa dengan berangkat pada pelabelan terhadap dirinya. Kondisi ini secara tidak langsung telah mempengaruhi kesenjangan wanita sebagai masyarakat untuk ikut memiliki akses dalam program pembangunan. Oleh

karena itu, untuk membangun kesadaran wanita dan pria maka dilakukan pemberdayaan yang berkelanjutan untuk meningkatkan akses kontrol terhadap masing-masing jenis kelamin. Program PIDRA yang berbasis pada program pemberdayaan berpengarusutamaan gender dilakukan melalui proses pendidikan, pengenalan, dan tindakan partisipatif aktif yang diharapkan pada akhirnya akan menumbuhkan kesadaran yang menjauhkan seseorang dari rasa takut akan merdeka (*fear freedom*) dan berimbang pada kesetaraan akses di masyarakat. Oleh karena itu perubahan kesadaran gender yang terjadi setelah pelaksanaan program PIDRA sangat penting untuk dilihat dan dianalisis sebagai bahan pengkajian ulang keberhasilan program dan pembaruan program pemberdayaan kelanjutannya.

Analisis gender pada program PIDRA ini menganalisis data dan informasi secara sistematis tentang kelompok pria dan kelompok wanita untuk mengidentifikasi dan mengungkapkan kedudukan, fungsi, peran dan tanggung jawab masing-masing pihak dalam aspek-aspek yang saling mempengaruhi keduanya. Kondisi kesetaraan gender dalam penelitian ini dilihat melalui kegiatan rutin aktif dari kelompok dalam tiga fase manfaat program, yakni saat fase pengenalan, fase pelaksanaan, dan fase evaluasi yang dianalisis ke dalam tiga aspek manfaat peran gender, yaitu aspek aktivitas, akses, dan kontrol.

5.2.3.1. Aspek peran (aktivitas)

Aspek aktivitas adalah salah satu aspek dalam analisis gender yang digunakan untuk mengetahui sejauhmana pembagian kerja antara kelompok pria dan kelompok wanita dalam Kelompok Mandiri. Dasar yang digunakan dalam analisis ini adalah dengan mengetahui kegiatan apa saja yang dilakukan oleh kelompok pria dan kelompok wanita, baik aktivitas produktif maupun aktivitas sosial. Program PIDRA telah dibuktikan menciptakan peningkatan kesadaran gender, baik pada kelompok pria maupun kelompok wanita, yang berarti kesadaran masing-masing jenis kelamin untuk memperoleh hak berperan aktif dalam pembangunan semakin nyata terlihat. Hal ini dapat dilihat pada perubahan peran dari fase ke fase yang disajikan pada tabel dibawah ini.

Tabel 5-6. Peran Gender Pada Kelompok Mandiri Program PIDRA

No.	Indikator Aktivitas	Fase Program					
		Pengenalan		Pelaksanaan		Evaluasi	
		KMP	KMW	KMP	KMW	KMP	KMW
Persentase (%)							
1.	Kepengurusan di kelompok	44,11	12,08	52,94	45,05	8,82	32,96
2.	Pertemuan rutin kelompok	100	100	76,47	100	55,88	100
3.	Rapat dan musyawarah	91,17	79,12	85,29	100	55,88	100
4.	Pengembalaan ternak	0	0	55,88	80,22	55,88	80,22
5.	Pengelolaan toko kelompok	8,82	14,28	8,82	25,27	8,82	25,27
6.	Pembangunan sarana dan prasarana	73,53	2,19	100	10,71	0	0
7.	Pemakaian teknologi (PC dan perlengkapan produksi pertanian)	0	0	91,18	90,11	64,7	34,07
8.	Peran serta anggota kelompok di lembaga desa	0	0	58,82	42,85	61,76	47,25
Rata-Rata Aktivitas		39,7	25,96	66,17	61,78	38,96	52,47
Perbandingan Aktivitas		**		**		**	

Keterangan: KMP : Kelompok Mandiri Pria
 KMW : Kelompok Mandiri Wanita
 * : Kemandirian KMP dan KMW sangat berbeda, perbedaan >15%
 ** : Kemandirian KMP dan KMW berbeda, perbedaan antara 1%-15%
 *** : Kemandirian KMP dan KMW tidak berbeda, perbedaan <1%

Sumber : Data Primer, 2012

Berdasarkan hasil analisis data primer, peran Kelompok Mandiri Pria dalam beraktivitas pada fase pengenalan mencapai nilai 39,7%. Pada fase pengenalan, anggota Kelompok Mandiri Pria masih dalam fase penyesuaian dan pelatihan kemampuan dasar seperti pendidikan literasi dan numerasi serta manajemen organisasi, sehingga kegiatan kelompok hanya terfokus pada pembelajaran organisasi dan pengelolaan kelompok. Hal ini dijelaskan oleh salah satu responden yang menyatakan:

"...Pada tahun-tahun awal kegiatan kelompok itu ya pembelajaran baca dan tulis mbak, ya kan para anggota kelompok ini dibentuk dari para warga yang memang tidak pernah merasakan bangku sekolah, walaupun ada, ya hanya sampai tingkat sekolah dasar saja mbak. Pembelajarannya itu dilakukan saat pertemuan kelompok, sekalian menerapkan pelatihan kepemimpinan dan organisasi..."

Hampir semua responden juga menyatakan hal yang sama maupun menyetujui pernyataan yang telah dikeluarkan oleh responden pertama yang

menjelaskan kegiatan kelompok pada tahun-tahun awal Kelompok Mandiri dibentuk. Kegiatan pembelajaran dan pengelolaan masing-masing Kelompok Mandiri ini selalu didampingi oleh seorang pendamping yang berasal dari LSM penanggung jawab program PIDRA di wilayah Kabupaten Blitar.

Sedangkan pada fase pelaksanaan, peran Kelompok Mandiri Pria dalam beraktivitas mencapai nilai 66,17%. Hal ini dikarenakan pada fase pelaksanaan yang berlangsung dari tahun 2003-2009, anggota Kelompok Mandiri Pria telah memiliki keterampilan dasar dalam literasi dan numerasi, manajemen kelompok, serta pembukuan kelompok, sehingga kegiatan kelompok bisa terus dikembangkan. Di fase ini masing-masing Kelompok PIDRA juga telah menerima bantuan dana *Matching Grand* pada tahun 2004 dan 2005, dimana dana bertujuan untuk membantu Kelompok Mandiri terdidik dalam aspek pengadaan modal usaha kelompok.

Pengelolaan dana *Matching Grand* ini sepenuhnya diserahkan pada keputusan kelompok, sehingga bisa dimungkinkan dana tersebut dimanfaatkan tidak dengan cara yang sama di masing-masing kelompok. Seperti pada Kelompok Mandiri pria di Desa Sukorame, Kecamatan Binangun, Kabupaten Blitar yang terdiri atas 2 (dua) kelompok yakni KMP Gotong Royong dan KMP Budi Lestari. Dana *Matching Grand* pada KMP Gotong Royong dimanfaatkan sebagai modal membeli ternak kelompok berupa ternak sapi dan ternak kambing, dan sisa dana dikelola oleh kelompok sebagai tabungan yang bisa dipinjamkan kepada anggota. Sedangkan pada KMP Budi Lestari, dana *Matching Grand* dibagikan secara merata kepada para anggota untuk dimanfaatkan dalam kebutuhan keluarga anggota.

Perbedaan keputusan pemanfaatan dana *Matching Grand* ini terjadi dikarenakan banyaknya pertimbangan dan pola pikir yang berbeda disetiap Kelompok Mandiri, meskipun adanya pendamping yang bertugas mengarahkan anggota kelompok kepada kegiatan-kegiatan jangka panjang, seperti kegiatan investasi ternak dan tabungan kelompok, tetapi keputusan anggota merupakan pengadilan tertinggi di setiap kegiatan Kelompok Mandiri binaan PIDRA. Program PIDRA adalah salah satu program pemberdayaan masyarakat dimana tujuan utama pemberdayaan adalah terciptanya keberdayaan masyarakat yang

berarti masyarakat mampu memegang kontrol atau membuat keputusan bagi diri mereka sendiri mengenai sesuatu yang penting bagi mereka dengan cara yang terbuka, inklusif dan demokratis. Oleh karena itu, dengan adanya pelatihan-pelatihan keberdayaan masyarakat, baik pria maupun wanita, yang telah dibekalkan oleh PIDRA di tahap awal pembentukan kelompok diharapkan dapat memberikan hak setiap anggota Kelompok Mandiri agar memiliki kontrol atas diri dan kelompoknya untuk berkembang dan dapat bertanggung jawab atas segala keputusan yang telah diputuskan secara bersama.

Dan pada fase evaluasi, peran Kelompok Mandiri Pria dalam beraktivitas turun menjadi 38,96%. Hal ini dikarenakan pada fase evaluasi, dalam hal ini adalah tahun 2009-2011 ketika program PIDRA telah berakhir, Kelompok Mandiri Pria di Desa Sukorame, Kecamatan Binangun, Kabupaten Blitar yang pada mulanya terdiri atas 2 (dua) Kelompok Mandiri Pria, kini hanya tertinggal satu Kelompok Mandiri Pria saja yang masih aktif dalam melakukan kegiatan kelompok, yakni KMP Gotong Royong. Kelompok Mandiri Pria yang lainnya, yaitu KMP Budi Lestari sejak tahun 2006 telah menyatakan diri untuk pasif, dan tertinggal hanya 2 (dua) orang pengurus sebagai wakil kelompok di lembaga desa. Perfaselahan yang mendasari pasifnya kelompok ini adalah dana operasional kelompok yang telah habis dan anggota KMP Budi Lestari yang dirasa kurang telaten dalam mengelola kelompok sehingga secara beruntun beberapa anggotanya menyatakan keluar dari keanggotaan Kelompok Mandiri. Hal ini dijelaskan oleh salah satu pengurus kelompok yang menyatakan:

“...ya sebelum tahun 2006 itu bagus-bagus saja kondisi kelompok itu sebenarnya mbak. Ya setelah ada yang pinjam susah bayarnya itu yang mulai bubar. Padahal ya saya urusi, tapi kan orang-orang ga mau datang perkumpulan, karena dananya sudah habis. Cuma ya perbedaannya itu dengan kelompok wanita kalau wanita kan lebih telaten, kalau pria, khususnya dikelompok saya kan kurang telaten, seperti itu. Ya karena dalam hal ini kan pria itu banyak yang buruh, jadi ya ga telaten gitu, ga sempat kumpul...”

Berdasarkan hasil analisis data primer, peran Kelompok Mandiri Wanita dalam beraktivitas mencapai nilai 25,96%. Hal ini dikarenakan pada fase pengenalan, anggota Kelompok Mandiri masih dalam fase penyesuaian dan pelatihan kemampuan dasar seperti pendidikan literasi dan numerasi serta

manajemen organisasi, sehingga kegiatan kelompok hanya terfokus pada pembelajaran organisasi dan pengelolaan kelompok.

Sedangkan pada fase pelaksanaan, peran Kelompok Mandiri Wanita dalam beraktivitas mencapai nilai 61,78%. Hal ini dikarenakan pada fase pelaksanaan yang berlangsung dari tahun 2003-2009, anggota Kelompok Mandiri telah memiliki keterampilan dasar dalam literasi dan numerasi, manajemen kelompok, serta pembukuan kelompok, sehingga kegiatan kelompok bisa terus dikembangkan. Di fase ini masing-masing Kelompok PIDRA juga telah menerima bantuan dana *Matching Grand* pada tahun 2004 dan 2005, dimana dana bertujuan untuk membantu Kelompok Mandiri terdidik dalam aspek pengadaan modal usaha kelompok.

Pengelolaan dana *Matching Grand* pada Kelompok Mandiri wanita di Desa Sukorame, Kecamatan Binangun, Kabupaten Blitar ini secara keseluruhan dimanfaatkan sebagai modal membeli ternak kelompok berupa ternak sapi dan ternak kambing, dan sisa dana dikelola oleh kelompok sebagai tabungan yang bisa dipinjamkan kepada anggota. Sehingga secara umum dapat disimpulkan bahwa Kelompok Mandiri Wanita telah sepenuhnya mengerti dan menerapkan tujuan jangka panjang dari pemberian dana *Matching Grand*. Hal ini dijelaskan oleh salah satu responden yang menyatakan:

“...Dana itu ya dibuat untuk membeli ternak seperti sapi dan kambing mbak, nanti kalau ternak itu punya keturunan kan bisa digaduh, jadi diberikan ke anggota, ada yang diternakkan lagi, sampai punya anak lagi terus digaduh lagi ke anggota yang lain, ada juga yang langsung dijual. Pokoknya induk pertamanya harus tetap dijaga karena itu kan milik PIDRA. Dana Matching Grand itu juga tidak dijadikan ternak semua, sebagian ya 3 atau 4 juta disisakan untuk tabungan kelompok yang bisa disimpan pinjamkan nantinya. Saya dan anggota yang lain ya sudah mengerti, bagaimanapun, dana awal itu harus tetap ada, karena kan itu sudah dipinjami istilahnya sama PIDRA, jadi harus dijaga. Kalau ada anggota yang pinjam, ya harus dikembalikan lagi karena kan itu uang kelompok...”

Dan pada fase evaluasi, peran Kelompok Mandiri Wanita dalam beraktivitas turun menjadi 52,47%. Hal ini dikarenakan pada fase evaluasi, dalam hal ini adalah tahun 2010-2011 ketika program PIDRA telah berakhir, Kelompok Mandiri Wanita di Desa Sukorame, Kecamatan Binangun, kabupaten Blitar hanya melakukan aktivitas intern kelompok saja, seperti pengelolaan kelompok dan

lembaga ditingkat desa serta pengelolaan aset-aset kelompok. Aktivitas intern seluruh Kelompok Mandiri Wanita di Desa Sukorame masih berlangsung dikarenakan kesadaran akan perjuangan yang selama ini dilakukan oleh kaum wanita anggota Kelompok Mandiri Wanita dalam mengembangkan kelompok dan mengelola aset yang telah dimiliki, selain itu juga didukung oleh keberdayaan kaum wanita dalam melakukan sistem pembukuan dan manajemen kelompok yang baik. Sedangkan untuk kegiatan sosial lain yang saat program PIDRA masih berlangsung juga dilaksanakan oleh beberapa Kelompok Mandiri Wanita, kini telah ditinggalkan, mengingat saat fase program PIDRA masih berjalan, keterbatasan kodrat kaum wanita tidak mendukung untuk Kelompok Mandiri Wanita berperan aktif sepenuhnya dalam kegiatan sosial ini.

5.2.3.2. Aspek akses dalam mendapatkan informasi

Aspek akses dalam penelitian ini menyangkut kesempatan/pejuang Kelompok Mandiri Pria dan Kelompok Mandiri Wanita untuk mendapatkan informasi pemberdayaan dan pembangunan masyarakat pedesaan dalam program PIDRA. Akses terhadap informasi dapat menentukan status kerja dan nilai peran masing-masing obyek yang dikaji, dalam hal ini adalah kelompok pria dan kelompok wanita. Pada umumnya kaum/kelompok wanita mempunyai akses yang terbatas jika dibandingkan dengan kaum/kelompok pria. Namun dengan adanya Program PIDRA telah menciptakan peningkatan kesadaran gender, baik pada kelompok pria maupun kelompok wanita, yang berarti kesadaran masing-masing anggota, dengan pembeda jenis kelamin, untuk memperoleh akses informasi pembangunan semakin nyata terlihat. Hal ini dapat dilihat pada perubahan peran dari fase ke fase yang disajikan pada tabel dibawah ini.

Tabel 5-7. Akses Gender Pada Kelompok Mandiri Program PIDRA

No.	Indikator Akses	Fase Program					
		Pengenalan		Pelaksanaan		Evaluasi	
		KMP	KMW	KMP	KMW	KMP	KMW
Persentase (%)							
1.	Memperoleh pinjaman modal usaha (uang, bibit atau pupuk)	100	100	100	100	100	100
2.	Memperoleh hibah keturunan ternak	0	0	55,88	80,22	100	80,22
3.	Memperoleh dana THR dari tabungan kelompok	100	100	100	100	100	100
4.	Memperoleh pelatihan dasar pemberdayaan (kepemimpinan, literasi dan numerasi)	100	100	91,17	100	0	0
5.	Memperoleh pelatihan kewirausahaan	0	0	58,82	72,52	58,82	85,71
6.	Memperoleh pelatihan dan informasi budidaya pertanian	58,81	28,56	82,35	81,31	91,17	65,93
7.	Memperoleh pelatihan manajemen	44,11	32,96	52,94	82,41	0	0
Rata-Rata Akses		57,56	51,65	77,31	88,07	64,28	61,69
Perbandingan Akses		**		**		**	

Keterangan: KMP : Kelompok Mandiri Pria
 KMW : Kelompok Mandiri Wanita
 * : Kemandirian KMP dan KMW sangat berbeda, perbedaan >15%
 ** : Kemandirian KMP dan KMW berbeda, perbedaan antara 1%-15%
 *** : Kemandirian KMP dan KMW tidak berbeda, perbedaan <1%

Sumber : Data Primer, 2012

Berdasarkan hasil analisis data primer, akses Kelompok Mandiri Pria terhadap informasi pada fase pengenalan telah mencapai 57,56%. Hal ini menunjukkan bahwa peluang Kelompok Mandiri Pria dalam mendapatkan informasi dari program cukup mudah. Dari tabel hasil analisis data primer diatas menunjukkan bahwa terdapat beberapa jenis informasi yang belum dapat diakses oleh Kelompok Mandiri Pria dikarenakan pada saat fase pengenalan ini, informasi-informasi tersebut belum tersedia bagi setiap Kelompok Mandiri, baik Kelompok Mandiri Pria maupun Kelompok Mandiri Wanita, di Desa Sukorame, kecamatan Binangun, Kabupaten Blitar.

Sedangkan pada fase pelaksanaan, akses Kelompok Mandiri Pria terhadap informasi meningkat menjadi 77,31%. Hal ini menunjukkan bahwa peluang Kelompok Mandiri Pria dalam mendapatkan informasi dari program sangat besar.

Dan pada fase evaluasi, aspek akses Kelompok Mandiri Pria terhadap informasi menurun sedikit hingga mencapai nilai 64,24%. Hal ini menunjukkan bahwa peluang Kelompok Mandiri Pria dalam mendapatkan informasi dari program menurun tetapi masih memiliki peluang mengakses yang cukup besar. Dari tabel hasil analisis data primer diatas menunjukkan bahwa terdapat satu jenis informasi yang tidak diakses oleh kedua Kelompok Mandiri Pria yang terdapat di Desa Sukorame, Kecamatan Binangun, Kabupaten Blitar, yakni mengenai pelatihan pendidikan literasi dan numerasi. Hal ini dikarenakan pada saat fase evaluasi, kegiatan akses lebih ditekankan pada pengulangan informasi yang telah terbentuk sebagai hasil dari pelatihan oleh program PIDRA dan perlu untuk terus dilanjutkan agar terbentuk suatu pola budaya baru yang mendukung keberdayaan masyarakat petani pedesaan, seperti akses simpan pinjam, hibah, usaha mikro, dan ditambah dengan penerimaan informasi terusan dari program pemberdayaan lain yang dapat menambah wawasan dan pelatihan yang menunjang perkembangan dan keberdayaan Kelompok Mandiri binaan PIDRA. Sedangkan untuk pengetahuan dan pelatihan dasar dari program PIDRA dihentikan seiring dengan berhentinya fase program.

Berdasarkan hasil analisis data primer, aspek akses Kelompok Mandiri Wanita terhadap informasi pada fase pengenalan telah mencapai 51,65%. Hal ini menunjukkan bahwa peluang Kelompok Mandiri Wanita dalam mendapatkan informasi dari program sudah cukup mudah. Dari tabel hasil analisis data primer diatas menunjukkan bahwa terdapat beberapa jenis informasi yang belum dapat diakses oleh Kelompok Mandiri Wanita dikarenakan pada saat fase pengenalan ini, informasi-informasi tersebut belum tersedia bagi setiap Kelompok Mandiri, baik Kelompok Mandiri Pria maupun Kelompok Mandiri Wanita, di Desa Sukorame, kecamatan Binangun, Kabupaten Blitar.

Sedangkan pada fase pelaksanaan, aspek akses Kelompok Mandiri Wanita terhadap informasi meningkat menjadi 88,07%. Hal ini menunjukkan bahwa peluang Kelompok Mandiri Wanita dalam mendapatkan informasi dari program sangat besar. Dan pada fase evaluasi, aspek akses Kelompok Mandiri Wanita terhadap informasi Menurun kembali menjadi 61,69%. Hal ini menunjukkan bahwa peluang Kelompok Mandiri Wanita dalam mendapatkan informasi dari

program menurun tetapi masih relatif mudah untuk diakses. Dari tabel hasil analisis data primer diatas menunjukkan bahwa terdapat satu jenis informasi yang tidak diakses oleh kelima Kelompok Mandiri Wanita yang terdapat di Desa Sukorame, Kecamatan Binangun, Kabupaten Blitar, yakni mengenai pelatihan pendidikan literasi dan numerasi. Hal ini dikarenakan pada saat fase evaluasi, kegiatan akses lebih ditekankan pada pengulangan informasi yang telah terbentuk sebagai hasil dari pelatihan oleh program PIDRA dan perlu untuk terus dilanjutkan agar terbentuk suatu pola budaya baru yang mendukung keberdayaan masyarakat petani pedesaan, seperti akses simpan pinjam, hibah, usaha mikro, dan ditambah dengan penerimaan informasi terusan dari program pemberdayaan lain yang dapat menambah wawasan dan pelatihan yang menunjang perkembangan dan keberdayaan Kelompok Mandiri binaan PIDRA. Sedangkan untuk pengetahuan dan pelatihan dasar dari program PIDRA dihentikan seiring dengan berhentinya fase program.

5.2.3.3. Aspek kontrol dalam aktivitas

Aspek kontrol diukur berdasarkan siapa yang mengambil keputusan dalam pelaksanaan setiap kegiatan Kelompok Mandiri. Pengambilan keputusan disini erat kaitannya dengan keberdayaan yang terbentuk dan keberhasilan dari pelaksanaan program PIDRA. Jika kesempatan untuk mengambil keputusan dapat terjadi seimbang atau hampir seimbang diantara kedua jenis kelompok, yakni Kelompok Mandiri Pria dan Kelompok Mandiri Wanita, maka keberdayaan masyarakat berorientasikan gender dapat dinyatakan terbukti sehingga program pemberdayaan gender juga dapat dinyatakan berhasil.

Program PIDRA telah menciptakan peningkatan kesadaran gender yang sangat pesat pada aspek kontrol dalam aktivitas, baik pada kelompok pria maupun kelompok wanita, yang berarti kesadaran masing-masing anggota, dengan pembeda jenis kelamin, untuk memiliki kontrol dalam segala aktivitas kehidupan semakin nyata terlihat. Hal ini dapat dilihat pada perubahan peran dari fase ke fase yang disajikan pada tabel dibawah ini.

Tabel 5-8. Kontrol Gender Pada Kelompok Mandiri Program PIDRA

No.	Indikator Kontrol	Fase Program					
		Pengenalan		Pelaksanaan		Evaluasi	
		KMP	KMW	KMP	KMW	KMP	KMW
Persentase (%)							
1.	Penentu pengurus kelompok	100	100	100	95,6	61,76	95,6
2.	Penentu waktu dan lokasi pertemuan	14,7	12,08	35,29	95,6	55,88	95,6
3.	Penentu peraturan dan sangsi kelompok	17,64	24,17	17,64	27,47	8,82	32,96
4.	Penentu perwakilan kelompok dalam aktivitas luar kelompok	0	0	100	54,94	58,82	10,99
5.	Penentu hibah keturunan ternak	0	0	44,11	95,6	55,88	95,6
6.	Penentu jenis usaha kelompok	17,64	12,08	14,7	54,94	8,82	49,45
7.	Mengikuti kegiatan pemberdayaan diluar program PIDRA	0	0	61,76	37,36	61,76	100
Rata-Rata Kontrol		21,43	21,19	53,36	65,93	44,53	68,6
Perbandingan Kontrol		***		**		*	

Keterangan: KMP : Kelompok Mandiri Pria
 KMW : Kelompok Mandiri Wanita
 * : Kemandirian KMP dan KMW sangat berbeda, perbedaan >15%
 ** : Kemandirian KMP dan KMW berbeda, perbedaan antara 1%-15%
 *** : Kemandirian KMP dan KMW tidak berbeda, perbedaan <1%

Sumber : Data Primer, 2012

Berdasarkan hasil analisis, aspek kontrol Kelompok mandiri Pria dalam keberlangsungan program PIDRA mencapai 21,43%. Hal ini menunjukkan bahwa kontrol kelompok pria dalam kegiatan-kegiatan Kelompok Mandiri pada fase pengenalan telah bergerak menuju ke harapan dari program. Semakin tinggi kontrol Kelompok Mandiri Pria di Desa Sukorame, Kecamatan Binangun, Kabupaten Blitar, maka akan lebih mudah pula pengambilan keputusan pada setiap aspek aktivitas yang dilakukan Kelompok Mandiri dalam program PIDRA, karena mereka yang memegang dan berperan langsung dalam program pemberdayaan tersebut. Sedangkan pada fase pelaksanaan, aspek kontrol Kelompok Mandiri Pria dalam keberlangsungan program PIDRA meningkat menjadi 53,36%. Hal ini mengakibatkan semakin berkembangnya keberdayaan sosial dan ekonomi Kelompok Mandiri Pria karena adanya peningkatan kontrol terhadap peluang pengambilan keputusan dalam aktivitas Kelompok Mandiri dalam program PIDRA.

Dan pada fase evaluasi, aspek kontrol Kelompok Mandiri Pria dalam keberlangsungan program PIDRA sedikit menurun menjadi 44,53%. Hal ini menunjukkan bahwa kontrol kelompok pria dalam kegiatan-kegiatan Kelompok Mandiri pada fase evaluasi telah menurun dibandingkan pada fase pelaksanaan program. Hal ini diakibatkan oleh pasifnya salah satu Kelompok Mandiri Pria di Desa Sukorame, Kecamatan Binangun, Kabupaten Blitar, dalam aktivitas Kelompok Mandiri pasca program PIDRA selesai, sehingga mengakibatkan merosotnya nilai kontrol kelompok pria terhadap peluang pengambilan keputusan dalam aktivitas Kelompok Mandiri yang masih berjalan hingga saat ini.

Sedangkan aspek kontrol Kelompok Mandiri Wanita dalam keberlangsungan program PIDRA pada fase pengenalan mencapai 21,19%. Hal ini menunjukkan bahwa kontrol kelompok wanita dalam kegiatan-kegiatan Kelompok Mandiri pada fase pengenalan telah menuju ke harapan dari program. Semakin tinggi kontrol Kelompok Mandiri Wanita di Desa Sukorame, Kecamatan Binangun, Kabupaten Blitar, maka akan lebih mudah pula pengambilan keputusan pada setiap aspek aktivitas yang dilakukan Kelompok Mandiri dalam program PIDRA, karena mereka yang memegang dan berperan langsung dalam program pemberdayaan tersebut. Dan pada fase pelaksanaan, aspek kontrol Kelompok Mandiri Wanita dalam keberlangsungan program PIDRA meningkat menjadi 65,93%. Hal ini mengakibatkan semakin berkembangnya keberdayaan sosial dan ekonomi Kelompok Mandiri Wanita karena adanya peningkatan kontrol terhadap peluang pengambilan keputusan dalam aktivitas Kelompok Mandiri dalam program PIDRA.

Dan pada fase evaluasi, aspek kontrol Kelompok Mandiri Wanita dalam keberlangsungan program PIDRA semakin meningkat hingga persentase 68,6%. Hal ini menunjukkan tingginya kontrol kelompok wanita dalam kegiatan-kegiatan Kelompok Mandiri pada fase evaluasi pasca program PIDRA. Semakin tinggi kontrol Kelompok Mandiri Wanita di Desa Sukorame, Kecamatan Binangun, Kabupaten Blitar, maka akan lebih mudah pula pengambilan keputusan oleh kelompok wanita pada setiap aspek aktivitas yang dilakukan Kelompok Mandiri, karena mereka yang memegang dan berperan langsung dalam program pemberdayaan tersebut.

5.2.4. Kondisi kesetaraan gender

Pada kenyataannya Kelompok Mandiri Pria dan kelompok Mandiri Wanita sebenarnya sama-sama memiliki peluang yang hampir sama dalam melakukan kegiatan aktif (peran) di Kelompok Mandiri. Perbedaan signifikan dari aktivitas yang dilakukan antara Kelompok Mandiri Pria dan Kelompok Mandiri Wanita terlihat hanya pada beberapa aspek kegiatan saja, seperti penggembalaan ternak, pengelolaan toko, dan kegiatan sosial pembangunan prasarana desa. Kondisi ini dapat dimengerti karena peran gender juga tidak lepas dari pembeda kodrat antara pria dan wanita. Kaum pria lebih cenderung memiliki fisik yang kuat dibanding wanita, sehingga Kelompok Mandiri Pria lebih sering turut campur dalam aktivitas pembangunan prasarana desa. Sedangkan kaum wanita yang lebih lemah dibanding kaum pria, jarang memiliki peran serta dalam kegiatan pembangunan prasarana desa.

Sedangkan dalam aspek usaha jangka panjang dalam mengadakan modal kelompok, seperti penggembalaan ternak dan pengelolaan toko, hanya didapati pada satu Kelompok Mandiri Pria saja yang tidak melakukan aktivitas tersebut. Hal ini dikarenakan, beberapa anggota Kelompok Mandiri Pria tersebut masih belum memahami maksud dan tujuan dari program, dan lebih mementingkan keuntungan diri sendiri dibanding dengan kemaslahatan bersama. Kondisi ini berawal dari beberapa anggota yang meminta agar dana dibagikan rata kepada setiap anggota, dan menyerahkan keputusan pengelolaan dana sepenuhnya kepada masing-masing anggota secara individu. Kemudian dana tersebut yang sebenarnya adalah pinjaman kelompok untuk anggota, karena tidak dikelola dengan baik oleh beberapa individu kelompok, mengakibatkan hilangnya peluang pinjaman itu untuk kembali ke tabungan kelompok. Hal ini dijelaskan oleh salah satu pengurus kelompok yang menyatakan:

"...Iya, karena keanggotaannya yang kurang baik, ya maaf sebelumnya, faselah keanggotaan. Kalau kelompok saya itu ya faselahnya seperti ini tadi. Sejujurnya ya anggota itu pinjamnya banyak-banyak, jujur saya ini, ya 1 juta, ya berapa gitu. Saya dulu ya pernah memberi tawaran bagaimana kalau sudah ga usah dipinjamkan, terus bunga-bunganya itu disimpan, itu berjalan beberapa bulan saja. Tapi ya bukan hanya satu anggota yang mengharapakan agar uang itu bisa dipinjamkan berjuta-juta ke tiap

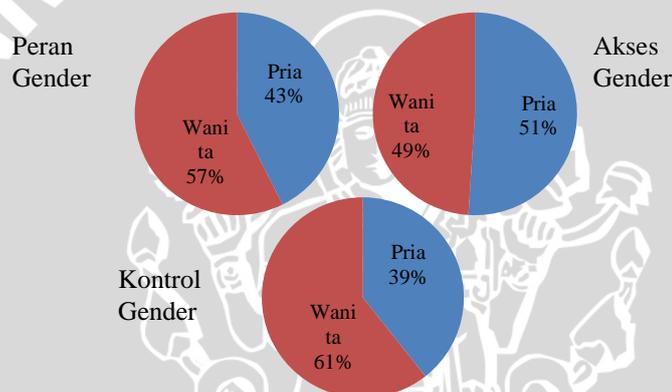
anggota. Padahal ya seperti itu, saya takutnya ada anggota yang bisa menyelewengkan...”

Tabel 5-9. Indikator Kesetaraan Gender Pada Kelompok Mandiri Program PIDRA

No.	Aspek	Jenis Kelompok		Capaian Kesetaraan
		Pria (%)	Wanita (%)	
1.	Peran	34,99	27,47	**
2.	Akses	49,72	49,44	***
3.	Kontrol	47,35	52,78	**

Keterangan: * : sangat tidak setara, perbedaan aspek >10%
 ** : tidak setara, perbedaan aspek antara 1%-10%
 *** : setara, perbedaan aspek <1%

Sumber: Data primer, 2012



Gambar 5-4. Kesenjangan gender pada Kelompok Mandiri Program PIDRA

Melalui hasil analisis data tabel dan gambar kesetaraan peran pada masing-masing Kelompok Mandiri serta penjelasan kondisi peran aktif anggota diatas, dapat disimpulkan bahwa pada aspek peran tidak tercipta kesetaraan gender antara aktivitas anggota Kelompok Mandiri Pria dengan aktivitas anggota Kelompok Mandiri Wanita. Secara garis besar, nilai kesadaran gender meningkat pesat pada Kelompok Mandiri Wanita hingga pada fase evaluasi program. Berbanding terbalik dengan kondisi kesadaran gender pada Kelompok Mandiri Pria, dimana pada fase pelaksanaan program, anggota kelompok mandiri Pria lebih memiliki peran aktif dalam beraktivitas yang kemudian seiring fase semakin menurun keaktifannya. Hal ini menjelaskan bahwasannya kesadaran gender bergerak kearah positif pada Kelompok Mandiri Wanita tetapi Kelompok Mandiri Pria

belum mampu menyeimbangkan kesadaran gender tersebut, sehingga belum tercapai suatu kesetaraan gender pada aspek ini.

Sedangkan pada aspek akses, dapat disimpulkan bahwa telah tercipta kesetaraan gender, meskipun belum sempurna, antara aktivitas anggota Kelompok Mandiri Pria dengan aktivitas anggota Kelompok Mandiri Wanita pada fase pelaksanaan dan evaluasi program. Secara garis besar, nilai kesadaran gender meningkat pesat pada Kelompok Mandiri Wanita dan Pria hingga pada fase pelaksanaan program. Namun seiring fase evaluasi program berlangsung, kondisi kesadaran dan keaktifan gender dalam Kelompok Mandiri Pria maupun Wanita untuk mengakses segala manfaat program mengalami sedikit penurunan. Meskipun demikian, kondisi penurunan keaktifan Kelompok Mandiri ini tidak berpengaruh terlalu besar terhadap grafik pencapaian kesetaraan gender dalam aspek akses yang menjelaskan bahwasannya kesadaran gender bergerak kearah positif pada Kelompok Mandiri Wanita dan Kelompok Mandiri Pria relatif mampu menyeimbangkan kesadaran gender tersebut, sehingga telah tercapai suatu kesetaraan gender pada aspek ini.

Dan untuk aspek kontrol, diperoleh kesimpulan bahwa tidak tercipta kesetaraan gender antara aktivitas anggota Kelompok Mandiri Pria dengan aktivitas anggota Kelompok Mandiri Wanita pada fase pelaksanaan hingga fase evaluasi program. Secara garis besar, nilai kesadaran gender meningkat pesat pada Kelompok Mandiri Wanita dan Pria hingga pada fase pelaksanaan program. Namun seiring fase evaluasi program berlangsung, kekuatan akan kontrol gender dalam segala aktivitas Kelompok Mandiri, baik Pria maupun Wanita mengalami sedikit penurunan. Hal ini menjelaskan bahwasannya kesadaran gender bergerak kearah positif pada Kelompok Mandiri Wanita tetapi Kelompok Mandiri Pria belum mampu menyeimbangkan kesadaran gender tersebut, sehingga belum tercapai suatu kesetaraan gender pada aspek ini.

5.2.5. Analisis Program

Peranan program *Participatory Integrated Development in Rainfed Areas* (PIDRA) di Desa Sukorame Kecamatan Binangun Kabupaten Blitar dalam membantu masyarakat miskin yang tergabung dalam Kelompok Mandiri berspektif gender adalah untuk mewujudkan keberdayaan dan kemandirian

beraktivitas anggota kelompok yang berkelanjutan. Kemandirian beraktivitas anggota disini tercipta akibat proses rutin pemberdayaan dalam pelaksanaan program PIDRA seperti pemberian kepercayaan atau wewenang (*authority*) pada anggota kelompok untuk menjalankan dan membuat keputusan sendiri dalam segala aktivitas Kelompok Mandiri, memberikan rasa percaya diri dan kompetensi (*confidence and competence*) pada Kelompok Mandiri dalam menghadapi kehidupan sosial bermasyarakat disegala aspek dan kegiatan pembangunan pedesaan, membangkitkan keyakinan (*trust*) akan potensi dan peran penting mereka dalam setiap kegiatan pembangunan masyarakat pedesaan, meningkatkan peluang (*opportunities*) partisipasi sekaligus memberi tanggung jawab (*responsibilities*) kepada anggota dan kelompok dalam segala aktivitas yang erat kaitannya dengan pembangunan masyarakat pedesaan.

Secara umum anggota Kelompok Mandiri Pria dan Kelompok Mandiri Wanita saat ini telah memiliki kemandirian dalam beraktivitas pada kegiatan-kegiatan pembangunan masyarakat pedesaan, baik ditingkat desa, kecamatan maupun kabupaten. Hal ini dibuktikan dengan semakin meningkatnya peran serta dan kontrol anggota kelompok dalam kegiatan pengelolaan organisasi desa maupun kelompok, pengelolaan ekonomi kelompok serta kegiatan-kegiatan pengelolaan wilayah lahan kering. Dalam melaksanakan aktivitas pembangunan pedesaan tersebut, baik anggota Kelompok Mandiri Pria maupun Wanita telah sama-sama mampu menekan bantuan atau campur tangan pihak luar bahkan hingga masa setelah program PIDRA dihentikan, sehingga dapat tercipta keberlanjutan kemandirian. Keberlanjutan kemandirian beraktivitas ini sangat jelas terlihat dengan banyaknya jumlah Kelompok Mandiri, baik pria maupun wanita, yang masih tetap aktif melakukan aktivitas rutin kelompok meskipun program PIDRA telah berlalu. Data peluang rata-rata keberlanjutan aktivitas rutin kelompok dan peluang berlanjutnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 5-10. Kondisi Keberlanjutan Aktivitas Gender Pada Kelompok Mandiri Program PIDRA (Tahun 2012)

Indikator	Parameter	Persentase Capaian Aktivitas		Keberlanjutan Aktivitas Gender
		KMP	KMW	
Kemandirian	5. Memiliki wewenang untuk menjalankan dan membuat keputusan dalam segala aktivitas Kelompok.	64,7	74,72	++ XXX
	6. Memiliki rasa percaya diri dan kompetensi dalam menghadapi kehidupan sosial bermasyarakat disegala aspek dan kegiatan pembangunan desa.	73,53	69,23	+++ XX
	7. Memiliki keyakinan akan potensi dan peran penting mereka dalam kegiatan pembangunan desa.	67,64	72,53	++ XXX
	8. Memiliki peluang partisipasi sekaligus tanggung jawab dalam segala aktivitas yang erat kaitannya dengan pembangunan masyarakat pedesaan termasuk keluarganya.	26,47	62,64	+ XX
Program lanjutan	3. Memperoleh wadah penyalur aktivitas pembukuan dan keorganisasian dari Lembaga Desa atau Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar.	61,76	78,02	++ XXX
	4. Memperoleh peluang menerima pelatihan-pelatihan pemberdayaan masyarakat petani dan pedagang dalam program Pemerintah Kabupaten Blitar selain PIDRA	38,23	71,43	+ XXX

Keterangan: KMP : Kelompok Mandiri Pria
 KMW : Kelompok Mandiri Wanita
 + : Peluang keberlanjutan pada kelompok pria
 + : Mungkin untuk berlanjut
 ++ : Berlanjut
 +++ : Sangat berlanjut
 X : Peluang keberlanjutan pada kelompok wanita
 X : Mungkin untuk berlanjut
 XX : Berlanjut
 XXX : Sangat berlanjut

Sumber: Data Primer, 2012

Berdasarkan data capaian aktivitas yang telah diperoleh oleh anggota Kelompok Mandiri diatas diperoleh kesimpulan bahwa pada indikator kemandirian, baik Kelompok Mandiri Pria maupun Wanita, sama-sama memiliki peluang untuk terus berlanjut meskipun program pemberdayaan PIDRA telah berhenti. Pada Kelompok Mandiri Pria, keberlanjutan kemandirian tertinggi dicapai pada aspek kepemilikan rasa percaya diri dan kompetensi dimana nilai beraktivitasnya hingga saat ini mencapai nilai 73,53%. Nilai keberlanjutan kemandirian ini diperoleh melalui hasil survei keaktifan partisipasi anggota kelompok untuk mewakili kelompoknya dalam kegiatan-kegiatan pelatihan, rapat dan aktivitas kelembagaan tingkat desa, serta pembangunan infrastruktur desa. Sedangkan pada Kelompok Mandiri Wanita, keberlanjutan kemandirian tertinggi dicapai pada aspek kepemilikan wewenang dengan nilai beraktivitas saat ini mencapai 74,72%, dan pada aspek kepemilikan keyakinan akan potensi dan peran penting mereka, dengan nilai beraktivitas saat ini mencapai 72,53%. Nilai keberlanjutan kemandirian ini masing-masing diperoleh melalui hasil survei keaktifan partisipasi anggota kelompok berperan serta dalam mengambil keputusan dan menjalankan kegiatan kelompok, serta melalui survei keaktifan partisipasi anggota kelompok dalam kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat desa. Hasil survei partisipasi aktif anggota Kelompok Mandiri dapat dilihat pada lampiran 10.

Begitu pula dengan indikator aktivitas pada program pemberdayaan lanjutan selain PIDRA juga memiliki peluang untuk terus berlanjut. Hal ini dapat dilihat pada data capaian aktivitas yang telah diperoleh oleh anggota Kelompok Mandiri diatas, dimana Kelompok Mandiri memiliki kesempatan untuk memperoleh wadah penyalur aktivitas beserta pelatihan-pelatihan yang menunjang peningkatan keberdayaan anggotanya. Pada Kelompok Mandiri Wanita, peluang berlanjut tertinggi pada program pemberdayaan lanjutan dicapai pada kedua parameter penilaian keberlanjutan yakni memperoleh wadah penyalur aktivitas dengan capaian nilai beraktivitas sebesar 78,02%, dan memperoleh pelatihan-pelatihan yang relevan dalam tujuan pemberdayaan anggota mereka dengan capaian beraktivitas sebesar 71,43%. Sedangkan pada Kelompok Mandiri Pria peluang keberlanjutan beraktivitas dalam program pemberdayaan setelah PIDRA tidak

sebesar pada Kelompok Mandiri Wanita namun masih bisa digolongkan kepada kategori aktivitas yang mungkin berlanjut. Peluang tertinggi untuk berlanjut pada Kelompok Mandiri Pria diperoleh pada aspek perolehan wadah penyalur aktivitas keberdayaan, seperti program penyalur keahlian berorganisasi, dan pengembangan usaha kecil menengah dengan nilai beraktivitas mencapai 61,76%.

Keberlanjutan kemandirian beraktivitas dan adanya wadah/program penerus aktivitas kelompok inilah yang menjadi bukti paling utama keberhasilan pelaksanaan program pemberdayaan PIDRA di Desa Sukorame Kecamatan Binangun Kabupaten Blitar. Bahkan Kelompok Mandiri binaan PIDRA seringkali menjadi contoh kelompok masyarakat unggulan yang mampu membantu desa untuk berkembang dan keluar dari zona kemiskinan. Hal ini ditegaskan oleh salah satu anggota Kelompok Mandiri, responden dalam penelitian ini:

“...kami (KM) setelah selesainya PIDRA itu tidak terus berhenti beraktivitas gitu mbak, karena kan sudah lama kami terbiasa dengan kegiatan kelompok. Aset dan pelajaran tinggalan PIDRA juga masih ada. Kalau saya pikirkan kembali, PIDRA ini sudah berhasil mendidik kami. Buktinya ya seperti yang mbak lihat, kami sudah tahu tentang gender, para wanita sudah merasa memiliki kebebasan dan hak untuk belajar. Kami yang dulunya miskin, sekarang bisa mengelola warung, bisa pergi kemana-mana mewakili desa. Setelah PIDRA selesaipun, sampai sekarang kami masih aktif mbak di kelompok baru, kelompok lanjutan PIDRA di program Ketahanan Pangan Desa. Anggota dari kelompok itu ya murni orang-orang dari kelompok PIDRA dulu...”

Selain itu, dari hasil penelitian juga dapat dinyatakan bahwa program PIDRA telah menciptakan peningkatan kesadaran aspek gender pada Kelompok Mandiri, khususnya pada Kelompok mandiri Wanita, yang berarti kesadaran masing-masing jenis kelamin untuk berdaya dalam aspek peran, akses informasi dan kontrol pada pembangunan pedesaan semakin nyata terlihat. Kesetaraan gender yang terbentuk disini dapat pula menjelaskan bahwa program telah berhasil memberikan keberdayaan pada masing-masing jenis kelamin dalam kelompok untuk memiliki kepercayaan diri, akses, peran dan kontrol dalam memerdekakan diri sendiri, serta turut aktif dalam pembangunan dan pengentasan kemiskinan masyarakat pedesaan miskin. Secara ringkas, keberdayaan gender yang terbentuk dan peluang berlanjutnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 5-11. Kondisi Keberlanjutan Keberdayaan Gender Pada Kelompok Mandiri Program PIDRA (Tahun 2012)

Indikator	Parameter	Persentase Capaian Keberdayaan		Keberlanjutan Keberdayaan Gender
		KMP	KMW	
Kondisi sosial anggota	5. Memperoleh pengakuan keorganisasian dari Lembaga Desa dan hak menerima bantuan pembangunan pedesaan.	70,58	71,43	++ XXX
	6. Memiliki peran dalam kepengengurusan Lembaga Desa.	64,7	64,84	++ XX
	7. Memperoleh pengakuan dari masyarakat desa secara umum sebagai petani kecil berkembang.	67,64	72,53	++ XXX
	8. Memiliki kontrol atas segala aktivitas pendukung keberlanjutan hidup keluarga dan masyarakat desa	58,82	67,03	++ XX
Kondisi ekonomi anggota	5. Dalam hal pangan, keluarga anggota kelompok setidaknya memiliki intensitas makan 2 kali sehari.	100	100	+++ XXX
	6. Dalam hal sandang, keluarga anggota kelompok dapat membeli pakaian 3 kali setahun.	58,82	87,91	++ XXX
	7. Keluarga anggota kelompok memiliki rumah berdinding tembok, berlantai tekel, beratap genteng.	91,18	68,13	+++ XX
	8. Anggota telah mampu menyekolahkan anak hingga jenjang SMA.	70,59	70,33	++ XX

Keterangan: KMP : Kelompok Mandiri Pria
 KMW : Kelompok Mandiri Wanita
 + : Peluang keberlanjutan pada kelompok pria
 + : Mungkin untuk berlanjut
 ++ : Berlanjut
 +++ : Sangat berlanjut
 X : Peluang keberlanjutan pada kelompok wanita
 X : Mungkin untuk berlanjut
 XX : Berlanjut
 XXX : Sangat berlanjut

Sumber: Data Primer, 2012

Berdasarkan data capaian keberdayaan yang telah diperoleh oleh anggota Kelompok Mandiri diatas diperoleh kesimpulan bahwa pada indikator kondisi sosial anggota dan keluarganya, baik pada Kelompok Mandiri Pria maupun Wanita, sama-sama memiliki peluang untuk terus berlanjut meskipun program pemberdayaan PIDRA telah berhenti. Peluang tertinggi berlanjutnya keberdayaan sosial Kelompok Mandiri Wanita tercapai pada aspek pengakuan keorganisasian dan keterampilan dari masyarakat dan lembaga desa dengan capaian nilai saat ini sebesar 71,43%, dan pada aspek pengakuan masyarakat desa akan status sosial anggota sebagai petani berkembang, dengan nilai beraktivitas saat ini mencapai 72,53%. Nilai keberlanjutan keberdayaan ini masing-masing diperoleh melalui hasil survei kesempatan anggota kelompok memperoleh bantuan fisik atau materi dan program lanjutan dalam lingkup kelompok, serta melalui survei kepemilikan tanah atau ladang sebagai sarana usaha pertanian anggota kelompok. Sedangkan pada Kelompok Mandiri Pria peluang keberlanjutan keberdayaan tidak sebesar Kelompok Mandiri Wanita, namun pada keempat parameter keberdayaan sosial kelompok ini masih bisa digolongkan kepada kategori yang berpeluang untuk berlanjut. Hasil survei keberdayaan anggota Kelompok Mandiri dapat dilihat pada lampiran 10.

Begitu pula dengan indikator keberdayaan ekonomi anggota dan keluarganya, Baik Kelompok Mandiri Pria maupun Wanita sama-sama memiliki peluang untuk terus berlanjut. Peluang tertinggi berlanjutnya keberdayaan ekonomi Kelompok Mandiri Wanita tercapai pada aspek pangan keluarga dengan capaian aspek pangan yang dapat dipenuhi sebesar 100%, dan pada aspek sandang, dengan capaian aspek yang dapat dipenuhi sebesar 87,91%. Sedangkan pada Kelompok Mandiri Pria, keberlanjutan keberdayaan ekonomi tertinggi dicapai pada aspek pangan keluarga dengan capaian aspek yang dapat dipenuhi sebesar 100%, dan pada aspek papan, dengan capaian aspek yang dapat dipenuhi sebesar 91,18%.

Berdasarkan olah data peluang keberlanjutan aktivitas dan keberdayaan anggota serta kelompok diatas, dapat dianalisis tingkat keresponsifan program terhadap pembangunan gender selama kurun waktu 10 tahun terakhir. Kenyataannya adalah aktivitas rutin dan keberdayaan pada masing-masing anggota Kelompok Mandiri, baik Kelompok Mandiri Pria maupun Kelompok

Mandiri Wanita, sama-sama memiliki peluang yang relatif besar untuk berlanjut. Hal ini dapat dijelaskan melalui tabel dibawah ini.

Tabel 5-12. Rata-Rata Keberhasilan Program PIDRA Terhadap Pembangunan Masyarakat Pedesaan Berbasis Gender

No	Indikator	Rata-Rata Capaian Indikator (%)		Keberlanjutan Indikator	Keterangan Program
		KMP	KMW		
1.	Aktivitas kelompok	55,39	71,43	++ xxx	**
2.	Keberdayaan anggota	72,79	75,27	+++ xxx	***

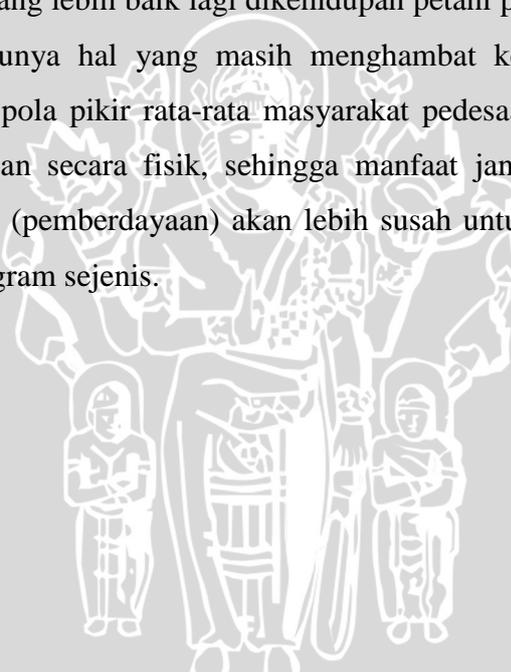
Keterangan: KMP : Kelompok Mandiri Pria
 KMW : Kelompok Mandiri Wanita
 + : Peluang keberlanjutan pada kelompok pria
 + : Mungkin untuk berlanjut
 ++ : Berlanjut
 +++ : Sangat berlanjut
 X : Peluang keberlanjutan pada kelompok wanita
 X : Mungkin untuk berlanjut
 XX : Berlanjut
 XXX : Sangat berlanjut
 * : Kurang tercipta kondisi keberlanjutan sesuai parameter / Program belum berhasil membangun masyarakat pedesaan berbasis gender
 ** : Cukup tercipta kondisi keberdayaan sesuai parameter / Program telah berhasil membangun masyarakat pedesaan berbasis gender
 *** : Tercipta kondisi keberdayaan sesuai parameter / Program sangat berhasil membangun masyarakat pedesaan berbasis gender

Sumber: Data Primer, 2012

Berdasarkan data rata-rata capaian indikator keberlanjutan yang telah diperoleh oleh anggota Kelompok Mandiri diatas diperoleh kesimpulan bahwa pada indikator aktivitas kelompok, Kelompok Mandiri Pria maupun Wanita, sama-sama memiliki peluang untuk terus berlanjut meskipun program pemberdayaan PIDRA telah berhenti. Namun peluang keberlanjutan aktivitas Kelompok Mandiri Wanita lebih tinggi, yakni mencapai nilai rata-rata beraktivitas sebesar 71,43%, dibandingkan dengan Kelompok Mandiri Pria yang hanya memiliki nilai rata-rata beraktivitas sebesar 55,39%. Sedangkan pada indikator keberdayaan anggota kelompok kelompok, baik Kelompok Mandiri Pria maupun Wanita, sama-sama memiliki peluang untuk terus berlanjut meskipun program pemberdayaan PIDRA telah berhenti. Namun peluang keberlanjutan keberdayaan

anggota Kelompok Mandiri Wanita lebih tinggi, yakni mencapai nilai rata-rata keberdayaan sebesar 75,27%, dibandingkan dengan Kelompok Mandiri Pria yang hanya memiliki nilai rata-rata keberdayaan sebesar 72,79%.

Dari berbagai pertimbangan kondisi yang telah dijabarkan diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa pelaksanaan program PIDRA di Desa Sukorame Kecamatan Binangun Kabupaten Blitar telah responsif terhadap perkembangan peran, akses, dan kontrol masyarakat pedesaan berspektif gender. Meskipun pembangunan masyarakat pedesaan belum sepenuhnya sempurna, karena masih terdapat beberapa aspek pembangunan yang belum berhasil 100% dimunculkan, namun seiring dengan kesempatan akses, peran, dan kontrol serta kontinuitas pemberdayaan yang telah dibuka oleh PIDRA, akan berimbas pada pertumbuhan masyarakat pedesaan yang lebih baik lagi dikehidupan petani pedesaan di wilayah lahan kering. Satu-satunya hal yang masih menghambat kesempurnaan kerja program disini adalah pola pikir rata-rata masyarakat pedesaan yang cenderung tergantung pada bantuan secara fisik, sehingga manfaat jangka panjang suatu program pembangunan (pemberdayaan) akan lebih susah untuk ditekankan pada setiap pelaksanaan program sejenis.



VI. KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data penelitian diperoleh beberapa kesimpulan yang dapat menjawab tujuan pokok penelitian sebagai berikut:

1. Aktivitas rutin yang dilaksanakan kelompok dalam usaha peningkatan kemandirian anggota Kelompok Mandiri, baik pria maupun wanita, terbagi menjadi 3 sub-aktivitas, yakni aktivitas organisasi kelompok, aktivitas pengelolaan ekonomi, serta aktivitas pengelolaan sumberdaya dan teknologi. Pada aspek kegiatan organisasi kelompok, baik Kelompok Mandiri Pria maupun Kelompok mandiri Wanita sama-sama memiliki nilai kemandirian beraktivitas tertinggi. Hal ini menjelaskan bahwa pada kegiatan mengorganisasi kelompok, setiap anggota Kelompok Mandiri memiliki kemampuan berdikari, berperan, mengakses, dan mengontrol potensi diri sendiri yang jauh meningkat dibandingkan dengan keadaan pada masa sebelum program diberikan.
2. Rata-rata nilai kemandirian beraktivitas pada Kelompok Mandiri Wanita hampir selalu lebih tinggi dibandingkan dengan Kelompok Mandiri Pria, kecuali pada aspek pengelolaan sumberdaya dan teknologi, dengan persentase kemandirian Kelompok Mandiri Wanita sebesar 29,92% dan kemandirian Kelompok Mandiri Pria sebesar 47,8%. Kondisi ini mengakibatkan ketimpangan peran dan pergeseran pandangan mengenai kaum wanita di wilayah desa tersebut. Kaum wanita didikan program PIDRA kini dipandang sebagai kaum wanita yang lebih berdikari dan mampu mengangkat keterpurukan keluarga dan wilayah sosial pedesaan tersebut.
3. Secara umum pelaksanaan program PIDRA rata-rata cukup berhasil membentuk kemandirian Kelompok Mandiri Wanita dalam meningkatkan kualitas hidup anggotanya, khususnya selama program PIDRA berlangsung. Dimana program telah memberikan kesempatan kepada anggota Kelompok Mandiri untuk berperan langsung dan memiliki kontrol dalam usaha pemberdayaan mereka secara dinamis dan demokratis, serta berkelanjutan pada beberapa aspek kegiatan hingga pasca masa program berlangsung. Nilai rata-

rata kesesuaian Kelompok Mandiri Wanita mencapai 84,78% dan nilai rata-rata kesesuaian Kelompok Mandiri Pria adalah 75,8%, sehingga dapat disimpulkan bahwa hasil kemandirian saat ini pada Kelompok Mandiri Wanita lebih sesuai dengan tujuan program dibandingkan dengan kemandirian Kelompok Mandiri Pria.

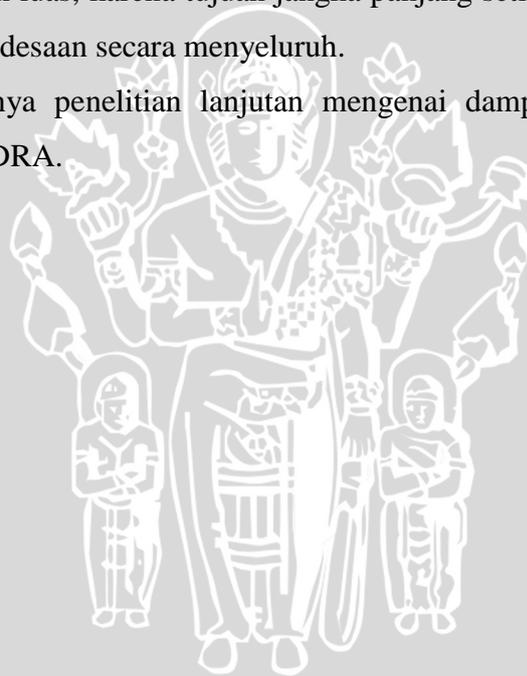
4. Kesetaraan aspek gender antara Kelompok Mandiri Pria dan Kelompok Mandiri Wanita hanya tercapai pada aspek akses, dimana perbedaan partisipasi dari Kelompok Mandiri Pria dan Kelompok Mandiri Wanita dalam mengakses segala manfaat program memiliki beda persentasi kurang dari 1%. Sedangkan pada aspek peran dan kontrol belum tercipta kesetaraan dikarenakan antara Kelompok Mandiri Pria dan Kelompok Mandiri Wanita memiliki beda persentasi partisipasi kelompok yang lebih besar dari 1%.
5. Pelaksanaan program PIDRA di Desa Sukorame Kecamatan Binangun Kabupaten Blitar telah responsif terhadap perkembangan peran, akses, dan kontrol masyarakat pedesaan berspektif gender. Hal ini dibuktikan dengan masih berlanjutnya aktivitas kemandirian dan keberdayaan anggota Kelompok Mandiri pada tahun 2012. Meskipun begitu keberhasilan program belum sepenuhnya sempurna, karena masih terdapat beberapa aspek keberdayaan dan kemandirian masih belum diperoleh oleh seluruh anggota kelompok, namun seiring dengan kesempatan akses, peran, dan kontrol serta kontinuitas pemberdayaan yang telah dibuka oleh PIDRA, akan berimbas pada keberdayaan yang lebih baik lagi di kehidupan petani pedesaan di wilayah lahan kering.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil analisis penelitian terhadap gender pada program pemberdayaan PIDRA, maka dapat diberikan beberapa saran yang dapat dipergunakan sebagai sarana evaluasi dan perbaikan bagi program lanjutan berbasis gender yang lain, seperti:

1. Program pembangunan pedesaan lanjutan diwaktu mendatang sebaiknya juga selalu diiringi dengan aktivitas pemberdayaan masyarakat seperti halnya program PIDRA.

2. Perlu adanya pelatihan lanjutan dibidang pengelolaan ekonomi dan sumberdaya serta teknologi yang berspektif gender, agar tercipta keberdayaan masyarakat secara menyeluruh yang mampu mengiringi perkembangan pedesaan.
3. Hendaknya diberikan suatu program lanjutan berbasis gender yang pengaplikasiannya berpegang pada hukum keseimbangan agar keberdayaan gender yang terbentuk berikutnya tidak timpang dan mampu dimanfaatkan sepenuhnya untuk kemajuan pedesaan secara fisik, ekonomi, dan sosial.
4. Program pemberdayaan selayaknya lebih terbuka terhadap siapa saja masyarakat pedesaan yang berkeinginan mengikuti program tersebut, selama masih dalam koridor masyarakat termarjinalkan, dan memiliki cakupan aspek kegiatan yang lebih luas, karena tujuan jangka panjang setiap program adalah untuk kemajuan pedesaan secara menyeluruh.
5. Sangat perlu adanya penelitian lanjutan mengenai dampak sosial budaya akibat program PIDRA.



DAFTAR PUSTAKA

- Budiman, A. 1985. *Pembagian Kerja Seksual*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Fakih, Mansoer. 1997. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Fakih, Mansoer. (2002). *Runtuhnya Teori Pembangunan dan Globalisasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Firmansyah Saca. 2009. *Partisipasi Masyarakat*. Wordpress. Diakses pada tanggal 8 April 2012
- Junaidi, Moch. Agus. 2006. *Keberdayaan dan Kemandirian Kelompok Afinitas (kasus pada Program Pengembangan Partisipasi Lahan Kering Terpadu di Desa Sukorame, Kecamatan Binangun Kabupaten Blitar)*. Tesis. Universitas Brawijaya Press. Malang
- Kusumo, W. Sardono. 2005. *Aceh Kembali Kemasa Depan*. Jakarta: Institut Kesenian Jakarta. Megawangi
- Moleong, Lexy J. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosda Karya. Bandung
- Moleong, Lexy J. 1993. *Metode Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosda Karya, Bandung
- Margiyani, Lusy. 1998. *Bebaskan Tumbuh : Sebuah Tinjauan tentang Pendidikan Anak*. Dalam Sarasehan Pola Asuh Anak yang Adil gender, di benteng Vredenberg, Yogyakarta
- Miftahudin, et all. 2009. *Sensitivitas dan Aplikasi Kesetaraan Gender di Organisasi Kemahasiswaan Universitas Negeri Yogyakarta*. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta
- Ndraha, Taliziduhu. 1990. *Pembangunan Masyarakat (Mempersiapkan Masyarakat Tinggal Landas)*. Rineka Cipta. Yogyakarta

Priyadi, Unggul dan Budi Astuti. 2006. *Tingkat Kesetaraan Gender Pada industri Kulit di Propinsi DIY*. Jurnal Ekonomi Pembangunan: 49-61

Ratna. 1999. *Membiarkan Berbeda*. Bandung: Mizan

Rahmawati, Ika. 2003. *Modul Analisis Gender*. Jakarta: The Asia Foundation

Sadawi, Nawal, L. 2001 *Perempuan Dalam Budaya Patriarkhi*. Jakarta: Pustaka Pelajar

Setyawati, Trias. 2002. *Pengantar Analisis Gender*. Makalah dalam seminar Pelatihan Teknik dan Analisis Gender. Yogyakarta. Tidak dipublikasikan

